



UNIVERSITAS INDONESIA

**Liberalisasi Media: Kajian Ekonomi Politik Tentang Demokratisasi
dan Industrialisasi Media di Indonesia**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi**

R Kristiawan

0906590566

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI PASCA SARJANA

KEKHUSUSAN ILMU KOMUNIKASI

JAKARTA

JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Tanda tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Program Studi : Ilmu Komunikasi

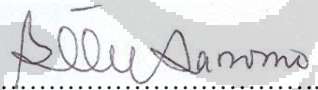
Judul Tesis : Liberalisasi Media: Kajian Ekonomi Politik tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

TIM PENGUJI TESIS

Ketua Sidang :

Dr. Billy K. Sarwono, MA



.....

Sekretaris Sidang :

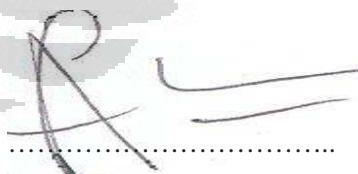
Drs. Eduard Lukman, MA



.....

Pembimbing :

Dr. Ade Armando, M.Sc



.....

Penguji Ahli :

Ir. Firman Kurniawan Sujono M.Si



.....

Ditetapkan di : Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Tanda tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Tanda tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Program Studi : Ilmu Komunikasi

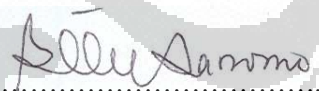
Judul Tesis : Liberalisasi Media: Kajian Ekonomi Politik tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

TIM PENGUJI TESIS

Ketua Sidang :

Dr. Billy K. Sarwono, MA



.....

Sekretaris Sidang :

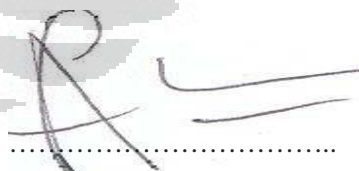
Drs. Eduard Lukman, MA



.....

Pembimbing :

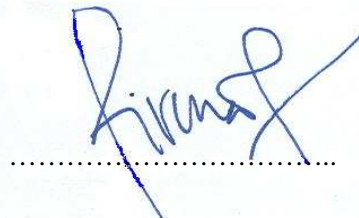
Dr. Ade Armando, M.Sc



.....

Penguji Ahli :

Ir. Firman Kurniawan Sujono M.Si



.....

Ditetapkan di : Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : R Kristiawan

NPM : 0906590566

Program Studi : Ilmu Komunikasi

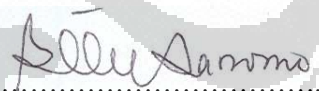
Judul Tesis : Liberalisasi Media: Kajian Ekonomi Politik tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

TIM PENGUJI TESIS

Ketua Sidang :

Dr. Billy K. Sarwono, MA



.....

Sekretaris Sidang :

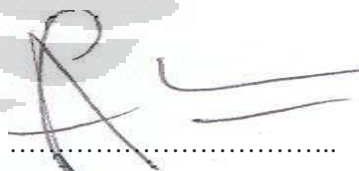
Drs. Eduard Lukman, MA



.....

Pembimbing :

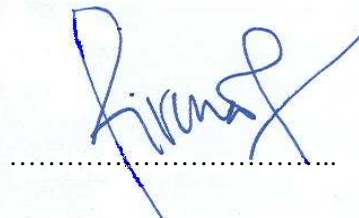
Dr. Ade Armando, M.Sc



.....

Penguji Ahli :

Ir. Firman Kurniawan Sujono M.Si



.....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Secara tematik, penulis cukup lama merenungkan kondisi dimana kekuatan ekonomi perlahan-lahan telah menggeser dominasi politik dalam media di Indonesia. Adalah sebuah tulisan di *Kompas* tahun 2005 oleh Prof. Dr. Dedy N. Hidayat berjudul *Dari Istana ke Pasar* yang menjadi pemicu awal dari riset-riset informal penulis untuk mendalami tema ini. Indonesia membutuhkan cara pandang baru dalam melihat realitas media di Indonesia. Cara pandang lama yang selalu melihat negara sebagai sumber masalah, tidak lagi terasa bertenaga manakala melihat realitas empirik di lapangan. Pendekatan ini terasa reduksionis. Pendekatan baru ini pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan penulis dalam menyusun program kerja dalam mendukung demokratisasi media di Indonesia bersama Yayasan Tifa.

Penulis merasa beruntung karena mendapat kesempatan akademik pada satu sisi, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan realitas empirik lewat berbagai kegiatan Yayasan Tifa bersama para mitra. Bersitatap dengan hiruk pikuk realitas pada satu sisi, dan refleksi akademik yang sunyi pada sisi yang lain merupakan kesempatan yang penulis syukuri. Ketegangan semacam ini sungguh bermanfaat. Dari segala kemungkinan yang ada, situasi ini penulis syukuri dan percayai sebagai salah satu penyelenggaraan Ilahi.

Penulisan tesis ini juga merupakan hasil dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Yayasan Tifa, yang sudah membiayai sebagian besar dana kuliah ini. Juga atas kebebasan yang diberikan oleh sistem kerja sehingga penulis leluasa melakukan riset, wawancara, dan kuliah sambil bekerja.
- Dr. Ade Armando, intelektual kritis cum aktivis, yang telah membantu banyak dalam membangun argumen, menata logika, dan memberikan referensi teoritik.
- Para narasumber: Bang Amir Effendi Siregar yang telah mendorong penulis untuk tidak berekreasi intelektual namun juga berpihak. Pak Paulus Widiyanto dan Mas Eko Maryadi AJI yang memberikan banyak data historis; Mbak Christiana Chelsia Chan dan Mbak Dyah Aryani, pelaku sejarah pada masa sulit; Bang Hinca Panjaitan; Toby Mendel; Mas Irawan Saptono dan Mbak Rita Nasution dari ISAI, Mas Ahmad Faisol Media Link, Mas Bimo Nugroho, Mas Ignatius Haryanto, Bang Daniel Dhakidae yang memberikan banyak waktu untuk berdiskusi, Mas Asmono Wikan SPS, Mas Hendrayana LBH Pers, Mas Wisnu Martha dan Mas Puji PR2Media, Mas Yanuar Nugroho Manchester, Mas

Prasetyantoko Atma Jaya. Kepada mereka penulis tidak hanya menemukan informasi, namun juga persahabatan.

- Teman-teman *Network Media Program-Open Society Foundation* di London, terutama Marius Dragomir dan Stewart Christholm atas bantuan data-datanya.
- Prof. Dedy N. Hidayat yang telah memberi inspirasi akademik yang kuat
- Teman-teman kuliah: Fiona, Pupung, Gita, Tari, Ika, Ferjo, Momod, Sherly, Hasan, dll yang memberi dorongan dan banyak bantuan teknis
- Fifien Harjanti, yang telah memberikan dorongan emosional untuk memahami dan menjalani misteri
- Bapak dan Ibu, Th. Her Soesanto dan Th. MC. Dora Stoffer atas segala dorongannya.
- Seluruh pengajar dan staf Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI yang membantu membuka wawasan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R Kristiawan
NPM : 0906590566
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Liberalisasi Media: Kajian Ekonomi Politik tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2012

Yang menyatakan,



R Kristiawan

ABSTRAKSI

Liberalisasi Media : Kajian Ekonomi Politik Tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia

Penelitian ini mencoba untuk melihat situasi demokratisasi media di Indonesia dalam hubungannya dengan aspek industri dan ekonomi. Latar belakang politik adalah situasi politik sebelum kejatuhan Orde Baru ketika masyarakat sipil, aktivis media, dan jurnalis, mulai mengonsolidasikan kekuatan mereka untuk meraih kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Pemicunya adalah peristiwa pembredelan tiga media cetak: *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada tahun 1994 akibat pemberitaan tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur. Pembredelan ini memicu perlawanan politik pada satu sisi, dan konsolidasi demokrasi di kalangan jurnalis dan aktivis pada sisi yang lain. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kemudian dideklarasikan oleh Goenawan Mohammad dan para wartawan lain di tahun 1994 untuk mewadahi organisasi jurnalis alternatif di luar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

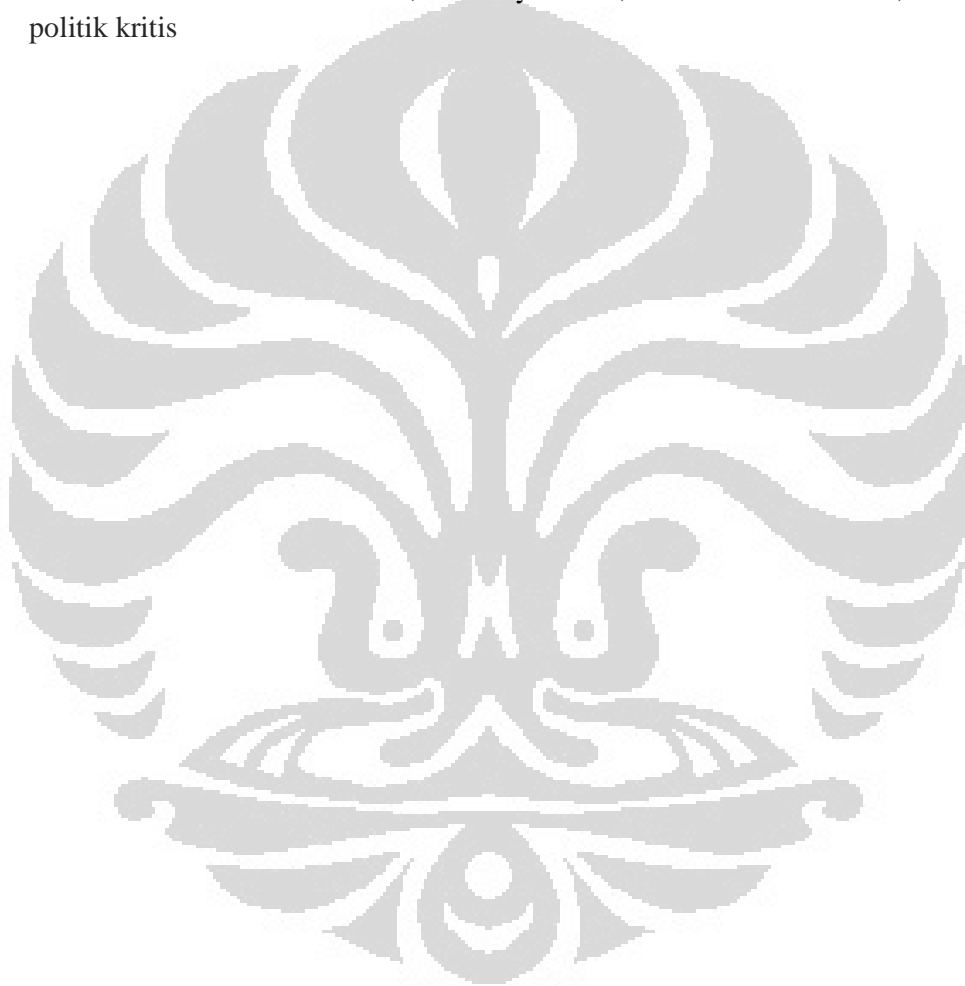
Mereka kemudian mengonsolidasikan kekuatan mereka melalui gerakan bawah tanah termasuk menerbitkan *Independen*, majalah bawah tanah, yang berbuntut pada pemenjaraan tiga jurnalis. Sejak itu, didukung oleh donor asing, Goenawan Mohammad menerbitkan *Suara Independen* untuk melanjutkan perjuangan melawan Soeharto. Perjuangan itu berhasil. Sesudah krisis ekonomi, Soeharto akhirnya jatuh, yang menjadi momentum dari proses legislasi yang banyak didukung Presiden Habibie. UU Pers No. 40/1999 disahkan dan mengubah kebijakan lama yang otoriter menjadi liberal. UU PERS menjamin ekspresi demokratis dengan membatalkan mekanisme SIUPP. Dalam konteks kapitalisme global, perubahan hukum ini merupakan perubahan struktural penting bagi Indonesia untuk berintegrasi ke kapitalisme global.

Meski demikian, situasi demokratis itu merupakan kesempatan bagi kekuatan pasar untuk memperluas pasar. Ketiadaan SIUPP memunculkan bonanza industri pers yang tidak memiliki preseden dalam sejarah pers Indonesia sebelumnya. Industri media menjadi lebih kuat dan terkonsentrasi. Di ranah penyiaran, sejarah kapitalisme semu menciptakan hubungan yang unik antara industri penyiaran dan birokrasi. Dalam arah demokratis dan kapitalistik dinamika media di Indonesia menjadi sangat menarik dalam hal bagaimana kekuatan demokratis dan kapitalistik itu mengontestasi kepentingan mereka dan bagaimana kepentingan publik dilanggar dalam arena itu. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan pasar adalah pemanang, sementara yang lain berpendapat bahwa proses ini merupakan demokratisasi. Data-data menunjukkan bahwa yang tumbuh hanyalah belanja iklan, sementara data lain seperti indeks kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis, serikat pekerja pers, memburuk. Data lain menunjukkan konvergensi kepemilikan

media yang mungkin membawa Indonesia ke konglomerasi media. Penelitian ini akan menunjukkan data-data tersebut.

Riset ini mencoba melihat dinamika ekonomi politik dalam situasi media Indonesia kontemporer. Riset ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dengan paradigma kritis sebagai basis teoritik. *Concern* riset ini adalah kualitas ruang publik di Indonesia sesudah kekuatan pasar terbukti mendominasi dinamika media di Indonesia.

Kata kunci: liberalisasi media, industry media, demokratisasi media, ekonomi politik kritis



ABSTRACT

Media Liberalization: A Political Economy Study of Media Democratization and Industrialization in Indonesia

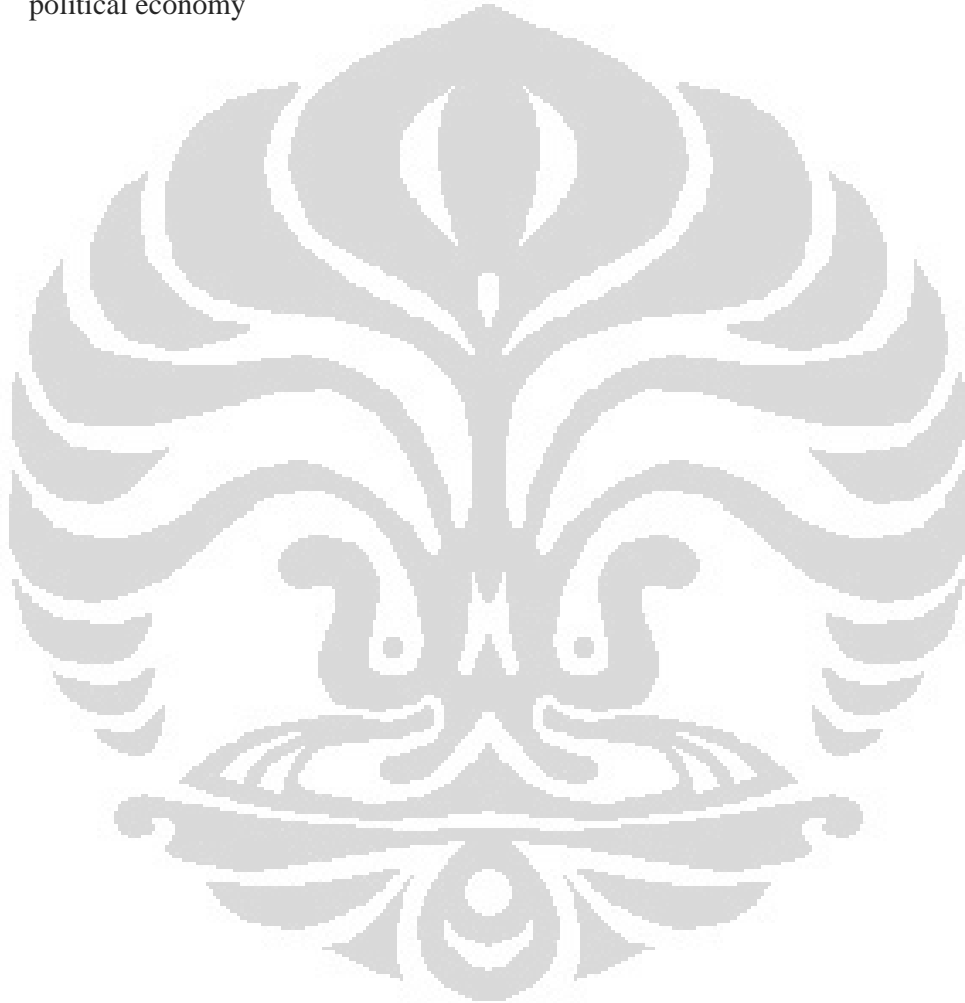
This research tries to assess the situation of media democratization in Indonesia in relation to industrial and economic aspects. The political background is the years prior to the fall of New Order when civil society, media activists, and journalists started consolidating their power for freedom of the press and freedom of expression. The political trigger is the banning of three printed media, Tempo, Editor, and Detik in 1994 due to their publications of the buying of ex East Germany battle wagons by Indonesia. This triggered political obedience on one hand, but also democratic consolidation among journalists and activists on the other hand. Alinasi Jurnalis Independen (AJI) was then declared by Goenawan Mohammad and other journalists in 1994 to provide alternative political organization for journalist out of Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

They then continued consolidating their power by underground movements including publishing Independen, an underground magazine, followed by the imprisonment of three journalists. Since then, supported by foreign donor, Goenawan Mohammad published Suara Independen to continue the struggle against Soeharto. The struggle was successful. Following economic crisis, Soeharto fell down, which was the momentum of many strategic legislations under which Habibie supported much. Press Law No. 40/1999 was passed and changed old authoritarian policies to become more liberal. Press Law guarantees democratic expression by allowing citizens to publish information without government permit (SIUPP). In global capitalism, such legal change is a crucial structural adjustment of a state to integrate in global capitalism.

However, such democratic situation was the chance for market force to expand their business. The absence of SIUPP made the bonanza of press industry without precedent in Indonesian press history before. Media industry became more powerful and concentrated. In broadcasting area, the history of erzats capitalism created a unique relationship between broadcasting industry and bureaucrats. Under democratic and capitalistic trajectories at the same time, the media dynamics in Indonesia has been very interesting in terms of how democratic and capitalistic power contested their interest and how public interest is violated in such arena. The history shows that market force is the champion after the process, while others may say that it is the democratization. Data shows that the only thing increasing is advertorial expenditure, while other performance, including media freedom index, journalist welfare, violence to journalists, press trade union, worsen. Other data shows the convergence of media ownership which may lead Indonesia media industry to media conglomeration. The paper will expose those paradoxical data.

This paper tries to assess the political economy dynamics in contemporary media situation in Indonesia. The research uses political economy approach with critical paradigm as the bases of argument. The concern of the paper will be the public sphere quality of contemporary Indonesia, after market-force is proven to dominate media dynamics in Indonesia.

Key words: media liberalization, media industry, media democratization, critical political economy



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU Liberalisasi Media dalam Liberalisasi Global	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.1. Liberalisasi di Indonesia	1
1.1.2. Liberalisasi Media di Indonesia	4
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Keterbatasan Penelitian	10
BAB DUA Kerangka Konsep	12
2.1 Penelitian Sebelumnya	12
2.2 Liberalisme Klasik	12
2.3 Kapitalis	22
2.4 Neoliberalisme dan Globalisasi	24
2.5 Relasi Liberalisme, Demokrasi, dan Kapitalisme	32
2.6 Pembangunan: Pintu Masuk Kapitalisme di Indonesia	35
2.7 Kapitalisme Semu dan Perkembangan Penyiaran di Indonesia	41
2.8 Media dalam Arus Kapitalisme Internasional	43
2.9 Teori Strukturasi Anthony Giddens	60

BAB TIGA METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1 Paradigma Penelitian	64
3.1.1 Filsafat Kritis Hingga Teori Kritis	64
3.1.2 Paradigma Kritis dalam Penelitian Sosial	68
3.2 Pendekatan Penelitian	69
BAB EMPAT TEMUAN DAN ANALISIS	75
Alur Pembahasan	75
4.1 Liberalisasi Media di Indonesia dalam Konteks Historis	78
4.1.1 Kapitalisasi Media dan Jatuhnya Media Politis	79
4.1.2 Wacana Anti Otoritarianisme Orde Baru	97
4.1.3 Liberalisasi Media dan Perubahan Paradigma Bantuan Asing pada Sektor Media	100
4.2 Perubahan Regulasi Media: <i>Structural Adjustment</i> untuk Pembukaan Pasar Global	111
4.3 Indikator-Indikator Kemenangan Industri Media dalam Media Liberal	121
4.3.1 Konglomerasi Media: Paradoks Demokrasi	121
4.3.2 Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik dalam Media Industrial	132
4.3.3 Serikat Pekerja Pers	142
4.3.4 Depolitisasi dalam Media Liberal	145
4.3.5 <i>The Logic of Accumulation and Exclusion</i> dalam Penyiaran Komunitas	152

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.1.1 Liberalisasi di Indonesia

Banyak orang menduga, proses liberalisasi di Indonesia dimulai oleh liberalisasi perbankan yang dilakukan rejim Orde Baru pada Oktober 1988 (Pakto 88) atau juga dikenal dengan nama deregulasi. Akan tetapi, proses liberalisasi di Indonesia sebenarnya secara sistemik sudah dimulai sejak tahun 1967 ketika Indonesia di bawah Soeharto bergabung kembali dengan World Bank dan IMF. Sebelumnya, Soekarno menolak mentah-mentah liberalisasi yang sering disebutnya dengan neo kolonialisme dan imperialisme (Nekolim).

Percepatan liberalisasi oleh Orde Baru pada tahun 1980-an pada dasarnya tidak mengherankan karena Orde Baru pada dasarnya hidup dari proses kapitalisasi yang berlangsung sejak politik pembangunan neo klasik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, secara pragmatis tekanan ekonomi politik global makin gencar pada era 1980-an akibat dari penurunan harga minyak dunia yang menjadi andalan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, proses liberalisasi berlangsung di banyak sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kita bisa melihat proses liberalisasi migas yang mengizinkan pemain asing masuk di pasar domestik selain Pertamina. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pendidikan yang menurunkan subsidi negara terutama pada pendidikan tinggi.

Wawan Tunggul Alam (2009) mengaitkan proses liberalisasi dengan dominasi asing lewat praktek penjualan usaha-usaha strategis, termasuk BUMN, di berbagai sektor kepada investor asing. Dia melihat bahwa penguasaan sektor-sektor strategis Indonesia berlangsung secara sistematis bahkan sejak Indonesia merdeka lewat penguasaan Freeport yang setelah lepas dari Belanda kemudian dikuasai Amerika. Tunggul Alam

mencatat bahwa dominasi pebisnis asing sudah masuk ke sektor perbankan, telekomunikasi, pelayaran, dan penerbangan asing.¹ Cara pandang yang diambil Tunggul Alam adalah konspiratik yang melihat bahwa pemain-pemain asing secara sistematis dan terencana telah memaksa Indonesia pada posisi menerima perluasan usaha asing.

Argumen dasar liberalisasi adalah mengurangi peran negara dan menyerahkan penyediaan jasa pada sektor swasta. Pengurangan peran negara didasarkan pada efisiensi subsidi negara pada sektor layanan publik dan digantikan oleh kekuatan swasta. Pada taraf tertentu, hak warga negara untuk mendapatkan layanan dari negara sering berubah menjadi konsumen dalam koridor relasi dagang.

Peralihan peran warga negara menjadi konsumen merupakan gejala umum yang terjadi dalam neoliberalisme. Pada pola umum, perubahan peran yang terjadi adalah pergeseran peran negara sebagai penyedia layanan publik ke pihak swasta. Sektor pendidikan, penyediaan air bersih, kesehatan masyarakat dan beberapa sektor lain mulai mengalami pergeseran ini. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan warga pelan-pelan digerus oleh sektor privat. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar dari negara sesuai konstitusi telah digeser menjadi kewajiban di bawah mekanisme jual beli. Relasi politik dan tata krama warga negara-negara telah digeser menjadi relasi dan tata krama produsen-konsumen.

Seperti halnya liberalisasi terjadi di berbagai sektor, media massa juga mengalami proses liberalisasi yang luar biasa. Proses liberalisasi media massa di Indonesia berlangsung dengan cara yang sangat unik. Wacana tentang otoritarianisme Orde Baru merupakan amunisi luar biasa untuk memperkuat isu demokrasi. Dalam perspektif politik, demokratisasi merupakan proses yang niscaya mengingat kesewenang-wenangan penguasa waktu itu. Demikian pula perjuangan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi menemukan habitat yang paling tepat dalam konteks perlawanan politik

¹ Selengkapnya dalam Wawan Tunggul Alam, *Di Bawah Cengkeraman Asing*, UFUK Press, Jakarta 2009.

terhadap mesin aparatus koersif dan aparatus ideologis Orde Baru. Perjuangan penuh darah untuk menegakkan kebebasan pers merupakan bukti keseriusan Indonesia menegakkan harkat politik masyarakat sipil.

Secara teoritik, modus wacana kritik terkait media massa di Indonesia pada penghujung Orde Baru sampai sekitar tahun 2004 didominasi oleh perspektif bahwa negara merupakan aktor opresi terhadap media massa. Media massa dengan demikian berada satu nasib dengan masyarakat umum dalam hal sama-sama menjadi korban politik Orba. Media diasumsikan sebagai anak domba di antara para serigala bernama negara. Satu tayangan televisi dimana seorang pembaca berita menitikkan air mata saat melaporkan terbunuhnya mahasiswa di Semanggi tahun 1998 merupakan metafor kuat yang menegaskan posisi media massa sebagai bagian dari perjuangan rakyat. Perspektif hegemonian Antonio Gramsci atau model ruang publik Jürgen Habermas dari tradisi neomarksis banyak dijadikan acuan untuk menegaskan bahwa media massa berperan dalam program perlawanan terhadap penguasa politik. Perspektif itu melengkapi wacana tentang polarisasi *political society* dan *civil society* dari tradisi Hegelian yang sering dipakai para pegiat demokrasi di Indonesia.

Yang juga patut ditulis dalam proses itu adalah peran donor-donor internasional. Donor-donor internasional sangat gencar membiayai kegiatan pro kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Penerbitan media alternatif, penguatan jurnalis independen, peningkatan kapasitas profesional dan etika media, dan advokasi hukum media banyak didanai oleh donor internasional.

Perjuangan itu berhasil. UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002 merupakan anuman perjuangan penegakan kebebasan berekspresi lewat media massa. Melalui dua UU ini, tidak ada lagi prosedur SIUPP dan ijin penyiaran. Media asing juga boleh bermain dalam ladang bisnis di Indonesia. Negara telah dilucuti.

Namun masih ada satu masalah terselip. Banyak orang tidak waspada bahwa liberalisasi politik juga sering berarti liberalisasi ekonomi. Penumbangan rezim otoriter di berbagai negara selalu diikuti oleh penetrasi investasi global. Orang juga lupa bahwa media massa

merupakan *entitas economicus* yang bisa saja mendurhakai publik. Dalam perspektif kebebasan pers klasik yang berakar pada pikiran Rousseau tentang fungsi pilar keempat, media massa digambarkan sebagai entitas yang berhadapan dengan otoritas politik negara dan mengabaikan kekuatan lain misalnya pasar. Padahal media juga memiliki watak intrinsik untuk melakukan ekspansi kapital.

1.1.2 Liberalisasi Media di Indonesia

Akhir-akhir ini, dalam konteks arus informasi yang dinamis akibat pertumbuhan media yang luar biasa, muncul juga keluhan publik mengenai kualitas isi media, terutama media televisi.² Publik merasakan bahwa media tidak terlalu lagi memperhatikan agenda publik, namun bergerak menurut kepentingan internal media itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa *rating* program menjadi aspek paling penting bagi kebijakan strategi program media.

Yang patut dicatat dari keluhan itu adalah fakta bahwa dalam iklim kebebasan media, tetap saja media saja belum tentu mewakili agenda publik. Jika diandaikan bahwa kebebasan media akan mampu mendorong kebebasan berekspresi dan memperkuat agenda publik dalam media, kini saatnya mengevaluasi pengandaian itu. Dalam iklim politik yang otoriter, negara dipandang sebagai aktor yang membelenggu kemerdekaan pers (dan diandaikan akan mengganggu kebebasan berekspresi publik). Namun ketika tekanan negara berhasil dilucuti, tetap saja publik merasa bahwa media belum sepenuhnya mewakili aspirasi publik. Refleksi ini bisa menggiring kita pada pertanyaan apakah kekuatan pasar juga memiliki bentuk dominasi tertentu. Selepas otoritarianisme negara, kini saatnya kita membidikkan analisis kita pada modus dominasi yang dikendalikan oleh kekuatan pasar.

² Sampai bulan Desember 2010, KPI menerima 20.000 aduan masyarakat tentang kualitas isi siaran televisi.

Pemberian kekuasaan kepada pihak swasta dalam bisnis media bisa dilihat dari jenis medianya. Media cetak pada masa Orde Baru sudah sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta. Penguasaan negara pada bisnis media cetak tidak mungkin dilakukan. Ini berbeda dengan televisi dimana TVRI sepenuhnya dikuasai oleh negara. Pemberian hak siar pada swasta terjadi pada tahun 1987 lewat TPI dan RCTI yang dikendalikan oleh keluarga Cendana (Tutut Hardiyanti Rukmana). Ade Armando (2006) mencatat bahwa pemberian hak siar kepada swasta ini merupakan langkah pragmatis pemerintah untuk memenuhi kehendak pebisnis domestik. Dalam cara pandangan kronial, pemberian hak siar itu adalah upaya Soeharto untuk memperkuat bisnis kroni terutama anak-anaknya.³

Ada perbedaan penting dalam transisi liberalisasi pada media dan proses liberalisasi pada sektor layanan publik di Indonesia. Pada sektor layanan publik, liberalisasi beralasan bahwa negara gagal menyediakan fasilitas publik sesuai standar terutama akibat kecilnya alokasi dana publik untuk sektor tersebut. Efisiensi anggaran kemudian dipakai juga sebagai penguat proses privatisasi layanan publik. Pada liberalisasi media, yang terjadi adalah penunggang isu perlawanan sipil terhadap otoritarianisme dimana kekuatan ekonomi kemudian meyusup dalam paket regulasi yang seolah pro kebebasan politik, padahal mengidap kelekatan pada profit yang akut. Singa sudah siap menunggu mangsa yang lolos dari mulut buaya. Bisnis media pun kemudian potensial menjadi penumpang gelap dalam proses demokratisasi.

Liberalisasi dalam konteks internasional sering pula bermakna sebagai proses *structural adjustment* regulasi nasional terhadap regulasi kapitalisme global. Pola yang sering terjadi adalah negara maju menekan negara berkembang dengan agar menyesuaikan regulasi nasional terhadap regulasi global dengan kompensasi bantuan asing. Pola transaksi semacam ini sering menjadi buah simalakama bagi negara berkembang karena pada satu sisi negara berkembang membutuhkan dana segar bagi kesehatan anggaran,

³ Di kemudian hari terbukti, langkah Soeharto ini merupakan bumerang bagi karir kekuasaannya karena televisi swasta cenderung berpihak pada gerakan reformasi 1998.

sementara di sisi yang lain sector publik seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi.

Proses dominasi paradigma pasar dalam praktek media massa berlangsung dengan cara yang tidak seimbang penguasaan pasar atas layanan publik. Bahkan banyak analisis dan kegiatan kebebasan media yang tidak secara jelas menangkap proses penting ini. Memang prosesnya sangat unik yang melibatkan aksi mirip petak umpet antara kekuatan masyarakat sipil dalam menentang Orde Baru; kepentingan global dan nasional dalam bisnis media di Indonesia; serta ambiguitas media dalam demokrasi yang berakar pada kontradiksi internal kapitalisme. Sayangnya, analisis klasik yang berpusat pada perspektif bahwa negara merupakan satu-satunya sumber petaka media di Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang.

Dalam paradigma kritis terkait proses globalisasi, orang akan cenderung berpikir bahwa proses liberalisasi media di Indonesia akan diikuti oleh intrusi modal asing ke bisnis media Indonesia dalam manifestasi kepemilikan media. Dasarnya adalah bahwa struktur kepemilikan media akan menentukan corak kultural dan informasi media tersebut. Akar dari pemikiran ini bisa dilihat pada Herbert Schiller dan Theodore Adorno.

Untuk kasus Indonesia, tampaknya hal ini perlu dilihat dengan lebih hati-hati terutama karena sampai saat ini, praktis kepemilikan media masih dikuasai oleh pemodal domestik. Rupert Murdoch sempat membeli ANTV namun kemudian menjualnya kembali. Perlu dilihat lebih jernih pada aspek manakah kepentingan kapitalisme global mendapat keuntungan dari proses reformasi media di Indonesia.

Ada beberapa celah masuknya modal asing dari pelebuan Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global, misalnya celah penjualan program media, media *franchising*, dan perusahaan iklan. Ini perlu dilihat lebih lanjut karena seperti halnya proses liberalisasi sektor lain, selalu ada aspek penetrasi modal dari para pelaku pasar bebas global. Ambil contoh misalnya liberalisasi air bersih di DKI yang disertai masuknya perusahaan Thames dan Lyonnaise; liberalisasi migas yang disertai masuknya retailer seperti Shell, Petronas, dll.

Aspek lain yang perlu dijadikan pertimbangan tentang keunikan proses liberalisasi media adalah persoalan konsolidasi pengusaha domestik di sekitar kekuasaan Soeharto. Seperti sudah disinggung di atas, pendirian RCTI dan TPI lebih merupakan akomodasi Soeharto terhadap kehendak bisnis keluarganya ketimbang semangat mendorong keterbukaan informasi.

Pelibatan masyarakat sipil juga layak untuk dibahas. Pembahasan harus dimulai pada era 1994 ketika Soeharto membredel *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*. Memang tiga majalah itu berhasil dibredel, namun semangat perlawanan masyarakat sipil justru semakin menguat sesudah itu. Pembredelan itu memulai pendirian organisasi jurnalis Aliansi Jurnalis Independen yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh jurnalis seperti Gunawan Mohammad di Sirna Galih, Bogor, tahun 1994. Perjuangan masyarakat sipil kemudian menjadi sangat menonjol dalam pembentukan UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002.

Secara finansial, gerakan masyarakat sipil sangat terbantu oleh para donor dan lembaga asing seperti USAID dan UNESCO. Draft UU Pers muncul dari lokakarya yang didanai UNESCO dengan mengundang Toby Mendel, seorang ahli hukum media dari Kanada, untuk menyusun UU Pers baru.⁴ Unsur masyarakat sipil lebih banyak bekerja atas dasar semangat anti otoritarianisme dan mendorong munculnya pers bebas di Indonesia daripada ide ekonomi. Ide-ide ekonomi seperti liberalisasi tidak banyak menjadi dasar pertimbangan pelaku masyarakat sipil waktu itu.

Masuknya donor dan pemain asing dalam proses penting Indonesia itu biasanya melalui format bantuan kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil. USAID menyediakan dana sejak lengsernya Soeharto dan bahkan membiayai Internews, lembaga nirlaba Amerika, untuk masuk dalam reformasi media di Indonesia⁵.

⁴ Dalam wawancara, Toby Mendel mengaku didanai UNESCO untuk menyusun draft UU Pers pada bulan November 1998. Program ini adalah kerjasama UNESCO dengan Depkominfo yang pada saat itu dipimpin oleh Yunus Yosfiah. Ia menyatakan bahwa Tim Kominfo menerima hampir semua usulan yang ada. Toby juga mengklarifikasi klaim Hinca Panjaitan bahwa Hinca Panjaitan menyusun mayoritas materi UU Pers.

⁵ Dalam banyak kasus, lembaga donor tidak sekedar memberikan dana bantuan, namun juga menjalankan agenda-agenda ekonomi politik tertentu, misalnya USAID yang terlibat dalam drafting UU Migas dengan kepentingan masuknya retailer-retailer BBM ke Indonesia. Cek Kompas..... Bandingkan dengan Perkins,

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, rumusan masalah yang bisa disampaikan adalah bagaimana pola-pola liberalisasi media yang terjadi di Indonesia. Ada dua tahap dalam proses ini yaitu semasa liberalisasi semasa Orde Baru masih berkuasa dan sesudahnya. Liberalisasi pada tahap pertama lebih banyak terjadi pada televisi, sedangkan liberalisasi kedua ditandai oleh momen penting pengesahan UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002. Ade Armando (2006) menyebutkan bahwa pada liberalisasi tahap pertama, proses utama yang terjadi adalah akomodasi Soeharto terhadap kehendak kapital kroni Soeharto untuk bermain pada wilayah penyiaran. Menurut saya, ini agak berbeda dengan liberalisasi pada tahap kedua. Pada tahap kedua, pola yang terjadi lebih rumit karena melibatkan pemain internasional, gerakan masyarakat sipil pro demokrasi, dan pebisnis. Konstelasi politiknya juga berbeda karena pemerintah era reformasi harus lebih banyak mengakomodasi aspirasi gerakan pro demokrasi. Pola inilah yang lebih banyak akan dibahas dalam penelitian ini.

Keterlibatan gerakan masyarakat sipil tidak bisa dianggap remeh karena berhubungan dengan aktor-aktor internasional seperti lembaga bantuan asing dan multilateral. Gerakan sipil dalam liberalisasi media secara historis terjadi sejak 1994 setelah Soeharto membredel tiga media. Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aktor-aktor memainkan perannya masing-masing dalam membentuk liberalisasi media. Sisi menariknya adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam proses liberalisasi ini karena ini yang membedakan dengan proses liberalisasi pada sektor lainnya. Selain itu, dari sisi ideologis juga menarik karena gerakan reformasi sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi kritis. Karena terbukti bahwa liberalisasi pada akhirnya justru membentuk dominasi privat pada ruang publik, akan menarik untuk mencermati bagaimana dinamika masyarakat sipil selanjutnya dalam merespon dominasi privat dan konvergensi kepemilikan media. Apakah gerakan sipil yang secara gemilang

John, *Confessions of an Economic Hitman*, Jakarta, Abdi Tandur, 2004. Perkins mengulas bagaimana di balik format bantuan *G to G*, bersemayam sebuah kekuatan manipulasi untuk menyiapkan infrastruktur investasi global. Indonesia pada era awal pemerintahan Orde Baru termasuk negara yang dikupas Perkins.

meruntuhkan Orde Baru akan bersikap sama ketika menghadapi dominasi pasar dalam ruang publik?

Penelitian ini memakai pendekatan ekonomi politik, yaitu studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kuasa yang membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi.⁶ Pendekatan ini dirasa tepat karena penelitian ini ingin melihat bagaimana peralihan kuasa negara ke kuasa modal telah terjadi dalam sejarah media Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tiga dimensi kekuasaan yaitu kekuatan masyarakat sipil, kekuatan sektor pasar, dan kekuatan badan publik. Penelitian ini ingin melihat bagaimana ketiga dimensi itu berdialektika dan membentuk struktur kebijakan dan ruang publik yang diciptakan media di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Melacak proses historis liberalisasi media dalam kurun waktu 1994 sampai 2011
- Menemukan lembaga-lembaga sosial yang diuntungkan dalam proses liberalisasi media

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

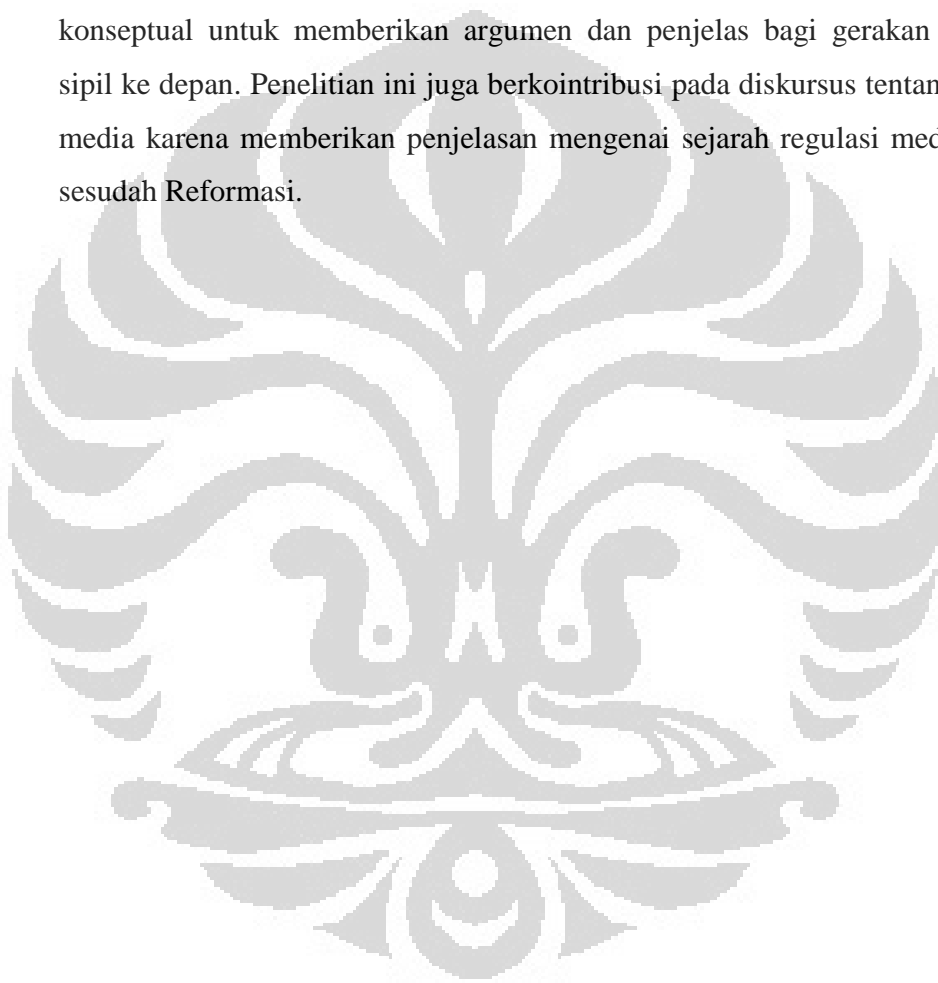
Penelitian ini berkontribusi secara teoritik pada pembacaan ekonomi politik kritis terhadap proses demokratisasi media di Indonesia. Kajian seperti ini masih terbilang agak jarang di tengah-tengah kajian isi media, *cultural studies*, maupun

⁶ Selengkapnya dalam Mosco, Vincent, *The Political Economy of Communication*, London, Sage Publication, 2009

studi efek media. Kajian tentang demokratisasi media juga tidak banyak dibahas oleh kalangan akademisi komunikasi.

1.4.2 Signifikansi Sosial

Penelitian ini berkontribusi pada gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokratisasi media. Kontribusi ini berada dalam lingkung teoritik dan konseptual untuk memberikan argumen dan penjelas bagi gerakan masyarakat sipil ke depan. Penelitian ini juga berkointribusi pada diskursus tentang kebijakan media karena memberikan penjelasan mengenai sejarah regulasi media terutama sesudah Reformasi.



BAB 2

TEORI-TEORI DEMOKRATISASI MEDIA

2.1 Media dalam Arus Kapitalisme Internasional

Pada bagian ini, akan disampaikan perspektif kritis mengenai relasi media massa dengan kapitalisme. Bagian ini akan menyampaikan pemikiran-pemikiran dari tradisi kritis terkait tema tersebut. Pada bagian ini, peneliti akan mengulas pemikiran dari mazhab kritis di antaranya Theodor Adorno, Antonio Gramsci, Herbert Schiller, Douglas Kellner, Noam Chomsky, Edward S. Herman, dan Robert McChesney. Untuk konteks Indonesia, akan dipaparkan pemikiran Dedy N. Hidayat tentang proses liberalisasi media pasca 1998.

Mewarisi logika berpikir materialisme historis dari Karl Marx, kelompok kritis berpikir dalam skema *base structure-super structure*. Corak produksi ekonomi material menentukan bangunan ideologis, kultural, dan intelektual masyarakat. Determinisme struktural berbasis ekonomi ini menjadi pegangan penting untuk memahami cara berpikir kelompok kritis.¹ Theodor Adorno mewarisi logika ini bersama koleganya di Frankfurt School seperti Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Juergen Habermas, dll.

Theodor Adorno terkenal dengan konsep industri kebudayaan (*cultural industry*) dimana produk-produk kebudayaan dan kesenian tidak lagi sekedar medium ekspresi manusia namun sudah menjadi komoditas. Dalam dunia aktual, mungkin istilah industri kebudayaan tidak terlalu banyak dianggap sebagai suatu hal yang ideologis karena hampir semua aktivitas kebudayaan saat ini susah sekali untuk dilepaskan dari konteks modal. Namun pada era 1940-an sampai 1950-an, tema itu masih relevan karena

¹ Determinisme ekonomi mendapat kritik dari kelompok partikularis yang menganggap determinisme ekonomi sebagai bentuk simplifikasi dalam melihat masalah sosial. Menurut kelompok ini, proses kebudayaan tidak berjalan selinier itu namun merupakan proses yang rumit yang melibatkan banyak aspek di luar ekonomi. Stuart Hall dan pemikir *cultural studies* adalah salah satu kritikus determinisme ekonomi. Hall membangun model *encoding-decoding* dalam proses produksi dan konsumsi kebudayaan.

merupakan awal dari perkembangan komodifikasi ekspresi simbolik karya seni oleh kekuatan kapital.

Konteks pemikiran normatif yang berkembang pada saat konsep industri kebudayaan adalah pertentangan mengenai budaya tinggi (*high culture*) dan budaya rendah (*low culture*) yang berkembang di kelompok *Frankfurt School* di antaranya oleh Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Adorno sendiri. Menurut Mudji Sutrisno (2006), pembedaan budaya tinggi dan budaya rendah mempunyai pengandaian ‘kualitas estetis’ yang meliputi penilaian tentang indah, yang baik (*bonum*) dan nilai.² Dalam kategorisasi itu pula, Adorno dan Horkheimer berpendapat bahwa komodifikasi ekspresi estetis oleh industri akan mendorong karya kesenian ke dalam kategori *low culture*. Dengan latar belakang komponis musik tradisi klasik, Adorno melihat bahwa kultur yang dihasilkan dalam *culture industry* bersifat manipulatif, tidak otentik, dan tidak memuaskan. Adanya standardisasi dalam kultur industrial membuat reaksi publik yang juga standar. Jiwa manusia dilemahkan menjadi konformis.³ Manusia tidak lagi otonom dan merupakan entitas individual, namun hanya merupakan anggota dari entitas kawanannya dimana selera dan pilihan-pilihan individualnya sudah tak berdaya lagi menghadapi struktur produksi kebudayaan yang sudah ditentukan oleh kehendak para produsen kebudayaan yang berorientasi kapitalistik.

Adorno dan Horkheimer menulis karya penting tentang kritik kebudayaan yaitu *The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception (1944)*. Garis besar dari ide dalam buku tersebut adalah bahwa masyarakat telah mengalami penipuan (*deception*) akibat dari struktur industri budaya yang berorientasi pada akumulasi modal sehingga otonomi estetika dikesampingkan. Sebuah karya seni seharusnya otonom dan merupakan hasil dari refleksi dan artikulasi humanistik pembuatnya. Namun dalam industri kebudayaan,

² Sutrisno, Mudji, et. al. *Cultural Studies, Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*, Penerbit Koekoesan, Depok, 2006

³ Sutrisno, Mudji, *Op. Cit.* halaman 11. Cara pandang semacam ini kemudian dikritik karena dianggap terlalu pesimis dan menganggap penonton tidak berdaya menghadapi terpaan yang ada. Baik *cultural studies* maupun penganut *the active audience paradigm*. Bandingkan dengan Tony Wilson, *Watching Television, Hermeneutics, Reception, and Popular Culture*, Polity Press, 1995

otonomi karya itu hilang karena kualitas sebuah karya ditentukan oleh nilai tambah yaitu sejauh mana karya tersebut mampu menghasilkan keuntungan.

Titik pentingnya adalah, walaupun perdagangan karya sudah terjadi semenjak karya itu dijual sebelum era kapitalisme kontemporer, namun pada saat itu otonomi karya itu masih ada. Pada masa kapitalisme kontemporer, kehendak 'selera pasar'lah yang menentukan corak estetis sebuah karya. Estetika karya seni dengan demikian ditentukan oleh kehendak kapital dalam rangka memupuk keuntungan. Publik telah ditipu (*deceived*) oleh mekanisme ini karena preferensi selera individual harus melebur dalam selera pasar. Industri budaya melahirkan produk-produk yang dirancang untuk dikonsumsi massa, dan untuk derajat yang luas menentukan corak pengkonsumsian, dan dimanufaktur sesuai dengan rencana tersebut. Konsumen dalam industri budaya bukanlah faktor primer, melainkan faktor sekunder. Konsumen bukanlah 'raja', bukan subjek melainkan objek -- mereka adalah objek kalkulasi, pelengkap dalam siklus industri.⁴

Yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah bagaimana media massa berperan dalam konteks industri kebudayaan dan kapitalisme. Herbert Irving Schiller (1974) melihat posisi media massa sebagai aparatus budaya-informasional yang ampuh untuk mereproduksi kebudayaan yang seturut dengan kehendak kapital. Media massa merupakan alat yang ampuh untuk membentuk, merawat, dan mereproduksi kebudayaan dan selera masyarakat. Media massa tidak memberikan pilihan-pilihan individual kepada penontonnya namun melakukan distribusi informasi yang bersifat massal karena aspek massal itu akan membangun selera yang mendukung aktivitas jual beli produk dalam kapitalisme. Akumulasi keuntungan mensyaratkan satu produk dibeli oleh banyak konsumen. Publik tidak merasa bahwa kesadaran (*consent*) mereka sedang direkayasa dan dibentuk preferensi estetikanya untuk melanggengkan kapitalisme. Efek lain dari situasi ini adalah adanya *cultural domination* karena hanya corak kebudayaan yang sesuai

⁴ Adorno, Theodor, dalam Armando, Ade, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

dengan kehendak kapital saja yang diakomodasi dan berkembang di media massa. Media massa tidak lagi mengakomodasi kepentingan kebudayaan di luar corak itu.

Kesadaran (*consent*) merupakan kata kunci penting untuk melihat rangkaian pemikiran dari intelektual berparadigma kritis terutama Schiller (1974), Antonio Gramsci (1991), Noam Chomsky & Edward S. Herman (2002), dan Douglas Kellner (1990).

Gramsci dalam skema hegemoninya membedakan dua jenis aparat perawatan ideologis yaitu apparatus koersif dan apparatus ideologis (*coersive apparatus-ideological apparatus*). Apparatus koersif menciptakan ketaatan publik lewat sarana kekerasan, dimana orang terdominasi oleh pihak yang berkuasa karena ancaman kekerasan. Apparatus ideologis bekerja pada wilayah intelektual dimana ketaatan manusia terjadi secara 'sukarela' karena kesadaran itu terbentuk secara moral dan intelektual (*intellectual and moral direction/intelletuale e morale direzione*⁵). Produksi konsepsi moral dan intelektual itu dilakukan oleh berbagai lembaga sosial seperti sekolah, universitas, lembaga agama, media massa, rumah sakit, dll. Hegemoni adalah situasi dimana orang dikuasai secara mental, moral, dan intelektual namun orang tidak sadar akan kekuasaan tersebut sehingga menjadi tindakan sukarela atas dasar kesepakatan. Menurut Gramsci, relasi sosial akan selalu berada dalam tegangan (*unstable equilibrium*) sehingga untuk menciptakan keseimbangan perlu dilakukan proyek intelektual menuju hegemoni.

Selama dipenjara oleh rejim militer Italia, Gramsci menulis catatan harian yang kemudian dirangkum dalam satu buku berjudul *Prison Notebooks* (1929-1933). Dalam karya penting ini Gramsci mengajukan proposisi radikal dalam konteks marxisme yaitu bahwa dominasi kekuasaan tidak melulu bersumber dari kepentingan ekonomi namun juga

⁵ Istilah *intelletuale e morale direzione* dipopulerkan oleh Joseph V. Femia. Dalam *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 1981

karena sumber-sumber kultural dan politis. Di sinilah aspek kesadaran menjadi tema sentral dalam pemikiran Gramsci.

Selain hegemoni, Gramsci juga membangun dua konsep penting yaitu blok historis dan blok solidaritas. Blok historis ditandai oleh hubungan dialektis di antara dimensi kehidupan kelas-kelas sosial yang sedemikian rupa sehingga saling mendukung di bawah hegemoni kelas borjuasi. Ciri khas adanya blok historis adalah keseimbangan fungsi tiga unsur yaitu unsur ekonomi, hubungan militer, dan politik. Unsur ekonomi meliputi dilektika antara alat-alat produksi dan hubungan produksi. Unsur hubungan meliputi penguasaan negara terhadap alat-alat represif untuk menundukkan perlawanan. Unsur politik meliputi keseluruhan kesadaran universal tidak hanya kesadaran sebagai pelaku ekonomi.

Blok solidaritas adalah rekomendasi Gramsci untuk melawan blok historis dengan cara menggalang sebanyak mungkin intelektual progresif. Tujuan akhirnya adalah pembebasan massa rakyat dari dominasi borjuasi. Gramsci membedakan dua jenis intelektual yaitu intelektual organik yaitu intelektual yang berada bersama massa dan intelektual tradisional yaitu intelektual yang menjadi bagian dari apparatus ideologis penguasa.

Cara pandang Gramsci terhadap media massa adalah bahwa media massa sebagai lembaga sosial bisa menjadi bagian dari apparatus ideologis penguasa dimana media massa merawat kepentingan penguasa, namun bisa juga menjadi bagian dari blok solidaritas menuju pembebasan dari dominasi borjuis. Sebagai lembaga sosial media massa memiliki peran kunci karena mampu melakukan reproduksi intelektual atas dasar ideologi kelas tertentu. Kebanyakan kritikus di Indonesia melihat media massa dalam fungsi hegemoni namun tidak banyak yang memosisikannya sebagai bagian dari proyek *counter-hegemony* menuju pembebasan massa rakyat.

Noam Chomsky dan Edward S. Herman terkenal dengan karya klasik mereka, *Manufacturing Consent* (1988, 2002). Buku ini pada intinya hendak mengatakan bahwa di negara dengan kualitas demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat sekalipun, bias kepentingan politik dalam media massa tetap saja bisa terjadi. Dengan memperkenalkan model propaganda (*propaganda model*), mereka berdua mengatakan bahwa media massa melayani dan memprogandakan kepentingan sosial yang membiayai dan mengontrol media massa. Bahkan kepentingan itu mampu mengatur agenda dan prinsip yang mendukung kepentingan mereka, termasuk di dalamnya dalam penyusunan kebijakan media. Faktor-faktor struktural seperti kepemilikan media dan sumber pembiayaan merupakan faktor penentu penting dalam membentuk berita dan tampilan akhir media.

Dalam *Manufacturing Consent* edisi revisi tahun 2002, Chomsky dan Herman memasukkan perkembangan baru media massa dalam ranah globalisasi. Dengan demikian model propaganda diperluas dari edisi sebelumnya yang berfokus pada aspek politik luar negeri Amerika menjadi lebih berfokus pada aspek globalisasi dengan determinasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Chomsky dan Herman dipengaruhi oleh Ben Bagdikian dalam *Media Monopoly* (1983) yang melihat bagaimana konvergensi kepemilikan media telah terjadi di Amerika Serikat menjadi sekitar lima puluh perusahaan media saja. Pada tahun 1990-an, konvergensi semakin mengerucut menjadi dua puluh tiga perusahaan saja. Mereka juga mengutip McChesney dalam kasus merebaknya ekspansi media terutama televisi secara global sebagai akibat dari menguatnya kapitalisme korporatis. Pada era 1990-an, gelombang globalisasi itu telah memosisikan hanya sembilan konglomerat media saja yaitu Disney, AOL, Time Warner, Viacom (pemilik CBS), News Corporation, Bertelsmann, General Electric (pemilik NBC), Sony, AT&T-Liberty Media, dan Vivendi Universal. Raksasa-raksasa itulah yang menguasai jaringan studio film dunia, jaringan televisi, perusahaan musik, saluran dan sistem kabel, majalah, stasiun TV utama, dan penerbitan buku.⁶

⁶ Edward S. Herman & Noam Chomsky, *Manufacturing Consent*, Pantheon Books, New York, 2002, halaman xiii

Memang peredaran media di wilayah global sudah lama terjadi pada industri film dan buku, namun hanya dalam dua puluh tahun terakhirlah sistem media global telah mampu memunculkan dampak pada sistem media, budaya, dan politik domestik nasional. Bahan bakar utama dari proses ini adalah globalisasi bisnis, pertumbuhan iklan internasional, dan perkembangan teknologi komunikasi yang mampu memfasilitasi komunikasi trans nasional. Secara ideologis, proses ini juga banyak dibantu oleh kebijakan luar negeri dan konsolidasi neoliberalisme. Amerika Serikat dan negara Barat lain telah memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan-perusahaan domestik mereka untuk melakukan ekspansi perluasan pasar global dimana IMF dan World Bank melakukan hal yang sama, dengan salah satunya memperbesar akses trans nasional pasar media massa global. Ideologi neoliberal menjadi alasan intelektual bagi berbagai kebijakan media yang membuka struktur kepemilikan penyiaran, kabel, dan sistem satelit bagi para investor swasta transnasional.⁷

Douglas Kellner (2003) melihat proses globalisasi ini telah membuat adanya kontradiksi dalam media massa dan ruang publik sebagai akibat dari perkembangan demokrasi pada satu sisi dan kapitalisme pada sisi yang lain. Aspek normatif dalam demokrasi telah “dikhianati” sendiri oleh kapitalisme yang dalam perkembangannya telah mencederai prinsip-prinsip normatif demokrasi. Prinsip *one vote one voice* dalam demokrasi tidak bisa dihadirkan dalam kapitalisme sehingga menciptakan masyarakat modern yang tetap terbelah ke dalam struktur ketidaksetaraan. Media massa merupakan contoh penting bagaimana kontradiksi antara demokrasi dan kapitalisme terjadi. Prinsip demokratis penyebaran informasi ternyata masih melahirkan korporasi media yang feodal dan elitis yang menciptakan organisasi media sendiri sebagai penguasa ekonomi yang potensial mencederai demokrasi. Inilah yang menurut Kellner telah menyebabkan kontradiksi internal dalam media massa dan ruang publik.⁸

⁷ Edward S. Herman & Noam Chomsky, *Op. Cit.* halaman xiv

⁸ Douglas Kellner, *Theorizing Globalization*, *Jurnal Sociological Theory*, 2003 Vol. 20, No.3

Secara lebih mendalam, Kellner memaparkan adanya keterjebakan dalam melihat globalisasi ke dalam determinisme tertentu. Yang ia petakan adalah determinisme teknologi dan determinisme ekonomi. Kellner tidak melihat globalisasi sebagai sekedar perluasan inovasi teknologi dan bahwa teknologi semata yang menjadi imperatif dalam globalisasi seperti yang dilihat pemikir postmodern Baudrillard (1993). Baudrillard melihat bahwa teknologi telah menjadi prinsip yang mengatur tatanan masyarakat. Konsep simulasi (*simulation*) menuju *simulacrum* menjelaskan hal ini. Pun juga, Kellner menolak adanya determinisme ekonomi yang melihat globalisasi semata sebagai perluasan pasar ekonomi domestik Barat ke seluruh dunia seperti yang dilihat Fukuyama (1992). Kellner melihat gejala dalam globalisasi dengan satu konsep *technocapitalism* yang menjelaskan sintesis antara inovasi teknologi dan kapitalisme sebagai motor utama globalisasi. Dengan neoliberalisme sebagai ideologi hegemonik, logika pasar telah menjadi panglima di atas kepentingan publik, dan bahwa negara telah menjadi subversi dari logika dan imperatif ekonomi. Konsep *technocapitalism* menunjuk adanya konfigurasi baru dalam masyarakat kapitalis dimana pengetahuan dan teknologi, komputerisasi, otomatisasi kerja, dan teknologi informasi beserta multimedia memainkan peran penting dalam proses produksi yang analog dengan fungsi tenaga kerja dan mesin pada awal kapitalisme. Proses ini memunculkan modus baru dalam organisasi sosial, bentuk budaya dan *life style*, konflik, dan modus perlawanan.⁹

Terkait bagaimana media memainkan peran dalam globalisasi, Edward S. Herman dan Robert McChesney memberi judul provokatif untuk buku karya mereka: *The Global Media, The New Missionaries of Corporate Capitalism* (1997). Media massa dipadankan dengan gerakan misionaris Kristen oleh Barat ke seluruh dunia untuk mengabarkan kekristenan sejak Abad Pertengahan. Dari judul itu juga cukup jelas bahwa menurut mereka, kapitalisme korporat merupakan kekuatan di balik merebaknya internasionalisasi media sejak 1980-an.

⁹ Bandingkan dengan Douglas Kellner, *Op. Cit.* Halaman 290.

Lalu apakah yang mereka sebut sebagai kapitalisme korporat itu? Herman dan McChesney memaknainya dalam nada yang sama terhadap kritik neoliberalisme. Menurut mereka, ideologi di balik itu adalah korporatisme global yang berakar pada neoliberalisme. Ada beberapa elemen korporatisme global yaitu, *pertama*, pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberi corak organisasi ekonomi dan kehidupan manusia. Kebebasan dimaknai sebagai hilangnya kontrol terhadap dinamika ekonomi. *Kedua*, intervensi pemerintah – termasuk subsidi - dianggap sebagai beban yang mengganggu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, korporatisme global percaya bahwa tujuan dari ekonomi dan keseluruhan kebijakan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable economic growth*). *Keempat*, dengan mengontrol inflasi, tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh indikator kuantitatif semacam GDP dan GNP. *Kelima*, adanya kepercayaan bahwa privatisasi akan memunculkan efisiensi ekonomi.¹⁰

Tesis utama buku ini adalah tentang peran media massa sebagai agen ideologi ekonomi neoliberal yang dimulai sejak era 1980-an. Media diposisikan dalam dua fungsi yaitu sebagai penopang budaya liberal global dan sebagai sumber pendapatan ekonomi itu sendiri. Era ini mereka sebut sebagai ekspansi media global yang tidak memiliki preseden sebelumnya (*unprecedented expansion for global media*) yang ditandai oleh meningkatnya angka ekspor produk-produk program media. Angka ekspor Ekspor Hollywood ke Eropa yang terdiri dari produk film, program TV, dan video naik 225% dari tahun 1984 ke 1988 dengan angka pertumbuhan per tahunan \$561 juta. Angka ekspor Hollywood ke seluruh dunia naik dua kali lipat dari 1987 ke 1991 menjadi \$ 2,2 milyar. Ekspor rekaman musik juga naik dua kali lipat dalam periode yang sama menjadi \$419. Total waktu yang dipakai untuk menonton televisi juga naik tiga kali lipat dari 1979 ke 1991.¹¹

¹⁰ Edward S. Herman dan Robert McChesney, *The Global Media, The New Missionaries of Corporate Capitalism*, Cassel, London & Washington, 1997, hal. 35-37.

¹¹ Edward S. Herman dan Robert McChesney, *Op. Cit.* hal. 39.

Era 1980-an akhir juga ditandai oleh lahirnya pasar media global dimana perusahaan-perusahaan besar tumbuh subur menjadi perusahaan transnasional. News Corporation misalnya, menolak memakai identitas nasional dengan membuat *positioning baru* sebagai perusahaan transnasional. Meskipun tetap didominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, awal 1990-an telah terjadi difusi kepemilikan perusahaan media dan teknologi media seperti Sony dan Matsushita yang membeli perusahaan-perusahaan Amerika. Sony tercatat merupakan pemilik CBS Records dan Columbia Pictures.

Di balik proses globalisasi produk itu, juga terjadi ekspansi pasar iklan ke seluruh dunia. Pertumbuhan media, program media, dan iklan berjalan seiring dalam proses perluasan pasar dunia dengan arus utama dari negara maju ke negara berkembang. McChesney mencatat bahwa iklan merupakan proses sentral di balik perluasan program media dan kepemilikan media. Pertumbuhan bisnis penyiaran dan iklan merupakan bagian integral dari perluasan pasar global. Pada tahun 1995, empat puluh perusahaan iklan terbesar di dunia yang berada di Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Serikat membelanjakan 47 miliar US\$ dimana 26 miliar US\$ dibelanjakan di luar Amerika Serikat. Jumlah ini meningkat 20% dari belanja iklan tahun 1994. Pada tahun 1970, persentase iklan Amerika adalah 60% sedangkan pada tahun 1995 47%. Artinya, telah terjadi perluasan kue iklan di luar belanja iklan Amerika Serikat. McCann-Erickson memperkirakan bahwa iklan global akan naik dari 335 miliar US\$ pada tahun 1995 menjadi 2 triliun US\$ pada tahun 2020. Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur merupakan kawasan pertumbuhan belanja iklan, sementara Amerika Utara akan mengalami stagnansi. Kebanyakan pertumbuhan itu mengandalkan media televisi, sementara koran dan majalah akan mengalami penurunan persentase.¹²

Proses globalisasi media di Indonesia berlangsung dengan cara yang unik. Secara ekonomi politik, integrasi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global tidak disertai oleh penguatan demokrasi, namun justru menciptakan otoritarianisme Orde Baru. Pola yang

¹² McChesney, Robert, *Op. Cit*, 1997, halaman 56-57

sama juga ditemukan di Amerika Latin, misalnya Chile di bawah Pinochet. Dalam sistem korporatisme global, demokrasi merupakan keniscayaan karena akan memperlancar arus informasi lewat media. Penguatan otoritarianisme di Indonesia adalah salah satu hasil dari pendekatan politik pembangunan yang mengutamakan stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai sarana untuk memperkuat otoritarianisme.

Dalam sistem otoriter, media massa tentu saja diatur agar sesuai dengan kehendak politik penguasa. Yang dilakukan Orde Baru adalah menguasai saluran informasi televisi secara total lewat TVRI; pembentukan PWI sebagai wadah tunggal wartawan untuk menciptakan ketaatan; dan ancaman breidel jika isi media tidak sesuai harapan politik.¹³

Akan tetapi, terdapat anomali dalam logika hegemonik Orde Baru ketika muncul Keputusan Menteri Penerangan pada Oktober 1987 mengenai ijin pendirian televisi swasta. Tidak sewajarnya bahwa dalam struktur politik yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah, dibiarkan adanya sumber informasi yang dikendalikan swasta yang potensial berada di luar kontrol kekuasaan dan mudah beririsan dengan arus informasi internasional yang sangat mungkin bersebarangan dengan rejim Orde Baru. Alasan diberikan lewat Keputusan Menteri Penerangan No. 84/1992 pasal (c) yang berbunyi *untuk mengimbangi siaran televisi asing, perlulah membuka kesempatan bagi siaran yang dikelola oleh televisi swasta yang akan menayangkan acara terutama di bidang informasi mengenai pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional*.¹⁴

¹³ Selain berwajah otoriter, Orde Baru juga menampilkan kekuasaan ekonomi yang kapitalis oligarkis atau dalam bahasa Yoshihara Kunio (1990) disebut sebagai kapitalisme semu (*erzats capitalism*). Ini adalah jenis penguasaan bisnis dengan kepemilikan yang berdasar atas kedekatan kroni politik. Jenis kapitalisme semacam ini pulalah yang mengawali privatisasi televisi semasa Orde Baru dengan pendirian televisi swasta yang dimiliki oleh Keluarga Cendana. Menariknya kasus Indonesia adalah bahwa privatisasi informasi dilakukan oleh rejim yang otoriter. Pada akhirnya yang terjadi adalah bumerang. Televisi milik Keluarga Cendana pada akhirnya tidak sepenuhnya mendukung otoritarianisme pada era Reformasi. Pembukaan televisi swasta juga berarti masuknya Indonesia ke dalam sistem pasar program televisi global dengan lebih luas.

¹⁴ Sudibyo, Agus, *Ekonomi Politik Penyiaran*, LKiS Yogyakarta, 2004, halaman 293

Ada tiga catatan terhadap keputusan pendirian televisi swasta itu. *Pertama*, penguasa masih optimis bahwa pendirian televisi swasta masih bisa disertai oleh kontrol terhadap informasi televisi karena pemilik televisi masih berada dalam jaring-jaring bisnis kronial Cendana. Televisi swasta dimiliki anak-anak, kroni, dan kerabat Soeharto. Kepemilikan televisi waktu itu ada di tangan Bimantara milik Bambang Trihatmojo; Sudwikatmono memiliki mayoritas saham SCTV; Siti Hardiyanti Rukmana mempunyai TPI. AN TV dimiliki Aburizal Bakrie, anak emas Soeharto; dan Liem Sioe Liong memiliki Indosiar.¹⁵ Bisnis penyiaran didisain untuk tetap berada dalam kanopi kontrol politik Soeharto walaupun desakan sistem ekonomi global sudah terjadi.

Kedua, watak kapitalisme semu ingin memperluas pengaruhnya pada bisnis informasi. Sebagai sebuah industri, penyiaran swasta merupakan ceruk besar bagi pendapatan iklan. Hal ini rupanya dilirik oleh kroni Soeharto. Akan tetapi, motivasi keuntungan ekonomi ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengancam kekuasaan politik Orde Baru. Caranya dengan mengatur struktur kepemilikan agar tetap berada dalam *remote control* Soeharto. Ekspansi ekonomi didisain tetap berada dalam lingkaran kekuasaan politik agar tidak mengancam kekuasaan politik.

Ketiga, rejim Orde Baru sedang berada dalam tekanan ekonomi politik global lewat berbagai desakan deregulasi. Catatan ketiga ini muncul karena posisi Indonesia sedang melemah secara ekonomi akibat selesainya era *oil bonanza* berupa anjloknya harga minyak dunia yang sebelumnya mampu memasok banyak devisa ke Indonesia yang diikuti krisis moneter berupa turunnya nilai rupiah. Hal ini penting untuk dicatat karena pada saat yang bersamaan negara-negara maju telah mengembangkan bisnis informasi karena teknologi transmisi komunikasi nasional sudah dikembangkan.

Corak liberalisasi televisi swasta di Indonesia menjadi berbeda dengan corak liberalisasi di sektor lain. Ini karena irisan kepentingan politik sangat besar menghadapi tekanan

¹⁵ Macintyre, Andrew (1994) dalam Sudibyo, Agus, *Op. Cit.* halaman 295

ekonomi global. Liberalisasi televisi kita adalah hasil dari kombinasi dari watak otoritarianisme, kapitalisme semu, dan tekanan ekonomi global ke dalam tatanan ekonomi nasional. Istilah yang tepat untuk menjelaskan proses ini adalah liberalisasi patrimonial. Soeharto terlalu percaya diri dengan membuka keran liberalisasi televisi karena dia merasa bahwa jaring-jaring kontrolnya masih bisa dikendalikan lewat struktur kepemilikan yang ada. Akan tetapi sejarah membuktikan bahwa televisi swasta mampu menggeser peran TVRI sebagai sumber informasi dan apparatus ideologis Orde Baru sehingga legitimasi politik Orde Baru menurun sebagai akibat dari informasi yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Televisi swasta juga bisa semakin meraksasa sebagai *entitas economicus*.

Salah satu paparan penting tentang liberalisasi media di Indonesia datang dari Dedy N. Hidayat (2003). Yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran struktur kediktatoran politik semasa Orde Baru menjadi kediktatoran pasar sejak keruntuhan Orde Baru. Ini dimulai sendiri dari sikap ganda rejim Orde Baru dalam menghadapi liberalisasi. Di dalam bangunan ekonomi politik Orde Baru terjadi kontradiksi internal dimana pada satu sisi mereka mengakomodasi liberalisasi ekonomi namun pada akhirnya akomodasi itu justru menekan legitimasi politik mereka walaupun liberalisasi itu sudah dibatasi ke dalam kapitalisme kroni Orde Baru. Liberalisasi Orde Baru sebenarnya merupakan kombinasi antara penguatan kontrol politik pada level domestik, namun disertai oleh integrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalistik global. Integrasi ini pada akhirnya tidak mampu dikelola oleh rejim otoriter Orde Baru akibat dari menguatnya arus informasi dalam lingkungan ekonomi global. Liberalisasi yang terjadi pada akhirnya tidak hanya berdimensi ekonomi semata namun juga merambah sisi-sisi non-ekonomi seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul.

Integrasi ekonomi ke dalam sistem global memang telah mampu memperkuat legitimasi politik Orde Baru sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang memperkuat citra publik terhadap penguasa. Tetapi pada sisi yang lain, integrasi tersebut juga telah membuat rejim itu sendiri rentan terhadap berbagai desakan yang muncul dari rejim

transnasional. Kapitalisme kronial Orde Baru semakin tidak terlindungi dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang jelas-jelas mengukung ideologi neoliberal.¹⁶ Lebih lanjut mengutip Wood dalam MacEwan dan Tabb (1989), Hidayat menjelaskan bahwa IMF dan World Bank menjalankan...*built-in systemic mechanism of economic liberalization, opposing not only socialism but national capitalism as well, in favor of the progressive extension of international market force*. Dengan demikian, walaupun sebuah negara sudah jelas-jelas menganut kapitalisme, namun jika masih dalam konteks ekonomi protektif nasionalistis, hal itu tetap akan dilawan oleh liberalisme ekonomi.

Liberalisasi ekonomi di Indonesia juga merupakan jalan pembuka penting bagi proses demokratisasi. Kejatuhan Orde Baru membuat semakin mudahnya tekanan-tekanan liberalisasi global ke Indonesia dalam koridor demokratisasi. Dari sisi kebijakan, Pemerintahan Habibie memroduksi banyak kebijakan yang sangat mengakomodasi tuntutan liberalisasi global, termasuk di dalamnya adalah UU Pers No. 40/1999. Segera sesudah itu, media tumbuh mencapai angka ribuan. Menurut Sinansari Ecip (2000), jumlah media cetak secara nasional adalah 1.800. Sekitar 30 asosiasi jurnalis juga lahir di luar “wadah tunggal” PWI yang dulu direstui Orde Baru. Ini yang mendorong posisi Indonesia sebagai negara dengan pers paling bebas se-Asia pada tahun 2001 menurut index *Reporters sans Frontieres*, Paris. Jumlah itu merupakan capaian paling bagus Indonesia karena tahun-tahun berikutnya selalu menurun seperti tampak dalam grafik berikut.

¹⁶ Hidayat, Dedy N., dalam Gazali, Effendi *et al*, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*, Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta, 2003: 2.

Tabel 1
Indeks Kebebasan Pers Indonesia

Tahun	Posisi
2001	Paling bebas se-Asia
2002	57 dari 139 negara
2003	111 dari of 166 negara
2004	117 dari 167 negara
2005	105 dari 167 negara
2006	103 dari of 168 negara
2007	100 out of 169 countries
2008	111 dari 173 negara
2009	100 dari 175 negara
2010	117 dari 178 negara
2011	146 dari 179 negara

Sumber: diolah dari index tahunan *Reporters sans Frontieres* www.en.rsf.org

Liberalisasi telah menggeser karakter lingkungan makro media dari *state authoritarian* menjadi *market aothoritarian*. Regulasi media yang muncul pun bergeser dari regulasi berbasis negara (*state regulation*) ke regulasi berbasis pasar (*market regulation*). Lepasnya kontrol negara terhadap media massa dalam sistem politik otoriter tidak serta-merta memunculkan media yang mampu berpihak kepada kepentingan publik karena situasi dalam regulasi pasar memunculkan bentuk-bentuk kontrol baru terhadap media atas dasar kuasa pasar. Kerentanan media terhadap tekanan eksternal tidak lagi bersifat politis namun ekonomis.

Pergeseran dari dominasi yang berbasis pada *ideological state apparatus* ke dominasi yang berbasis pada fundamentalisme pasar telah memunculkan beberapa potensi masalah

bagi industri media di Indonesia. Dedy Hidayat (2003) mencatat paling tidak ada lima dampak. *Pertama*, semakin menguatnya *the logic of accumulation and exclusion* (Kellner, 1990) dalam industri media. Penguatan dominasi ekonomi akan memperkuat peran media sebagai salah satu sumber akumulasi keuntungan dalam sistem kapitalistik dengan kompetisi penuh. Industri media yang tidak mampu bekerja dalam koridor akumulasi kapital akan disingkirkan (*excluded*). Selain itu, logika ini juga akan menyingkirkan bentuk-bentuk industri media yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Isu-isu yang muncul di media akan didikte menurut selera pasar.

Kedua, akses terhadap produksi media massa akan terbatas pada kelompok yang memiliki kapital ekonomi maupun kapital lain yang kuat. Hanya mereka yang memiliki sumber daya kuat akan mampu masuk ke dalam skema pemberitaan media. Fenomena pengusaha-pengusaha yang melakukan *blocking time* atau politisi yang bisa tampil di media merupakan contoh dari situasi ini. Yang terancam dari situasi ini adalah keragaman informasi yang menjadi syarat penting dari kehidupan bersama (*shared-life*) yang sehat.

Ketiga, lembaga-lembaga penyiaran yang tidak mampu mematuhi konstruksi aturan rejim kapital akan terdepak keluar dari lingkaran industri penyiaran. Padahal media di dalam lingkaran itu mungkin saja berupa media yang mendorong kepentingan publik. Di sinilah celah dari kecenderungan konglomerasi media, konsentrasi pasar, dan pemusatan kepemilikan (*concentration of ownership*) berawal.

Keempat, liberalisasi pasar media akan membuat distingsi kelas sosial yang makin tajam. Gejala ini terjadi di sejarah media Eropa dimana tampilan media akan menajamkan perbedaan kelas yang ada. Ketimpangan dalam orientasi isi media dianggap sebagai kewajaran sebagai bagian dari segmentasi pasar dalam iklim liberal. Kebutuhan informasi kelas atas akan dilayani oleh produk *quality media* sedangkan kebutuhan kelas bawah dilayani dengan *yellow paper* atau *yellow programs* yang dangkal, konflikual, berorientasi pada pesona ragawi, mistis, dan lain lain.

Kelima, liberalisasi media akan meletakkan posisi jurnalis semata sebagai salah satu dari faktor produksi dalam industri media. Hak-hak jurnalis sebagai pekerja menjadi rentan jika terjadi perubahan dalam manajemen media. Apabila bisnis tidak bagus, jurnalis bisa dikurangi gajinya atau diputus hubungan kerja. Independensi individual jurnalis juga terancam karena harus mengakomodasi kehendak pasar dari lembaga media. Hidayat (2003) menyitir ungkapan *one-dimensional man* dari Herbert Marcuse untuk menjelaskan situasi jurnalis dalam sistem media yang liberal.

2.2 Kapitalisme Semu dan Perkembangan Penyiaran di Indonesia

Seperti sudah dijelaskan, dinamika ekonomi politik terkait liberalisasi, kapitalisme, dan demokrasi bersifat partikular di banyak negara, penting untuk melihat dinamika di Indonesia secara lebih mendalam. Tema kapitalisme semu merupakan tema yang penting untuk disampaikan karena menjelaskan dinamika ekonomi politik partikular di Indonesia. Penting pula hal ini disampaikan sebagai latar ekonomi politik dari kelahiran penyiaran swasta di Indonesia.

Kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) adalah konsep yang dikembangkan oleh Yoshihara Kunio dalam bukunya *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (1990). Kunio melihat perkembangan kapitalisme yang unik di Asia Tenggara karena melibatkan hubungan yang unik antara pengusaha dan penguasa politik. Indonesia juga menjadi bahasan riset Kunio yang melihat bagaimana bisnis tumbuh dalam pengaruh lingkaran kekuasaan Orde Baru saat itu.

Ada dua thesis pokok kapitalisme semu menurut Kunio. *Pertama*, Kunio melihat bahwa campur tangan pemerintah dalam perkembangan bisnis di Asia Tenggara telah mematikan dinamika kapitalisme dalam aspek persaingan bebas. Intervensi kekuasaan telah membuat persaingan bebas tidak berlangsung karena keputusan-keputusan bisnis dipengaruhi oleh kepentingan politik. Selain itu, situasi ini juga memunculkan pelaku pemburu rente (*rent seeker*) di kalangan birokrasi. Kunio melihat secara khusus

pengusaha keturunan Cina yang mendapat fasilitas-fasilitas khusus karena hubungan istimewa dengan penguasa politik. *Kedua*, perkembangan kapitalisme di Asia Tenggara tidak disertai oleh perkembangan teknologi yang memadai. Kuno membandingkan situasi ini dengan Jepang dimana keahlian teknologi telah menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain seperti perbankan atau properti. Kapitalisme semu berkembang lebih banyak pada sektor jasa dan komprador industri asing yang bergerak pada agen produksi manufaktur perusahaan luar negeri.

Arief Budiman (1990) dalam kata pengantar buku tersebut berpendapat bahwa tesis kapitalisme semu Kuno mengandaikan adanya kapitalisme yang tidak semu (sejati). Sejarah kapitalisme di Inggris dianggap sebagai sejarah kapitalisme yang sejati persis karena sejarahnya bertolak belakang dengan yang terjadi di Asia Tenggara. *Pertama* karena sejarah kapitalisme di Inggris disertai oleh gerakan liberalisasi dimana para pengusaha Inggris berjuang mati-matian dalam membela prinsip persaingan bebas dengan menolak campur tangan pemerintah. Borjuis-borjuis Inggris sangat berperan dalam mengembangkan sistem politik demokrasi. *Kedua*, perkembangan kapitalisme di Inggris didasari oleh Revolusi Industri yang membuat penguasaan teknologi sangat kuat dan sanggup menjadi pondasi penting bagi perkembangan ekonomi kapitalis di Inggris. Pada tahun 1860, Inggris meraih angka tertinggi 100 dalam indeks kekuatan industri di Eropa, sementara Perancis di posisi kedua hanya menaruh nilai 22-27 dan Jerman di posisi ketiga hanya meraih nilai 13-16.¹⁷ Dalam hubungan luar negeri, Inggris juga menjadi motor utama bagi perluasan perdagangan bebas karena hal itu menguntungkan ekonomi Inggris.

Kapitalisme semu perlu disampaikan sebagai konteks ekonomi politik yang berpengaruh pada industri penyiaran di Indonesia meskipun kapitalisme semu tidak terlalu berdampak pada industri pers cetak. Namun, baik industri penyiaran maupun cetak mengalami perkembangan yang dinamis sejak kebijakan deregulasi yang dimulai sejak tahun 1980-

¹⁷ Bairoch, Paul, *Commerce exterieur en development economique de l'Europe au XIXe siècle*, Paris, 1976. (Dikutip dari Budiman, Arief, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. xviii)

an. Kelahiran televisi swasta di Indonesia tidak terjadi sesudah Orde Baru runtuh namun pada tahun 1987 ketika Soeharto masih sangat kuat. Kelahiran RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia lewat SK Menpen 20 Oktober 1987 jelas sekali ada dalam konteks kapitalisme semu di Indonesia. Pemegang saham RCTI adalah Siti Hardiyati Rukmana lewat perusahaan Rajawali sebesar 65% dan Bimantara milik Bambang Trihatmojo sebesar 35%.

Dedy N. Hidayat (2005) mencatat adanya dialektika yang menarik dalam bisnis penyiaran Keluarga Cendana dimana kepentingan perluasan bisnis Cendana pada satu sisi, telah menjadi bumerang politik bagi Orde Baru pada sisi yang lain. Seperti sudah disinggung sebelumnya, redaksi televisi swasta merupakan media cukup penting yang mendukung gerakan penumbangan Orde Baru tahun 1998. Swastanisasi penyiaran yang terjadi di Indonesia direncanakan oleh Keluarga Cendana menjadi sedemikian rupa sehingga perkembangan bisnis penyiaran tetap ada dalam genggaman kroni Cendana. Kepercayaan diri Soeharto dalam menguasai bisnis penyiaran ini terbukti gagal ketika redaksi televisi swasta tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh Soeharto. Metafora yang dipakai Dedy N. Hidayat (2005) adalah istana dan pasar.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma kritis. Paradigma kritis berakar dari filsafat kritis dan Teori Kritis marxian. Pada bagian ini akan diulas sejarah pendekatan kritis dan bagaimana relevansinya bagi riset ini.

3.1.1 Filsafat Kritis Hingga Teori Kritis

Untuk memahami paradigm kritis, perlu merunut perkembangan filsafat kritis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant yang dilanjutkan oleh Hegel dan Teori Kritis sejak Marx sampai para pengikut neomarxisme.

Untuk membahas filsafat kritis (kritisisme), perlu diawali dengan Immanuel Kant. Menurut Horkheimer dan kawan-kawan, Kant bisa disebut sebagai filsuf kritik yang pertama.¹ Terobosan Kant adalah bahwa dia tidak berfokus pada substansi dalam konteks produksi pengetahuan. Berfokus pada substansi pengetahuan akan menggiring filsuf pada produksi pengetahuan menurut mereka sendiri. Pertentangan dengan demikian akan selalu terjadi karena para filsuf akan selalu mempertahankan kebenaran menurut versi masing-masing.

Ketimbang berfokus pada substansi, Kant lebih berfokus pada masalah syarat ilmu pengetahuan. Bila syarat-syarat pengetahuan itu ditegakkan, maka manusia tidak akan terjerumus dalam kekacauan kebenaran.² Menurut Kant, obyek itu selalu bersifat ada pada dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa kita ketahui (*das Ding an sich*) dan tidak akan berubah bagaimanapun manusia berpikir mengenai

¹ Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983, hal. 30

² *Ibid*, hal. 30

obyek itu. Karena obyek bersifat permanen, maka Kant memfokuskan pemikirannya pada subyek. Dengan berfokus pada subyek, maka akal budi manusia itu sendirilah yang harus menilai dirinya sendiri dalam memproduksi pengetahuan. Dalam keterbatasannya, akal budi harus menilai kemampuannya dalam menilai sesuatu. Seperangkat syarat-syarat kemudian dibuat untuk menilai produksi pengetahuan berdasarkan akal budi manusia. Syarat-syarat pengetahuan itu oleh Kant dinamakan kategori apriori.

Kant menyebut filsafatnya sebagai filsafat kritis karena berpaling dari persoalan obyek – seperti banyak dilakukan oleh filsuf sebelumnya – ke persoalan subyek. Kategori apriori yang diciptakan oleh subyeklah yang menentukan pengetahuan mengenai sesuatu, dan bukan isi obyektifnya.

Sumbangan terbesar Kant ada pada pemikiran bahwa manusia bersifat otonom dalam memperoleh pengetahuan. Upaya keras yang berfokus pada obyek tidak akan menghasilkan pengetahuan yang realistis karena obyek selalu tidak pernah bisa dipahami manusia. Otonomi subyek Kant inilah yang dihargai oleh Sekolah Frankfurt (*die Frankfurter Schule*). Sekolah Frankfurt menekankan pentingnya pemikiran bahwa segala sesuatu merupakan produk dari pengetahuan manusia yang selalu bersifat subyektif. Karena semuanya ditentukan oleh keaktifan dan kualitas pemikiran manusia sendiri, maka manusia tidak akan pernah memahami alam semesta sebagai semata-mata alamiah, tetapi akan selalu bersifat kultural, yaitu alam yang sudah mengalami proses rasionalisasi manusia.³ Pengetahuan tentang alam semesta adalah sebatas yang mampu ditangkap oleh akal budi manusia.

Meskipun menghargai pemikiran Kant, Sekolah Frankfurt tetap mengkritik Kant. Kritik Sekolah Frankfurt terhadap Kant adalah pada aspek historis.⁴ Kant melihat

³ Bandingkan, *ibid*, hal. 31

⁴ Historisisme merupakan ciri penting dalam memahami filsafat yang berbasis pada Marx. Pengaruh historisisme masih kuat pada Sekolah Frankfurt. Historisisme merupakan corak pemikiran yang tampak pada filsafat Plato, Hegel, dan Marx. Historisisme kemudian mendapat tentangan keras dari Karl Popper dengan menyebut Plato, Hegel, dan Marx sebagai “tiga nabi palsu”. Kritik utama Popper ada pada aspek “ramalan” dimana sejarah sudah ditentukan

bahwa produksi pengetahuan manusia bersifat absolut dalam arti bahwa proses itu tidak dipengaruhi oleh konteks sejarah. Pengetahuan dianggap tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu. Karena murni berfokus pada akal budi manusia, pengetahuan menurut Kant bersifat steril dan mengawang.

Sekolah Frankfurt kemudian berpendapat bahwa walaupun ada otonomi akal budi manusia dalam memperoleh pengetahuan, tetapi pengetahuan akan selalu terikat pada konteks historis dimana pengetahuan itu didapat. Dengan menerobos ke hal-hal di luar akal budi manusia, isi pengetahuan manusia akan diperkaya karena sesuatu tidak sekedar menjadi obyek yang semata-mata ada pada dirinya sendiri. Kant memberikan sumbangan penting dalam kritik pengetahuan tapi tidak dianggap mencukupi bagi kebutuhan Teori Kritis Sekolah Frankfurt pada aspek aktivisme subyektif manusia dalam memperoleh pengetahuan.

Kekurangan Kant itu kemudian direvisi oleh Hegel. Hegel berpendapat bahwa walaupun Kant telah berhasil menemukan otonomi manusia, pengetahuan manusia tetap tidak akan mampu menemukan obyektivitas karena konsep *das Ding an sich* bersikukuh bahwa benda akan selalu ada pada dirinya sendiri dan tidak pernah bisa dipahami pengetahuan manusia. Menurut Hegel, *das Ding an sich* itu tidak pernah ada karena otonomi akal budi manusia telah sempurna pada dirinya sendiri. Akal budi harus dan dapat merealisasikan dirinya sendiri tanpa halangan apapun. Akal budi manusia bersifat sempurna karena merupakan penjelmaan dari Roh Absolut. Akal budi manusia akan mencapai kesempurnaan melalui dialektika. Inilah yang kemudian diadopsi oleh Sekolah Frankfurt. Berpikir kritis berarti berpikir secara dialektis.

Dialektika mengajarkan beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah totalitas. Totalitas berarti bahwa suatu keseluruhan terdiri atas unsur-unsur yang saling bernegasi, berkontradiksi, dan bermediasi. Ini pula yang terjadi dalam hukum

sebelum sejarah itu sendiri terjadi, misalnya tampak dalam hukum perkembangan sejarah masyarakat Marx dimana masyarakat komunis dianggap sebagai akhir sejarah. Selengkapnya lihat dalam Popper, Karl, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

perkembangan masyarakat. Kedua, seluruh proses dialektis merupakan realitas yang terus-menerus berubah (*working reality*). Kontradiksi, negasi, dan mediasi secara menyeluruh ada dalam realitas itu sendiri. Ketiga, berpikir dialektis berarti berpikir dalam konteks empiris-historis. Keempat, berpikir dialektis berarti berpikir dalam kerangka teori dan praksis.⁵

Sekolah Frankfurt sangat dipengaruhi oleh Hegel sehingga Martin Jay menyebut bahwa Sekolah Frankfurt merupakan kebangkitan dari Kaum Hegelian Kiri abad ini.⁶ Meski demikian, Sekolah Frankfurt tetap mengkritik Hegel karena dianggap masih kurang memadai untuk Teori Kritis. Horkheimer mengkritisi Hegel dari sisi belum terjadinya rekonsiliasi dalam kenyataan. Rekonsiliasi dalam pengertian hanya dipahami dalam pemikiran saja namun belum menjadi realitas itu sendiri. Horkheimer menyebutnya sebagai transfiguratif yaitu mengatasi kenyataan namun hanya dalam angan-angan saja.⁷ Dalam faktanya, penindasan dalam masyarakat tetap saja terjadi. Ini yang menjadi tantangan utama praksis.

Sekolah Frankfurt kemudian belajar dari Marx untuk mengatasi kebuntuan idealisme Hegel. Marx masih menggunakan logika dialektika Hegel namun menggeser dari dialektika ideal ke dialektika material. Dialektika material dipakai untuk mengupayakan bahwa rekonsiliasi antara realitas dan kesadaran hanya akan benar-benar terjadi lewat praksis. Filsafat Marx bertujuan utama membangun kesadaran untuk mengubah realitas. Sekolah Frankfurt memakai kerangka pikir Marx tapi dengan kesadaran baru bahwa primat ekonomi tidak berlaku mutlak karena kapitalisme sudah bergeser dari kapitalisme liberal ke kapitalisme monopolis pasca *Great Depression* di Eropa. Perubahan sosial tidak melulu diakibatkan dari primat ekonomi namun dari lembaga-lembaga kultural dan akibat dari kelembagaan itu terhadap kepribadian individual.

⁶ Kelompok Hegelian Kiri terdiri para pemikir pengikut Hegel namun juga merevisi habis-habisan konsep Roh Absolut dan dialektika ideal dalam filsafat Hegel. Mereka ini misalnya Feuerbach, Heidegger, dan Marx. Selengkapnya dalam Jay, Martin, *The Dialectical Imagination, A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research*, London: Heinemann Educational Books, 1973

⁷ Sindhunata, *op.cit.* hal. 39

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa perbedaan Teori Kritis dengan filsafat kritis bersifat gradual revisionis. Gradual berarti bahwa masih ada warisan-warisan pemikiran sejak Kant. Revisionis berarti bahwa selalu ada revisi terhadap pemikiran yang ada untuk memenuhi kebutuhan Teori Kritis sejak pemikiran Kant, Hegel, dan Marx.

3.1.2 Paradigma Kritis dalam Penelitian Sosial

Paradigma kritis dalam ilmu sosial mendefinisikan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha untuk mengungkap *the real structure* di balik ilusi, *false needs (false Bewustsein)*, yang ditampakkan dunia materi dengan tujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia.⁸ Cara berpikir ini berasal dari konsep Marx tentang alienasi dimana kesadaran palsu bukan merupakan realitas yang sejati namun hanya merupakan epifenomena dari struktur ideologis yang sebenarnya. Paradigma kritis berorientasi membuka selubung ideologis di balik realitas yang tampak untuk menemukan struktur penindasan dalam realitas sejati yang terungkap. Penindasan dan ketimpangan akan ditemukan sesudah proses penemuan realitas sejati di balik realitas semu. Realitas dipahami sebagai hasil dari proses tarik-menarik kepentingan dalam masyarakat.

Untuk memahami paradigma kritis, ada empat asumsi yang bisa dipakai yaitu asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis:

- Secara ontologis, paradigma kritis bersifat realis historis yaitu bahwa realitas yang diamati merupakan realitas semu yang terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik.
- Secara epistemologis, paradigma kritis bersifat subjektif transaksional dimana hubungan peneliti dan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-

⁸ Hidayat, Dedy N. 2002 (hal.3)

nilai tertentu. Pemahaman tentang realitas merupakan hasil dari temuan yang dimediasi oleh nilai tertentu.

- Secara aksiologis, paradigma kritis menempatkan peneliti sebagai aktivis. Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penelitian. Peneliti menempatkan diri sebagai agen perubahan sosial yang advokatif. Tujuan penelitian adalah kritik terhadap realitas sosial demi menciptakan transformasi sosial.
- Secara metodologis, paradigma kritis bersifat partisipatoris yaitu mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multi level dimana peneliti merupakan agen dari proses partisipatif transformasi sosial.⁹

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik. James A. Caporaso dan David P. Levine (2008) membagi tiga jenis pendekatan ekonomi politik yaitu pendekatan klasik (dengan variasi pendekatan neoklasik), pendekatan marxis, dan pendekatan keadilan sosial. Mereka membagi tiga jenis pendekatan ekonomi politik itu dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu sifat dan tujuan dari kepentingan pribadi, makna dan jangkauan dari kebebasan manusia, sifat kebebasan manusia yang terkandung dalam kontrak pertukaran, makna dan signifikansi dari kehidupan publik, dan jenis ikatan yang menyatukan manusia ke dalam kelompok-kelompok.¹⁰

Pendekatan klasik sempat mendominasi teori ekonomi politik yang dirintis oleh Adam Smith pada abad ke-18 dan David Ricardo. Inti dari klaim ekonomi politik klasik adalah bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri. Hal ini kemudian menjadi dasar pokok dari kebijakan *laissez faire* (bebas berproduksi). Sistem pasar merupakan realitas yang bersifat *sui generis* yaitu akan tercipta dengan sendirinya tanpa

⁹ Disarikan dari Hidayat, Dedy N. (2002).

¹⁰ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. viii

campur tangan manusia. Dampak dari cara pandang seperti ini adalah hilangnya makna politik dalam pendekatan ekonomi politik. Karena ekonomi tidak perlu campur tangan dari pembuat kebijakan, maka makna politik menjadi redup dan ekonomi menjadi panglima dari sistem sosial. Determinasi utama dalam sistem sosial bukan lagi kuasa politik melainkan kuasa ekonomi. Hal ini semakin menguat dengan berkembangnya kapitalisme sehingga istilah ekonomi menggeser ekonomi politik.

Variasi dari pendekatan klasik adalah pendekatan neoklasik. William Jevons dan Alfred Marshall merupakan dua tokoh yang mengembangkan pendekatan neoklasik yang kemudian menjadi model bagi ekonomi *mainstream*. Mereka juga menolak menggunakan kata *politik* sehingga kajian ini selanjutnya menjadi ekonomi saja. Secara metodologis, mereka banyak menggunakan persamaan matematika dengan *outcome* kombinasi yang berbeda antar faktor produksi. Ekonomi politik neoklasik berkembang dengan sangat pesat dan dianggap sebagai – dalam istilah Kuhn (1970) – *normal science*. Tradisi klasik sempat pula dianggap sebagai satu-satunya pendekatan ekonomi politik karena sudah sedemikian berpengaruh dalam berbagai kurikulum perguruan tinggi di dunia dan menjadi dasar dari kebijakan ekonomi di banyak negara.

Dalam kestabilan pendekatan neoklasik itu, muncul banyak pertanyaan dengan nada yang kritis menyangkut batas-batas mashab neoklasik. Shiller (2006) misalnya, mengkritik kemujaraban obat bernama ekonomi neoklasik itu dengan menyebut bahwa obat itu justru membuat penyakit baru.¹¹ Munculnya banyak kritik akhirnya memicu lahirnya mashab baru. Alternatif mashab neoklasik itu beragam dari yang sifatnya politik, institusional, dan substantif.¹² Alternatif-alternatif itu muncul untuk memperluas ekonomi konvensional dalam aspek konseptual, metodologis, dan substantif.

¹¹ Selengkapnya dalam Mosco, Vincent, *The Political Economy of Communication*, Sage Publication, London, 2009

¹² Yang politis datang dari Edmund Burke, institusionalis dari tradisi Marx, dan substansial dari kalangan feminis, ekologis, moral ekonomi, dll. Bandingkan dengan Mosco, Vincent, *Op. Cit.*

Pada dasarnya, pendekatan neoklasik masih berpegang pada prinsip kekuatan pasar dimana ekonomi merupakan entitas yang berdiri sendiri. Namun pendekatan neoklasik tidak lagi menggunakan skema analisis pendekatan klasik tapi menggantinya dengan menggunakan filsafat utilitarian untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai sifat dan tujuan ekonomi pasar.¹³ Warisan pemikiran ini kemudian diterima oleh John Maynard Keynes di tahun 1930-an. JM Keynes melihat kegagalan pasar namun – tidak seperti pendahulunya – Keynes melihat kegagalan pasar dengan lebih mendalam dengan mengajukan keraguan tentang fungsi dari lembaga-lembaga dalam sistem produksi privat. Keynes mempertanyakan fungsi otoritas publik dalam sistem produksi privat tersebut.

Dalam proses selanjutnya, ekonomi politik banyak dilakukan dengan pengaruh besar dari paradigma kritis dalam konteks respon terhadap perkembangan kapitalisme. Studi ekonomi politik kritis ini melihat bahwa janji neoklasik tentang keadilan pasar tidak sepenuhnya terjadi dan dalam faktanya malah memunculkan banyak ketimpangan. Negara juga dilihat sebagai lembaga yang tidak sepenuhnya mampu bertindak mandiri sebagai lembaga regulatif. James Caporaso dan David Levine (2008) melacak kritik ini dan berakhir pada perkembangan ekonomi politik pada abad 19 ketika Marx mulai melihat bahwa ada yang salah dalam cara pandang klasik tentang ekonomi politik. Marx membalik logika ekonomi politik klasik dengan mengatakan bahwa faktor-faktor politik muncul karena dinamika dalam proses ekonomi kapitalistik dan menjadi penentu dalam berbagai konflik dalam sejarah manusia. Kritik Marx tidak dalam rangka membuktikan bahwa kuasa politik merupakan penentu dinamika ekonomi, namun melihat bahwa ada keterkaitan yang erat antara ekonomi dan politik. Struktur dasar ekonomi (*base structure*) menentukan dinamika politik dan ideologis masyarakat (*supra structure*). Proyek Marx ini merupakan bagian dari proyek besar yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internal kapitalisme sendiri.

¹³ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Op. Cit.* hal. xiii

Pendekatan ketiga adalah pendekatan ekonomi politik yang berfokus pada keadilan. Bertolak dari pendekatan klasik, pendekatan ekonomi politik yang berfokus pada keadilan tidak lagi mempermasalahkan keberhasilan atau kegagalan pasar dalam memenuhi kebutuhan namun mempermasalahkan basis legitimasi dari hak-hak yang ada dalam pasar dan sampai dimana hak-hak tersebut bisa dijalankan. Fokusnya adalah hak kepemilikan yang menjadi jantung dari argumen sistem pasar. Dalam hubungannya dengan politik, pendekatan ini melihat bahwa proses politiklah yang menentukan sampai dimana batas-batas tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini melihat bahwa sistem pasar memerlukan intervensi politik untuk mengoreksi kegagalan pasar dan menentukan terwujudnya keadilan.

Menurut Vincent Mosco (2009), studi ekonomi politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Secara tradisional, ekonomi politik memberikan prioritas pada pemahaman tentang perubahan sosial dan transformasi historis.
- Kajian ekonomi politik harus secara tegas mengakar pada totalitas sosial yang lebih luas. Totalitas berarti bahwa suatu keseluruhan terdiri atas unsur-unsur yang saling bernegasi, berkontradiksi, dan bermediasi. Prinsip totalitas ini berdasar pada dialektika yang menjadi semangat teori kritis.
- Ekonomi politik harus mengacu pada filsafat moral. Artinya bahwa harus ada nilai sosial baik dalam proses konsepsi maupun praksis sosial. Fokus kajian tidak hanya pada apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi.
- Ekonomi politik bersifat praksis. Praksis merupakan konsep yang mengajar kuat dalam filsafat Marx dan diteruskan oleh *Frankfurt School* dimana teori harus juga berdimensi praksis untuk transformasi sosial.

Dalam konteks studi media, pendekatan ekonomi politik juga sangat dipengaruhi oleh paradigma kritis. Golding dan Murdock (1997) membuat tiga ciri tentang ekonomi politik media. *Pertama*, ekonomi politik media bersifat holistik. Studi tentang media diletakkan

pada konteks keterhubungan antar berbagai aspek dan dinamika dalam masyarakat. Apa yang terjadi secara internal dalam media tidak bisa dipisahkan dari konteks dan totalitas sistem yang lebih luas dan dianggap sebagai kesatuan yang integral. *Kedua*, ekonomi politik media bersifat historis. Aspek historis dalam ciri ini bermaksud memfokuskan kajian ekonomi politik pada perkembangan historis kapitalisme. *Ketiga*, ekonomi politik media bersifat praksis. Ciri ini jelas dipengaruhi oleh Teori Kritis dalam tradisi Marx. Harus ada keterkaitan antara teori dengan upaya empirik untuk membuat perubahan sosial.¹⁴

Robert W. McChesney (2008) meletakkan studi ekonomi politik media dalam konteks perkembangan kapitalisme di Amerika Serikat. McChesney mengawali penjelasannya dengan melihat semakin kuatnya studi-studi tentang analisis konten media, teknologi media, dan studi dampak media. Studi-studi itu mengasumsikan adanya sebuah lingkungan media dimana media itu berada. Lingkungan media itu terkait dengan sistem kebijakan media dan sistem ekonomi. Memang studi-studi tentang kebijakan media, struktur, dan lembaga media tidak akan mampu menjawab seluruh fenomena media, namun kontribusi studi semacam ini akan memberikan kontribusi demi komprehensivitas studi media.

Bagaimana studi ekonomi politik media bekerja merupakan pertanyaan yang cukup rumit. Studi ini merupakan studi yang menghubungkan media, praktik komunikasi, dan isi media dengan struktur kepemilikan media, struktur pasar, dukungan komersial, teknologi, perburuhan, dan kebijakan pemerintah. Ekonomi politik media dengan demikian menghubungkan media dan komunikasi dengan kinerja ekonomi dan politik serta kekuatan sosial.¹⁵

¹⁴ Peter Golding & Graham Murdock eds., *The Political Economy of the Media*, Edward Edgar Publishing Ltd, 1997

¹⁵ McChesney, Robert W., *The Political Economy of Media*, Monthly Review Press, New York, 2008, hal. 12

Lebih detilnya, untuk konteks Amerika Serikat, studi McChesney tersebut meliputi tiga belas isu sebagai berikut:

- Karakter jurnalisme dan hubungannya dengan praktik demokrasi; bagaimana media dan pasar bekerja
- Memahami propaganda dari pemerintah, kepentingan komersial, dan sektor swasta
- Komersialisasi media dan depolitisasi masyarakat
- Hubungan media dengan ketimpangan ras, gender, ekonomi
- Hubungan media di Amerika Serikat dengan kebijakan luar negeri dan militerisme
- Peran spesifik iklan dalam membentuk pasar dan isi media
- Proses pembuatan kebijakan komunikasi
- Kebijakan dan regulasi telekomunikasi
- Hubungan komunikasi dengan kapitalisme global kontemporer
- Karakter komersialisasi dan dampaknya terhadap budaya
- Penyiaran publik dan pendirian lembaga dan sistem media alternatif
- Hubungan teknologi dengan media, politik, dan masyarakat
- Hubungan media dengan gerakan sosial ¹⁶

Pendekatan ekonomi politik dengan paradigma kritis merupakan pendekatan yang paling cocok dipakai untuk membahas persoalan liberalisasi media di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan ekonomi politik relevan dengan tema yang diangkat:

- Aspek historis. Sebagaimana disinggung oleh Mosco (2009), studi ekonomi politik media melihat perubahan sosial dan transformasi historis terkait regulasi media, struktur ekonomi, dan struktur politik. Pendekatan ini relevan dengan studi ini karena studi ini melihat bagaimana konteks

¹⁶ McChesney, Robert W., *Op. Cit.*, hal. 14

kapitalisme global telah memengaruhi perubahan kebijakan media, perubahan struktur ekonomi media, dan proses demokratisasi media.

- Aspek spasialitas. Studi ekonomi politik melihat bahwa spesialisasi yaitu perpanjangan insitusal media karena membesarnya korporasi media. Spesialisasi relevan dengan studi ini karena studi ini melihat bagaimana kapitalisme global telah memperluas jaring-jaring media menjadi sedemikian global. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengusung isu demokratisasi untuk membuka sistem regulasi di suatu negara yang belum kompatibel dengan kapitalisme global.
- Menurut McChesney, studi ekonomi politik media juga melibatkan aspek gerakan sosial. Hal ini relevan karena studi ini melihat bagaimana gerakan sosial di Indonesia sejak 1994-2002 telah menentukan corak lanskap media di Indonesia yang relevan dengan demokrasi dan kapitalisme global.
- Aspek Iklan. Studi ini melihat bagaimana kekuatan iklan menjadi faktor penting dalam liberalisasi media di Indonesia. Ini relevan dengan yang disampaikan McChesney bahwa studi tentang iklan media merupakan bagian dari studi ekonomi politik media.

3.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut W. Lawrence Neuman (2000), penelitian deskriptif adalah salah satu dimensi penelitian yang menggambarkan secara rinci situasi, setting sosial dan relasi yang terjadi pada subyek penelitian.¹⁷ Penelitian ini mendeskripsikan proses liberalisasi media di Indonesia serinci mungkin dengan aspek historis, aktor, beserta dampaknya bagi perlindungan jurnalis, struktur kepemilikan media, dan demokratisasi media di Indonesia.

¹⁷ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, 4th Edition, USA: Allyn and Bacon, 2000, hlm. 76

3.4 Disain Penelitian

Disain penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus meneliti kejadian, situasi, dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam mengamati, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan melaporkan hasilnya. Studi kasus bertujuan untuk menampilkan informasi secara komprehensif, sistematis, dan mendalam dari sebuah kasus.

Menurut Robert K. Yin (2003), *a case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident*. Studi kasus merupakan bentuk penelitian empiris yang meneliti fenomena aktual dengan konteks yang nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Aspek keunikan dari tema penelitian merupakan hal penting yang menjadi alasan penggunaan studi kasus. Studi kasus berfokus pada menampilkan realitas dengan mengetahui keragaman dan kekhususan objeknya. Hasil akhir yang ingin diperoleh adalah menjelaskan keunikan kasus yang dikaji, umumnya berkaitan dengan hakikat kasus, latar belakang historis, konteks kasus dan persoalan lain disekitar kasus yang dipelajari.¹⁸

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Secara metodologis, ada tiga jenis interview. Menurut kelompok positivis, wawancara bertujuan untuk menemukan fakta yang terjadi di dunia. Isu pokok dari kelompok ini adalah sejauh mana wawancara mampu menemukan data yang valid, *reliable*, dan independen terhadap peneliti. Menurut kelompok emotionalisme, wawancara dilihat sebagai pengalaman subjek yang aktif membentuk kehidupan sosial mereka. Isu pokoknya adalah bagaimana mengumpulkand ata yang memberi pemahaman otentik dari pengalaman manusia. Cara-cara untuk mencapai hal ini berifat tidak terstruktur (*unstructured*), dan *open-ended*. Menurut konstruksionisme, pewawancara dan yang

¹⁸ Nursatyo, Tesis, Universitas, Indonesia, 2012

diwawancarai selalu aktif terlibat dalam membentuk makna. Makna dibentuk secara bersama-sama (*mutually constructed*).¹⁹

Wawancara ini bersifat emotionalism dengan metode pemaknaan yang *open-ended*. Wawancara pada penelitian ini berfokus pada penemuan informasi historis tentang suatu kejadian. Oleh karenanya pelaku-pelaku dalam liberalisasi media menjadi penting dalam wawancara ini.

Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari laporan rapat, notulensi, regulasi, draft regulasi, dan sejenisnya. Penelitian ini mempelajari dokumen sabagai berikut:

- Undang-Undang Pers No. 40/1999
- Draft Undang-Undang Pers versi UNESCO-Toby Mendel
- Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002
- Laporan pelaksanaan proyek
- Hasil rapat
- Jurnal
- Disertasi
- Surat Pernyataan Sikap

3.6 Subjek Penelitian dan Narasumber

Subjek penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat selama proses liberalisasi media. Dengan demikian narasumber yang dicari adalah mereka-mereka yang terlibat secara historis dalam proses liberalisasi media, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

¹⁹ Lihat selengkapnya dalam *Interpreting Qualitative Data*, David Silverman, SAGE Publication, London, 2001 halaman 83-90

- Christiana Chelsia Chan (aktif dalam proses pembentukan UU Pers dan UU Penyiaran bersama *Internews* dan Indonesia Media Law and Policy Center/IMLPC)
- Amir Effendi Siregar (Ketua SPS Pusat, aktif dalam SPS dan MPPI yang merancang UU Pers)
- Toby Mendel (bersama UNESCO ikut merancang UU Penyiaran)
- Eko Item Maryadi (Ketua AJI, dulu menerbitkan majalah *Independen*, sebagai jurnalis pernah dipenjara rejim Orde Baru)
- Bimo Nugroho (eks anggota KPI, eks aktivis ISAI)
- Irawan Saptono (Direktur ISAI)
- Rita Nasution (bagian keuangan ISAI)
- Paulus Widiyanto (mantan Ketua Panja UU Penyiaran)
- Yanur Nugroho (peneliti di Manchester University)
- Kukuh Sanyoto (aktivis di MPPI)

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa rekaman wawancara dan dokumen. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan analisis data. Miles dan Huberman (1992) menjelaskan bahwa ada tiga tahap analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data, meringkas data, dan menggolongkan data. Penyajian data dilakukan dengan menuliskan teks naratif serta membuat matriks. Penarikan kesimpulan berlangsung secara kontinu selama riset dengan mengamati data beserta teori yang dipakai. Kesimpulan bisa bersifat longgar dan skeptis pada awalnya sampai menemukan bangunan kesimpulan yang kokoh.

BAB 4

LIBERALISME, NEOLIBERALISME, DAN DEMOKRATISASI

4.1 Liberalisme

4.1.1 Liberalisme Klasik

Dalam telaah aktual tentang liberalisme, kebanyakan pemikir – terutama di Negara Dunia Ketiga- akan cepat-cepat mengaitkannya dengan neoliberalisme, sebuah doktrin ekonomi yang dicanangkan oleh Inggris dan Amerika semasa Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Namun demikian, perlu dilacak akar pemikiran ini dengan merunut konteks sejarah Barat. Neoliberalisme merupakan varian baru dari liberalisme. Sebelum membahas neoliberalisme, kita perlu membahas dulu liberalisme klasik yang menjadi akar pemikiran neoliberalisme.

Beberapa pemikir penting dalam telaah liberalisme di antaranya adalah Isaiiah Berlin lewat buku *Four Essays on Liberty* (1969). Akan tetapi, pada bab ini, penulis akan lebih banyak mengutip pemikiran Ludwig von Mises, seorang pemikir pembela liberalisme yang menulis *Liberalism* (1927). Von Mises dianggap lebih mendasar dalam mengupas baik pada aspek doktrin-doktrin liberalisme maupun pada telaah aspek ekonomi politiknya.

Dalam merunut sejarah pemikiran liberalisme, ada kesimpangsiuran. Beberapa pemikir berhenti pada episode Revolusi Perancis sebagai tonggak awal kemunculan liberalisme, termasuk di dalamnya adalah Leon Tortsy (1906). Ada pula yang berpikir bahwa sebagai ajaran moral sosial, semangat liberalisme sudah muncul sebelum Revolusi Perancis. Semangat liberalisme sudah muncul lewat kritik keras Martin Luther di Jerman terhadap penyelewengan hirarki gereja Katolik Roma pada abad ke-16. Luther mempertanyakan monopoli tafsir Injil

oleh kekuasaan hirarki gereja. Dia juga mengkritik keras penyelewengan wewenang gereja Katolik Roma yang menjual surat pengakuan dosa. Sebagai bentuk pembebasan, Luther memberikan tawaran baru dalam sikap iman Kristen, yaitu bahwa setiap orang boleh menafirkan sendiri Injil tanpa melalui kuasa hirarkis. Luther memangkaskan kekuasaan hirarki Katolik Roma sebagai kekuatan agen tafsir terhadap Injil.

Di Perancis, liberalisme muncul sebagai respon atas feodalisme Eropa yang diakhiri oleh Revolusi Perancis tahun 1789-1799. Feodalisme Perancis kemudian digeser oleh kekuatan republik yang mengusung ideologi *liberté, égalité, dan fraternité* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Revolusi Perancis menekankan pada aspek politik dari liberalisme yaitu munculnya negara dengan tatanan dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya melalui hak pilih.

Dalam konteks kenegaraan, von Mises melihat bahwa pemerintahan yang pertama kali menerapkan dasar-dasar liberalisme adalah Otto von Bismarck di Kekaisaran Jerman lewat program *Sozialpolitik* pada tahun 1881, atau 50 tahun sebelum program *New Deal* oleh F.D. Roosevelt. Dalam kaca mata liberal, kebijakan Bismarck merupakan kebijakan progresif pada masanya. Pesan utama von Mises dari cerita itu adalah bahwa Amerika bukanlah pencetus pertama liberalisme yang dikelola oleh negara, melainkan Eropa.

Terkait konflik-konflik terkait tujuan liberalisme terutama menjawab tantangan kelompok asketis keagamaan, von Mises (2011) menandakan bahwa

Liberalisme adalah sebuah doktrin yang ditujukan sepenuhnya bagi perilaku manusia di bumi ini. Sesungguhnya, liberalisme tidak memiliki tujuan lain selain daripada memajukan kesejahteraan lahiriah dan material manusia dan tidak secara langsung memberi perhatian pada upaya memenuhi kebutuhan spiritual dan metafisika mereka. Liberalisme

tidak menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan selain kepuasan tertinggi karena semua keinginan duniawi mereka terpenuhi.¹

Von Mises hendak menekankan pada aspek keduniawian dari liberalisme. Liberalisme memang tidak berpretensi untuk sepenuhnya bertanggungjawab atas kebahagiaan manusia dalam segala aspek. Dengan terang ia tidak menjamin bahwa liberalisme akan membahagiakan manusia pada sisi spiritual dan metafisika. Sifat liberalisme adalah sekuler. Terhadap sikap kritis dari kaum asketik dan keagamaan yang tidak mengagungkan pada kebahagiaan duniawi, von Mises menjawab bahwa memang itu bukan tanggung jawab liberalisme. Maka, karena memang berada pada ranah yang berbeda, sebaiknya asketisme tidak perlu mengganggu jalannya praktek liberalisme.²

Lebih lanjut von Mises menjelaskan bahwa ada tiga belas konteks dasar dari kebijakan liberal yaitu:³

- **Hak Milik**

Ada dua elemen dalam konteks ini yaitu hak milik dan pembagian kerja. Kebebasan individu memungkinkan manusia untuk memiliki hak milik atas faktor produksi. Tiga faktor produksi –tenaga kerja, tanah, modal- bisa dikelola manusia dengan menggunakan prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan keterampilan evolusioner manusia yang membedakan manusia dengan binatang. Pembagian kerja pula yang mampu memajukan peradaban manusia saat ini melebihi capaian-capaian manusia sebelumnya. Berbeda dengan sosialisme yang berpendapat bahwa faktor produksi harus dikuasai negara untuk menjamin kesetaraan produksi dan distribusi, kelompok liberal berpendapat bahwa penguasaan

¹ von Mises, Ludwig, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute, Jakarta, 2011, hal. 4

² von Mises, Ludwig, *Op.Cit.* hal. 6

³ Selengkapnya dalam von Mises, Ludwig, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute dan FNS Jakarta, 2011

hak milik faktor produksi oleh individu yang akan menghasilkan kemakmuran maksimal. Kepemilikan faktor produksi tersebut akan bekerja secara alamiah lewat pembagian kerja sehingga kaum paling lemah sekalipun bisa berpartisipasi dalam proses produksi.

- **Kebebasan**

Kebebasan dalam perspektif liberal tidak hanya berhubungan dengan makna normatif humanis namun juga bermakna ekonomi. Von Mises mengambil contoh dilema kebebasan bagi kelompok budak. Ide tentang kebebasan pada awalnya ditentang, termasuk oleh para budak sendiri. Mereka merasa bahwa kebebasan justru akan membuat mereka terlepas dari perlindungan majikan karena majikan wajib menyediakan kebutuhan pangan mereka. Kebebasan bagi kaum budak berarti mereka harus mencari makan sendiri. Pandangan ini kemudian ditepis dengan mengangkatnya pada dimensi tenaga kerja, yaitu bahwa para budak akan jauh lebih produktif jika mereka memiliki kebebasan untuk bekerja. Kemajuan jaman pada 200 tahun terakhir terjadi karena adanya gerakan pembebasan budak sehingga sektor-sektor industri strategis maju dengan pesat karena tenaga kerja mereka.

- **Perdamaian**

Cara pandang liberal tentang perdamaian juga tidak didasari oleh pertimbangan normatif humanis. Dulu, di Eropa berkembang pemahaman bahwa perang merupakan puncak dari upaya dan kreativitas manusia untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan. Pengorbanan karena perang sepadan oleh hasil yang diraih. Kaum agamawan religius menanggapinya dengan ajaran moralis bahwa perang tidak baik. Sementara kelompok liberal berpikir bahwa hanya perdamaianlah yang akan mendorong kesejahteraan karena kerjasama sosial dan pembagian kerja menuntut adanya kerjasama sosial. Pertukaran faktor produksi tidak akan berjalan

tanpa perdamaian. Padahal pertukaran faktor produksi merupakan sumber utama kesejahteraan. Itu semua tidak akan berjalan tanpa perdamaian.

- **Persamaan**

Persamaan merupakan fakta kodrati manusia. Perbedaan-perbedaan hirarkis adalah fakta bentukan sosial manusia. Persamaan membuat manusia merasa bebas, dan kebebasan adalah sumber dari kreativitas dan produktivitas manusia untuk meraih kesejahteraan. Kemajuan ekonomi menuntut persamaan agar tidak ada tenaga kerja yang merasa terpaksa dalam proses produksi. Hak istimewa dalam sebuah organisasi produksi tidak berarti diskriminatif selama hak istimewa tersebut merupakan bagian dari proses produksi bersama. Seorang kapten kapal memang mendapat hak istimewa karena posisi dan keahliannya. Namun hak istimewa tersebut digunakan bagi keseluruhan awak kapal agar kapal tetap berjalan. Kepemilikan pribadi juga tidak sekedar melayani kepentingan pemilik saja namun merupakan bagian dari keseluruhan sistem produksi, termasuk bagi kelompok miskin sekalipun.

- **Kesenjangan Kekayaan dan Pendapatan**

Bagian ini merupakan bagian yang paling banyak dikritik ketika orang membahas liberalisme. Menurut pendapat kelompok liberal, kesenjangan kekayaan dan pendapatan bukanlah konsep yang bersifat saling berlawanan. Karena konsumsi lebih kelompok kayalah maka kelompok miskin mendapat pendapatan. Konsumsi tinggi akan mendorong produksi yang akan menguntungkan kelompok miskin. Kemewahan dipahami sebagai konsep yang relatif karena kemewahan pada jaman tertentu mungkin akan menjadi kebutuhan wajar pada waktu selanjutnya. Dulu mobil sebagai sarana transportasi dianggap sebagai kemewahan, namun sekarang sudah dianggap sebagai kebutuhan biasa. Pemerataan tetap

merupakan cita-cita kelompok liberal. Cara untuk menuju pemerataan adalah dengan menciptakan sistem distribusi yang sehat. Sesederhana itu.

- **Hak Milik Pribadi dan Etika**

Moralitas dipahami sebagai tuntutan terhadap individu tentang konsensus bersama yang harus ditaati. Terdapat perbedaan antara melakukan sesuatu hal baik demi kebaikan dengan melakukan hal baik karena itu merupakan tuntutan kolektif. Moralitas kolektif yang dipahami kaum liberal adalah kerjasama sosial. Pengorbanan dipahami sebagai keputusan membatalkan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya namun mengganggu kerjasama sosial demi manfaat akhir yang jauh lebih besar. Kepuasan langsung ditunda untuk meraih kepuasan yang lebih besar.

Kepemilikan pribadi dinilai bermoral manakala kepemilikan itu merupakan bagian dari sistem kerjasama sosial secara keseluruhan. Hak milik pribadi wajib tunduk pada moralitas bersama di bawah prinsip kerjasama sosial menuju kesejahteraan.

- **Negara dan Pemerintah**

Jika individu harus tunduk pada moralitas kerjasama sosial, apakah yang harus dilakukan ketika ada individu yang bersikeras untuk melanggar moral itu? Liberalisme percaya bahwa harus ada sistem paksaan bagi para individu yang melanggar moralitas kerjasama sosial. Pelanggaran baru berarti pelanggaran manakala tindakan individual telah mengganggu jalannya sistem bersama. Di sinilah liberalisme merekomendasikan adanya entitas yang memiliki fungsi paksa terhadap pelanggaran itu. Fungsi paksa itu dialamatkan kepada negara.

Akan tetapi, liberalisme memandang perlunya pembatasan fungsi negara hanya dalam konteks menjalankan sistem paksa agar moralitas kerjasama

sosial tetap berjalan. Negara tidak diamanatkan untuk masuk pada fungsi-fungsi produksi lebih jauh karena akan mengganggu fungsi kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi yang menjadi dasar utama liberalisme.

Kelompok sosialis mengkritik konsep ini dengan olok-olok negara penjaga malam yang hanya punya kewenangan terhadap ketertiban sosial namun tidak punya kekuasaan ekonomi. Kelompok liberal membalasnya dengan mengatakan, kalau ada yang lebih konyol dari negara penjaga malam, itu adalah negara yang hanya sibuk membuat acar kubis, kancing celana, dan penerbitan surat kabar.

- **Demokrasi**

Prinsip dasar pembelaan liberal terhadap sistem politik adalah sejauh mana sistem politik tersebut mampu mendukung prinsip hak milik, perdamaian, dan kerjasama sosial. Cara pandang liberal terhadap demokrasi adalah bahwa sistem ini merupakan satu-satunya sistem yang mendukung prinsip perdamaian dan stabilitas yang dibutuhkan proses ekonomi. Sistem ekonomi liberal tidak akan berjalan jika terjadi keriuhan-keriuhan pada ranah politik seperti perang saudara atau revolusi. Ekonomi tidak akan mampu menahan gejolak-gejolak politik tersebut, seperti yang pernah mengancam ekonomi Inggris semasa Perang Mawar atau Perancis saat Revolusi tahun 1789. Stabilitas politik dibutuhkan sebagai habitat sekaligus pendukung dari proses produksi ekonomi yang diasumsikan akan melahirkan kesejahteraan bersama.

Menurut liberalisme, demokrasi adalah bentuk peraturan politik yang memungkinkan penyesuaian diri pemerintah terhadap keinginan kelompok yang diperintah tanpa harus melalui cara kekerasan.⁴ Sistem demokrasi

⁴ Mises, von., *Op.Cit.* Halaman 50

langsung memungkinkan adanya dukungan mayoritas sehingga gejala yang mengganggu ekonomi bisa dihilangkan. Cara kekerasan dinilai kelompok liberal akan mengganggu proses ekonomi.

- **Kritik terhadap Doktrin Kekerasan**

Von Mises menghubungkan kritik terhadap doktrin kekerasan dengan sikap terhadap antidemokrasi. Yang terutama dia anggap sebagai kelompok antidemokrasi adalah kelompok sosialis yang percaya pada revolusi sebagai awal dari tatanan masyarakat sosialis serta kelompok aristokrat yang menggunakan tirani feodal sebagai basis dari kekuasaan. Ia menganggap hal itu bertentangan dengan semangat liberal karena mengandung anasir kekerasan dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip kerjasama sosial dan perdamaian yang menjadi basis dari konsensus pembagian kerja. Menjalankan prinsip antikekerasan berarti menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dimana keputusan politik diambil melalui mekanisme suara terbanyak. Bentuk-bentuk pemaksaan koersif tidak lagi relevan. Mereka yang berkuasa harus mampu meyakinkan pikiran orang lain melalui cara non kekerasan.

- **Argumen Fasisme**

Liberalisme merupakan lawan paling tangguh dari sosialisme dalam hal kompetisi intelektual yang efektif. Fasisme merupakan respon terhadap komunisme yang berkembang di awal abad ke-19 di Eropa, ketika asosiasi partai-partai komunis (*Third International*) menganggap semua cara diperbolehkan untuk mencapai tujuan mereka. Di Italia, hal ini direspon oleh fasisme yang mendapat banyak simpati karena rakyat tidak mau diatur dalam komunisme. Namun sesudah situasi menjadi lebih stabil, von Mises berpendapat bahwa sikap fasisme menjadi lebih moderat terhadap liberalisme dibanding sikap kelompok Bolshevik yang secara tuntas

berhasil menolak liberalisme. Pengaruh liberalisme terhadap fasisme bersifat tidak sadar.

Kritik liberalisme terhadap fasisme ada pada titik keberlanjutan (*sustainability*) sistem ini. Contohnya ada pada aspek hubungan luar negeri. Dengan corak pendekatan fasis, mustahil untuk menghindari kekerasan dalam diplomasi luar negeri. Von Mises mengakui bahwa fasisme telah menyelamatkan Eropa dari kebrutalan komunisme. Namun menganggapnya sebagai sistem yang menjamin kesejahteraan di masa depan, merupakan kesalahan fatal.

- **Lingkup Kegiatan Pemerintah**

Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, tugas negara menurut faham liberal semata-mata dan secara khusus adalah melindungi nyawa, kesehatan, kebebasan dan hak milik pribadi dari serangan kekerasan. Lebih dari itu adalah kejahatan.⁵ Masalahnya adalah, setiap kekuasaan selalu mengandung bibit-bibit kejahatan. Akan tetapi, menghadapi masalah seperti narkoba dan alkohol, masalahnya menjadi pelik. Menyerahkan pelarangan terhadap hal-hal negatif seperti itu memang seolah baik dan masyarakat pun tidak keberatan dengan pelarangan tersebut. Akan tetapi kaum liberal tetap tidak mengizinkan pemerintah keluar dari lingkup wewenang seperti yang seharusnya. Persoalannya bukanlah pelarangan pada kebebasan orang untuk melakukan sesuatu, namun seberapa jauh wewenang pelarangan itu diterapkan. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa alkohol, narkoba, kokain, mengganggu kesehatan manusia, namun bukan tugas negara untuk melakukan pelarangan perdagangan. Ini akan terasa kontroversial karena di tingkat horisontal akan terjadi pertentangan. Liberalisme mengantisipasi hal ini

⁵ Von Mises, Ludwig, *Op.Cit.* halaman 62

dengan mengatakan bahwa manusia harus terbuka terhadap gaya hidup orang lain, meskipun gaya hidup itu bertentangan dengan gaya hidupnya. Tidak perlu memanggil polisi untuk urusan sepele.

- **Toleransi**

Konteks bahasan ini adalah hubungan liberalisme dengan institusi agama yang di Eropa diwakili oleh gereja. Liberalisme menandakan bahwa urusannya adalah kesejahteraan duniawi, dan tidak mengurus persoalan metafisika dan spiritual yang menjadi wilayah agama. Keduanya tidak berposisi antagonis selama memang ada toleransi di antara keduanya. Namun, liberalisme menilai bahwa gereja pun sebagai entitas politik sering memasuki persoalan duniawi yang sering bertentangan dengan nilai liberal, misalnya fakta sejarah dimana gereja tidak menghargai kebebasan individu lewat serangkaian tindakan kekerasan terhadap para intelektual dan kelompok lain yang dianggap berseberangan dengan faham gereja. Di sinilah liberalisme menarik garis demarkasi yang tegas dengan gereja.

Menurut klaim liberalisme, gereja di Eropa terpaksa menanggalkan banyak wewenangnya yang selama ribuan tahun berhasil dijaga. Pada awal abad ke-20, gereja terpaksa mengurangi wewenang-wewenang tersebut. Liberalisme menuntut toleransi dalam arti prinsip, bukan sekedar manajemen konflik. Liberalisme menerima ajaran spiritual apapun yang bahkan menurut mereka tidak masuk akal dan sesat.

- **Negara dan Perilaku Antisosial**

Liberalisme tetap memandang bahwa negara tetap dibutuhkan untuk menjaga sistem hak milik dan perlindungan individual. Dalam hubungannya dengan perilaku antisosial, liberalisme memandang bahwa

tetap dibutuhkan otoritas bernama pemerintah untuk menertibkan perilaku tersebut, bila perlu dengan menggunakan kekerasan.

Kutub lain dari pemikiran ini adalah kelompok romantis idealis yang memandang negara sebagai monster terburuk dari segala jenis monster buruk (Nietzsche). Menanggapi hal tersebut, liberalisme memandang bahwa yang perlu dilakukan adalah menjaga hubungan baik antara birokrasi dengan warga negara. Yang tidak boleh dilakukan negara adalah melakukan pemberangusan dan bertindak di luar batas wewenangnya atas nama dukungan mayoritas.

4.1.2 Kapitalisme

Dalam konteks ekonomi, kelahiran faham liberalisme sudah muncul terlebih dahulu lewat karya klasik Adam Smith, *The Wealth of Nation* (1776). Inti dasar semangat liberalisme adalah persamaan derajat dan hak individu dalam menyampaikan pikirannya. Dalam konteks personal, liberalisme menjunjung tinggi pilihan personal individu dalam menentukan nasibnya dan terbebas dari belenggu politik eksternal baik dari negara maupun agama. Dalam konteks ekonomi, kapitalisme menjadi implementasi dari liberalisme.

Menurut Emanuel Subangun (1995), Adam Smith dipengaruhi oleh pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang kontrak sosial dalam bukunya *Du Contract Sociale* (1762). Smith melihat bahwa tarik-menarik kepentingan ekonomi antara anggota masyarakat akan menghasilkan keseimbangan ekonomi. Kompetisi dianggap sebagai hal yang lumrah karena lewat kompetisi semacam inilah manusia akan menemukan kemajuannya. Proses saling mendukung dalam masyarakat akan tercipta lewat kompetisi bebas ini. Karena berbasis pada kemerdekaan individual, kapitalisme mendorong kepemilikan individual. Kepemilikan individual dianggap sebagai salah satu cara menuju kemakmuran individu. Justru “keserakahan” semacam inilah yang akan mengarahkan manusia untuk semakin memperjuangkan kepentingannya dengan cara semakin banyak memproduksi barang dan

jasa untuk memperoleh laba maksimal. *The invisible hand* akan mengatur keseimbangan proses transaksi kepentingan ini.

*Bukan dari kebaikan hati sang pemotong hewan, sang pembuat minuman atau tukang roti kita mengharapkan makanan kita, tetapi dari kepentingan kita sendiri. Kita harus berterima kasih bukan dari kepentingan mereka sendiri. Kita harus berterima kasih bukan karena perikemanusiaan mereka, tetapi pada kecintaan mereka pada diri-sendiri, dan jangan pernah berbicara pada mereka tentang keperluan-keperluan kita, tetapi bicaralah tentang kepentingan mereka.*⁶

Gejala khas yang terjadi dalam sistem kapitalisme adalah perubahan sistem nilai dari nilai guna (*use value*) menjadi nilai tukar (*exchange value*). Nilai guna terjadi dalam masyarakat subsisten yang melihat barang dalam konteks pemenuhan kebutuhan internal. Nilai guna ditentukan oleh kemampuan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan. Nilai guna semacam ini berkembang dalam masyarakat komunal dimana kontrol terhadap kepemilikan alat produksi masih ada. Nilai guna akan mendorong munculnya kohesivitas sosial.⁷

Masyarakat yang produktif akan meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi barang. Ini akan menghasilkan surplus produksi. Surplus produksi akan mendorong orang untuk menukar barang produksinya dengan barang yang diproduksi oleh kelompok masyarakat lain. Maka berkembanglah nilai tukar. Nilai tukar melihat kualitas barang dari aspek kemampuannya untuk ditukar dengan barang lain. Proses pertukaran paling sederhana adalah barter (*commodity to commodity*) yaitu pertukaran antar barang dengan nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai tukar ini akan memunculkan spesialisasi produksi dalam masyarakat. Produksi satu jenis barang dilakukan karena keyakinan bahwa barang tersebut memiliki nilai tukar untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di sinilah muncul pembagian kerja (*division of labor*). Masyarakat hanya memproduksi jenis

⁶ Adam Smith dalam A. Prasetyantoko (1999)

⁷ A. Prasetyantoko *Op. Cit.* hal. 12

barang sesuai keahliannya dengan harapan masyarakat lain memproduksi jenis barang lain untuk saling dipertukarkan.

Dalam pertukaran itu kemudian ditemukan fungsi uang karena volume transaksi makin tinggi. Nilai tukar barang dikuantifikasi lewat angka nominal yang ada dalam uang. Dengan demikian proses transaksi terjadi melalui uang (*commodity-money-commodity*). Makin lama, pertukaran melibatkan aktor ketiga di luar produsen yaitu pedagang. Merekalah yang menjadi kekuatan penting baru dalam kapitalisme.

Dalam relasinya dengan negara, kapitalisme menegaskan bahwa campur tangan negara seminimal mungkin akan lebih menjamin munculnya kesejahteraan sosial lewat penerapan kebijakan sebebaskan mungkin terhadap proses produksi (*laissez faire*) dan proses distribusi (*laissez passer*).

4.1.3 Neoliberalisme dan Globalisasi

Neoliberalisme merupakan istilah lain untuk memahami cara kerja kapitalisme global aktual. Secara historis, konsepsi neoliberalisme dimulai ketika August von Hayek mengorganisasi pertemuan tertutup bagi para ilmuwan tahun 1947 di Mont Pélérin, Swiss. Para pemikir yang diundang datang dari Amerika Utara dan Eropa seperti Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Walter Lippman, Michael Polanyi, dll.⁸ Pertemuan itu didasari oleh keprihatinan terhadap perkembangan komunisme di Eropa yang teraktualisasi dalam fasisme. Hayek menulis buku *Economics and Knowledge* (1937) yang pesan intinya adalah bahwa kapitalisme pasar bebas bukan sekedar merupakan fakta bentukan sosial namun merupakan fakta alamiah. Buku ini kemudian diikuti beberapa buku lain misalnya *The Road to Serfdom* (1944) dan *The Constitution of Liberty* (1966). Dua buku terakhir ini yang dipakai Margaret Thatcher sebagai dasar strategi ekonomi Partai Konservatif Inggris pertengahan 1970.

⁸ Radhika Desai, *New Left Review* vol. 203 tahun 1994 dalam Priyono, Herry B. *Neoliberalisme*, Cindelaras, Yogyakarta (2003)

Peran Hayek dalam mengembangkan neoliberalisme menguat sesudah bergabung dengan *Committee on Social Thought*, Universitas Chicago. Di sinilah bersama Milton Friedman, Hayek membangun dasar-dasar neoliberalisme. Neoliberalisme mashab Chicago menentang keras intervensi negara karena dinilai mengancam hak-hak individu. Sekali lagi, konteks kelahiran neoliberalisme adalah kritik terhadap model ekonomi sentralistik sosialisme di Eropa sejak tahun 1930-an. Lewat kritik terhadap monster sentralisasi ekonomi itu, neoliberalisme lari pada kutub yang lain yaitu kemerdekaan individual dalam ekonomi. Neoliberalisme kemudian tumbuh sebagai kekuatan ekonomi global yang dominan sampai saat ini. Banyak kalangan menilai neoliberalisme sebagai monster baru terutama di Negara Dunia Ketiga. Ini berkaitan dengan proses privatisasi besar-besaran pada berbagai sektor termasuk layanan dasar yang berdasarkan banyak konstitusi negara seharusnya dipenuhi oleh negara seperti kesehatan, pendidikan, dan air minum.

Ada enam tesis neoliberalisme yaitu (1) keutamaan pembangunan ekonomi, (2) pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan, (3) pasar bebas tanpa restriksi, (4) pilihan-pilihan individual lebih diutamakan dibanding pilihan kolektif, (5) regulasi pemerintah harus dipangkas semaksimal mungkin, (6) model pembangunan yang bersifat sosial-evolutif dan berdasar pada pengalaman negara Barat dianggap sebagai model universal (Steger, 2002: 9).

Kritik utama terhadap neoliberalisme adalah bahwa neoliberalisme tidak menganggap ekonomi hanya sebagai salah satu dimensi kehidupan manusia, tapi menetapkan diri sebagai satu-satunya dimensi yang menentukan seluruh dimensi kehidupan manusia. Tidak boleh ada hubungan-hubungan sosial yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar ekonomi. Ekonomi merupakan determinan utama kehidupan manusia yang menentukan keseluruhan sendi kehidupan manusia. Manusia didorong menjadi makhluk berdimensi tunggal yaitu *homo economicus*.⁹

⁹ Selengkapnya dalam Priyono, Herry B. *Op Cit.* 2003

Robert McChesney (2008) menilai neoliberalisme sebagai doktrin bahwa keuntungan harus mengatur sebanyak mungkin kehidupan sosial, dan kekuatan apapun yang menentang itu, harus dicurigai atau dikutuk. Sosial itu tidak ada. Yang ada adalah individu-individu yang saling berkompetisi memperjuangkan profit dalam sistem pasar yang semaksimal mungkin tidak dikontrol oleh pemerintah. Sakralitas dalam kehidupan sosial itu tidak ada selain orientasi meraih kemakmuran lewat perdagangan bebas.

Neoliberalisme menjadi wacana global penting pada tahun 1980-an ketika Thatcher dan Reagan menjunjung tingginya sebagai satu-satunya alternatif dalam pembangunan ekonomi politik. Thatcher terkenal dengan ungkapan *There is No Alternative* untuk menegaskan neoliberalisme sebagai akhir sejarah paska keruntuhan komunisme. Dalam konteks ekonomi internasional, neoliberalisme kemudian menjadi alasan utama bagi perubahan-perubahan struktural di berbagai negara. Kebijakan deregulasi dan privatisasi merupakan *structural adjustment* sistem ekonomi domestik terhadap sistem ekonomi neoliberal yang dianggap sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang layak bagi dunia dengan alasan ideologis bahwa sistem inilah yang paling mampu menjanjikan kesejahteraan umat manusia.

Untuk memperjuangkan neoliberalisme, tiada cara lain selain membuka potensi ekonomi seluas mungkin dalam satu bola dunia. Ini berawal dari dalil dasar ekonomi yaitu sumber daya ekonomi terbatas, sementara kebutuhan dan level kesejahteraan manusia tidak terbatas. Perluasan cakupan ekonomi untuk memperoleh sumber daya baru tidak berhindarkan. Terlebih pada situasi pasca Perang Dunia II, negara-negara Barat mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Maka muncullah konsepsi Bretton Woods di New Hampshire pada Juli 1944. Konsepsi ini menyepakati pembentukan dua lembaga keuangan internasional yaitu *International Monetary Fund* (IMF) dan *The International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang kemudian berintegrasi dengan beberapa lembaga sejenis menjadi *World Bank*. Dua lembaga keuangan ini bertugas menyelamatkan ekonomi negara-negara pasca Perang Dunia II.

Akan tetapi dua lembaga keuangan internasional ini pada akhirnya banyak juga melibatkan negara-negara Selatan dalam konteks penyelamatan ekonomi. Ideologi yang diusung IMF dan *World Bank* adalah neoliberalisme yang mendorong perdagangan bebas global. Meskipun pada awalnya terkesan netral, peran dua lembaga ini dinilai sebagai upaya ekonomi politik negara-negara maju seperti Amerika Serikat dalam upaya ideologis membatasi gerak sosialisme semasa Perang Dingin. Melalui skema pemberian hutang, negara-negara dengan ekonomi tidak bagus ditarik ke dalam logika ekonomi neo klasik yang berorientasi pada investasi dan pertumbuhan sehingga terhindar dari logika komunalisme ekonomi dalam sosialisme. Inilah awal mula dari cara pandang IMF dan *World Bank* sebagai instrumen kebijakan ekonomi politik luar negeri negara-negara maju.

Perluasan ideologi neoliberalisme lewat dua tentakel IMF dan *World Bank* memberikan keberhasilan signifikan dalam enam kuartal terakhir. Terjadi peningkatan jumlah yang signifikan mengenai negara-negara yang menerapkan perdagangan bebas. Kesepakatan-kesepakatan itu muncul lewat berbagai integrasi regional di berbagai kawasan. Integrasi regional merupakan putaran-putaran ekonomi antar negara yang dibentuk karena kedekatan geografis.

Tabel 2

Putaran Ekonomi Regional

Sumber: Cronin, 2003: 371 dalam Yustika, Ahmad Erani (2012)

Tahun	Nama Putaran	Jumlah Negara Partisipan
1947	Jenewa	23
1949	Annency	13
1950	Torquay	38
1956	Jenewa	26

1960-1961	Dillon	26
1962-1967	Kennedy	62
1973-1979	Tokyo	99
1986-1993	Uruguay	125
2001	Doha	144*

*data pada 1 Januari 2002

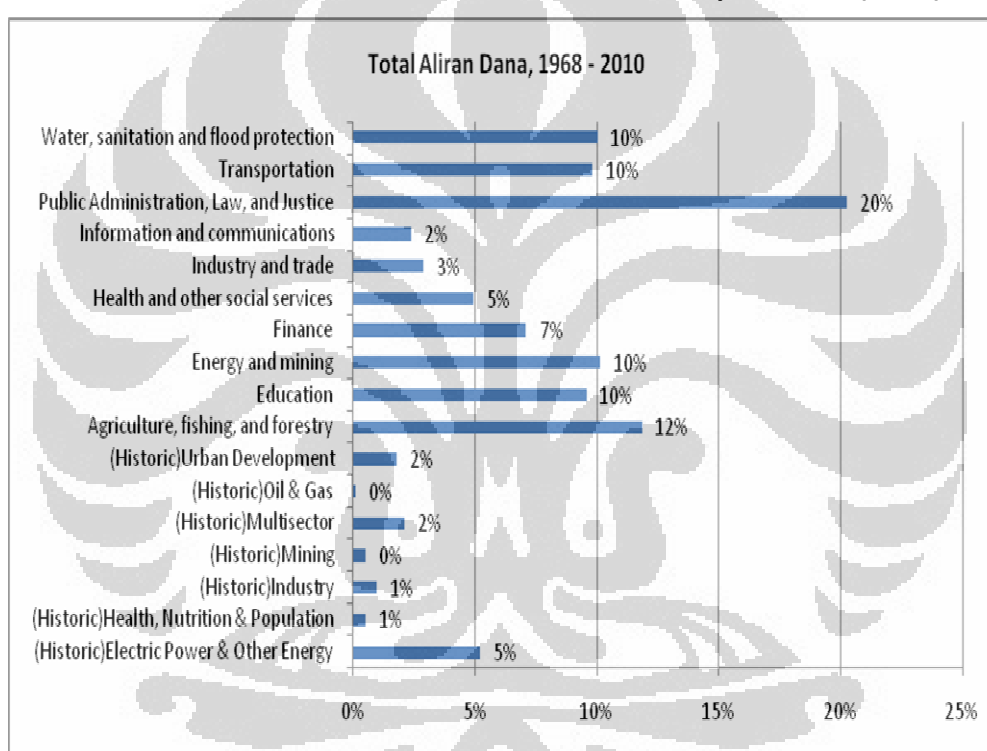
Berbagai skema neoliberalisme dipakai selama Perang Dingin untuk memenangkan ideologi liberal. Skema itu menyesuaikan kondisi ekonomi politik domestik suatu negara. Skema itu juga dalam jangka pendek tidak harus selalu sepaket dengan demokratisasi. Sejarah di beberapa negara menunjukkan justru rejim global ini mempergunakan kekuatan militer untuk memasukkan paket ekonomi liberal. Indonesia dan Chile merupakan contoh dimana liberalisme global memberangus kekuatan politik populis untuk digantikan dengan rejim militer. Sebagai dampaknya, paket-paket yang didukung IMF dan *World Bank* mungkin saja melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang terjadi di pembangunan Kedung Ombo, Jawa Tengah, yang banyak memakan korban manusia.¹⁰ Namun dalam jangka panjang, kasus Indonesia membuktikan bahwa pada akhirnya liberalisasi ekonomi itu bersandingan dengan liberalisasi politik sejak 1998.

Skema lain yang mengiringi ekspansi IMF dan *World Bank* adalah munculnya korporasi lintas negara (*multinational corporation/MNC*). Menurut Ahmad Erani Yustika (2012), kemunculan MNC sebagai raksasa baru ekonomi global berakar pada filsafat ekonomi klasik/neo klasik yaitu bahwa prinsip kebebasan individu membuat pelaku-pelaku usaha boleh melakukan ekspansi kapital ke seluruh dunia. Sektor privat inilah yang diharapkan

¹⁰ Hal ini diakui oleh World Bank Jakarta pada diskusi tanggal 3 Mei 2012 di Jakarta. Kasus Kedung Ombo membuat World Bank tidak mendukung pembangunan waduk di seluruh dunia selama lima tahun sesudah kasus itu. Hal ini disampaikan oleh George Soraya, salah satu pejabat World Bank di Jakarta pada launching penelitian World Bank oleh Universitas Atma Jaya Jakarta.

oleh ekonom liberal mampu menuntun ekonomi dunia. Secara kritis, dalam perspektif negara Dunia Ketiga, MNC merupakan ekspansi ekonomi negara kuat ke negara lemah karena pada faktanya MNC besar bercokol di negara-negara dengan ekonomi lebih mapan ketimbang negara Dunia Ketiga. Bisnis komunikasi dan hak cipta merupakan area penting MNC dalam melakukan ekspansi ini.

Tabel 3
Prosentase Aliran Dana Bank Dunia per Sektor (Total)

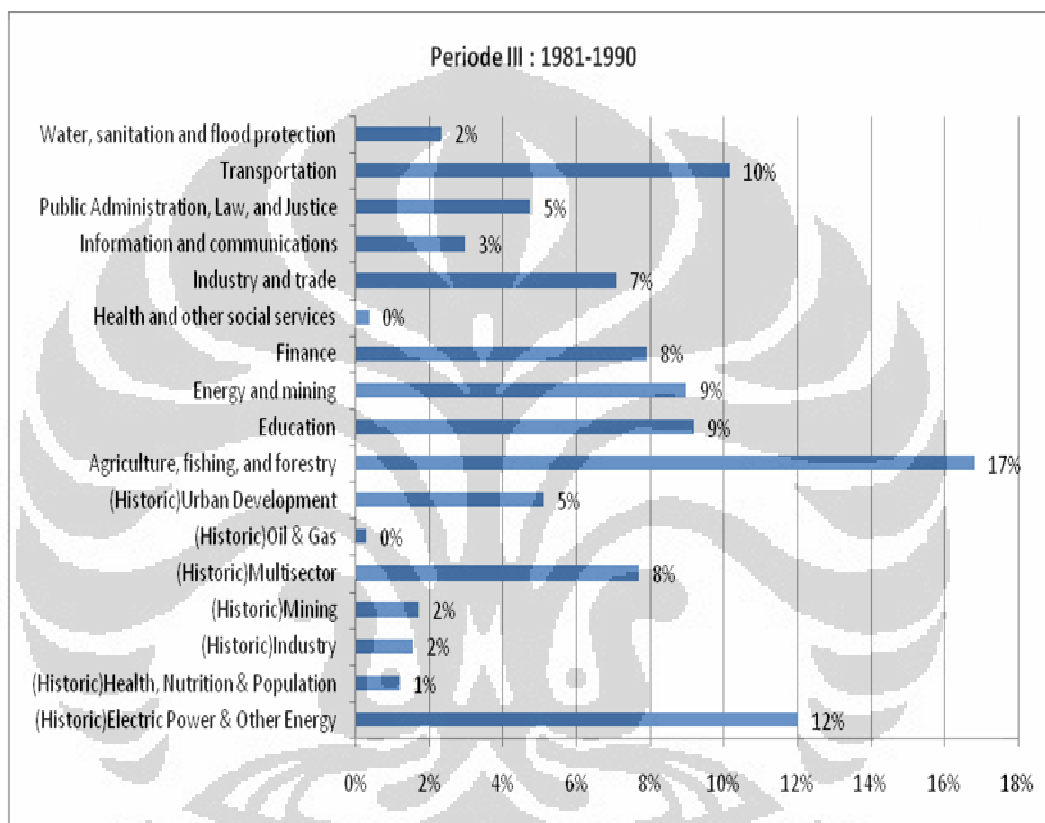


Sumber: Bank Dunia dalam Universitas Atma Jaya Jakarta, 2012: 47

Dari grafik di atas, menarik untuk dicermati bahwa proporsi aliran dana terbesar Bank Dunia bukanlah pada sektor infrastruktur atau pelayanan publik namun pada sektir administrasi, hukum, dan keadilan sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi Bank Dunia adalah menyelaraskan sistem hukum suatu negara untuk berintegrasi ke dalam sistem ekonomi liberal. Untuk Indonesia sendiri, proporsi untuk sektor ini mencapai 53% pada tahun 2001 sampai 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa sesudah

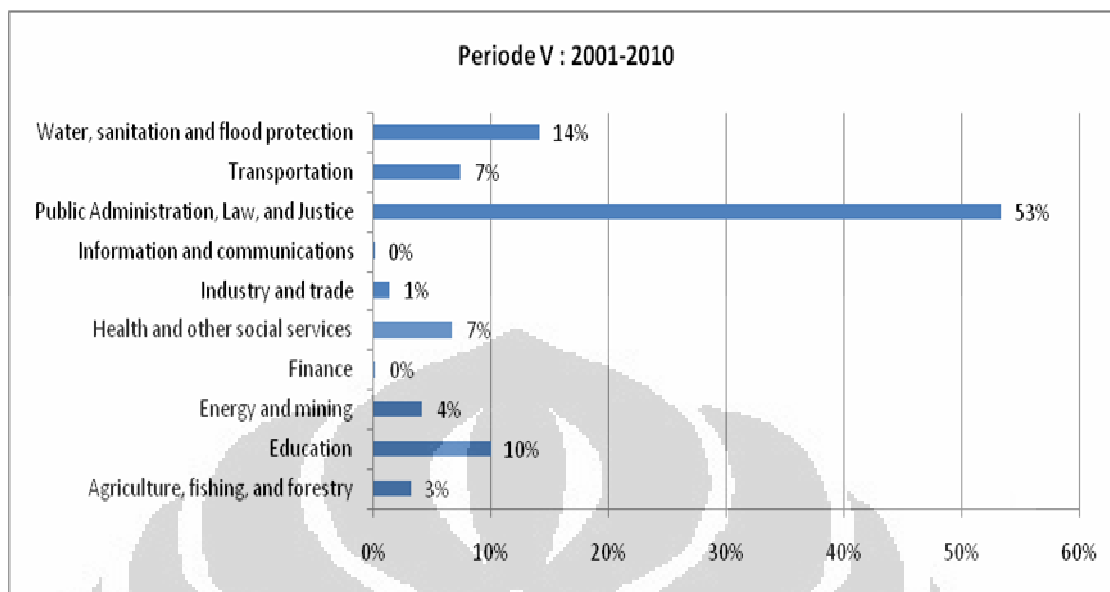
liberalisasi politik tahun 1998, dukungan untuk mengubah struktur kebijakan di Indonesia menjadi lebih penting daripada sektor pertanian seperti pada periode sebelumnya.

Tabel 3
Prosentase Aliran Dana Bank Dunia per Sektor 1981-1990 di Indonesia



Sumber: Bank Dunia, dalam Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2012: 42

Tabel 4
Prosentase Aliran Dana Bank Dunia ke Indonesia per Sektor 2001-2010



Sumber: Bank Dunia dalam Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2012: 42

4.1.4 Relasi Liberalisme, Demokrasi, dan Kapitalisme

Secara teoritik, banyak yang mengalami kebutuntuan teoritik dalam membangun konfigurasi konseptual antara liberalisme, kapitalisme, dan demokrasi. Kelompok radikal kanan sering menghubungkan demokrasi sebagai satu paket dengan liberalisme politik, sehingga menolak liberalisasi politik dianggap sama dengan menolak demokrasi. Pada faktanya, terjadi banyak variasi dimana demokratisasi politik tidak selalu berupa demokratisasi. Liberalisasi ekonomi lewat kapitalisme juga sering muncul secara otentik yang belum tentu disertai liberalisasi politik.

Francis Fukuyama, seorang pemikir liberal, adalah salah satu pemikir yang mencoba mengurai bangunan konseptual tersebut. Dalam *The End of History and the Last Man* (1992), menyampaikan thesis pokok yaitu bahwa akhir dari sejarak ekonomi politik manusia adalah kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Optimisme Fukuyama ini didasari oleh perkembangan jumlah negara liberal yang naik dari 3 negara pada tahun 1790 menjadi 61 negara pada tahun 1990 atau bertambah 58 negara dalam 200 tahun. Sebelum mencapai thesis itu, Fukuyama memaparkan argumen yang pada pada intinya

adalah bahwa rejim totalitarian kanan maupun kiri tidak akan sanggup menjaga keberlanjutan (*sustainability*) kehidupan bersama manusia karena kedua bentuk rejim itu tidak mampu melahirkan relasi sistem politik dengan masyarakat sipil yang berbasis kepercayaan (*trust*). Fukuyama berpendapat bahwa hanya dengan kepercayaan saja sebuah sistem politik akan mampu berlanjut hingga akhir jaman.

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Negara Liberal

Sumber: diolah dari Fukuyama, 1992: 93

Tahun	Jumlah Negara Liberal
1790	3
1848	5
1900	13
1919	25
1940	13
1960	36
1975	30
1990	61

Dalam hubungan antara liberalisme dan demokrasi, Fukuyama melihat bahwa walaupun keduanya bisa berjalan bersamaan, namun secara teoritis sebenarnya terpisah. Liberalisme politik secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang mengakui hak-hak tertentu individu atau kebebasan dari kontrol pemerintah. Fukuyama mengutip hak-hak yang tercantum dalam *American Bill of Rights* sebagai hak yang dijamin dalam liberalisme. Demokrasi, pada sisi yang lain, didefinisikan sebagai sistem dimana semua warga negara melakukan pembagian kuasa politik, yaitu, hak warga negara untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam politik. Pada area hak untuk

berpartisipasi secara politik inilah liberalisme politik berhubungan erat dengan demokrasi. Fukuyama mengambil definisi formal tentang demokrasi yaitu sistem politik dimana rakyat dapat memilih secara langsung dalam pemilu secara periodik, bebas dan rahasia, multipartai, atas dasar hak pilih orang dewasa yang sederajat. Fukuyama secara ketat memakai pendekatan formal ini untuk menjaga jebakan misalnya demokrasi substantive yang menurutnya merupakan justifikasi konseptual dari Lenin dan Partai Bolshevik.

Fukuyama melihat variasi penerapan liberalisme politik dan demokrasi dengan menarik. Sebuah negara bisa menjadi liberal namun tidak demokratis seperti yang terjadi di Inggris sejak abad ke-18. Sebuah negara bisa juga menjadi demokratis namun tidak menjadi liberal seperti Republik Islam Iran. Hak-hak individu dijamin di Inggris termasuk hak suara. Namun secara formal, sistem politik di Inggris bukanlah sistem yang demokratis. Sebaliknya Iran, walaupun secara formal dan prosedural memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara demokratis, tetap tidak bisa menyebut Iran sebagai negara yang secara politik liberal. Sementara dalam koridor ekonomi, Fukuyama melihat bahwa ada sikap peyoratif dimana kapitalisme langsung dihubungkan dengan liberalisme ekonomi. Fukuyama mengambil batas yang tegas dalam membuat kategori negara yang secara ekonomi liberal yaitu ketika negara tersebut melindungi dan membebaskan praktik kepemilikan pribadi dan perdagangan bebas.¹¹

Relasi antara kapitalisme dengan demokrasi juga menarik untuk dilihat dimana keduanya tidak selalu beriring secara bersamaan. Sejarah negara-negara di Dunia Ketiga membuktikan bahwa penerapan ekonomi liberal lewat kebebasan produksi dan hak terhadap kepemilikan pribadi belum tentu disertai oleh sistem politik yang demokratis. Chile di bawa Pinochet pada era 1980-an mampu tampil sebagai kekuatan ekonomi yang maju sesudah menerapkan ekonomi liberal pasca kudeta junta militer tahun 1973. Namun negeri itu dikuasai oleh rejim junta sampai tahun 1990. Hal ini mirip dengan

¹¹ Selengkapnya dalam Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, Penguin Book, New York, 1992, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2001, hal. 84-88

Indonesia. Indonesia pada era Orde Baru menampilkan variasi yang menarik dimana liberalisme ekonomi diusung sejak tahun 1970-an dan disokong oleh sistem politik yang secara formal demokratis, namun tetap susah untuk menyebut Indonesia pada era Orde Baru sebagai liberal secara politik. Formalisme demokrasi telah direkayasa dengan sangat sistemik oleh Orde Baru sehingga prinsip-prinsip politik liberal tidak dijamin.

China merupakan contoh klasik pada kasus tidak paralelnya liberalisme ekonomi dengan liberalisme politik. Meskipun tampil sebagai kekuatan ekonomi penting dunia saat ini, perkembangan ekonomi China yang luar biasa tidak disertai oleh proyek liberalisasi politik.

Pembahasan konseptual mengenai dialektika antara liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme penting untuk disampaikan sebagai penjabar dari dinamika yang terjadi dalam setiap negara secara partikular bahwa setiap negara memiliki proses sejarah yang partikular walaupun secara makro kecenderungan global membuktikan bahwa jumlah negara penganut liberal semakin bertambah. Untuk konteks Indonesia, penjelasan ini juga penting untuk melihat perkembangan ekonomi politik sejak Indonesia merdeka dimana dinamika ekonomi politik media massa ada di dalam proses sejarah tersebut.

4.1.5 Pembangunan: Pintu Masuk Kapitalisme di Indonesia

Liberalisasi bukanlah fakta yang alamiah dan bebas nilai. Liberalisasi muncul *by design* disertai oleh kepentingan di dalamnya dalam bentuk tarik-menarik kekuatan ekonomi politik domestik dan global. Untuk konteks Indonesia, penting untuk melihat bagaimana kekuatan pro pasar saat ini telah hadir sebagai orientasi tunggal dalam kebijakan ekonomi dan dianggap sebagai fakta yang alamiah. Uraian di bawah ini akan melihat bahwa kondisi ekonomi politik saat ini terbentuk dari sejarah ekonomi politik yang terencana untuk mendorong negara-negara di seluruh dunia masuk ke dalam kekuatan pasar global.

Untuk menjelaskan persoalan ini, kita perlu melihat sejarah Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Indonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang mengancam peta

politik liberal dunia dalam konteks persaingan blok liberal dan blok komunis. Beberapa fakta sudah muncul. Yang paling penting adalah bahwa Partai Komunis Indonesia di awal tahun 1960-an merupakan partai komunis terbesar kedua sesudah Uni Soviet. Dengan demikian, PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet. Fakta ini sungguh mengkhawatirkan blok liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Fakta lain adalah bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat itu sangat miskin, seperti halnya negara-negara merdeka di Selatan pasca kolonialisme. Ada adagium penting di kalangan liberal bahwa komunisme mudah sekali tumbuh dalam masyarakat miskin.

Dalam konteks persaingan Perang Dingin dan mengantisipasi pertumbuhan komunisme di negara-negara Selatan, sebenarnya Amerika Serikat sudah melakukan antisipasi pada masa pemerintahan Harry Truman tahun 1948.¹² Untuk memangkas pertumbuhan komunisme di luar Uni Soviet, Amerika Serikat menerapkan politik luar negeri yang berbasis pada bantuan modal ke negara miskin. Bantuan itu diharapkan akan menjadi awal dari kegiatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan seperti model ekonomi neo klasik WW Rostow.

Dalam pidatonya di tahun 1948, Truman membagi negara-negara di dunia ke dalam tiga kategori yaitu negara maju (*developed countries*), negara berkembang (*developing countries*), dan negara miskin (*under-developed countries*). Kategori ini diciptakan dengan memakai indikator kuantitatif seperti pendapatan per kapita. Peran negara maju adalah memperkenalkan modal sebagai investasi awal negara berkembang dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Suntikan dana itu dilakukan dalam format pinjaman yang dilakukan oleh lembaga multilateral seperti IMF dan World Bank.

Secara konseptual, strategi luar negeri pembangunan diciptakan oleh sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam *The Center for International Studies* di *Massachusetts*

¹² Selengkapnya dalam Fakhri, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. Ulasan senada ada dalam Sachs, Wolfgang, *Kritik atas Pembangunanisme*, CPSM, Bandung, 1995, dan dalam Arief, Sritua, *Menolak Pembangunanisme* (2000)

Institute of Technology (MIT). Merekalah yang memegang peranan penting dalam strategi globalisasi pembangunan di tahun 1950-an. Merekalah kelompok *think tank* yang menyuplai kebijakan liberal Amerika Serikat sampai penyusunan Konferensi Pelaksanaan Pasal IX Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1966 (*Conference of the Implementation of Title IX of The Foreign Assistance Act of 1966*). Forum inilah yang menjadi sumber interpretasi konsep pembangunan yang didominasi oleh para pemikir liberal.¹³

Secara teoritik, pembangunan ada dalam ranah mashab neo klasik yang terutama diinterpretasi ulang oleh W.W. Rostow. Rostow (1960) berpikir bahwa sejarah ekonomi masyarakat akan berlangsung secara linier ke dalam lima tahap pertumbuhan (*five stages of growth*) dari kondisi ekonomi tradisional sampai masyarakat konsumsi tinggi. Asumsi ini berasal dari sejarah ekonomi masyarakat Barat dan dianggap sebagai gejala yang universal. Menurut Rostow, pembangunan akan niscaya terjadi setelah terjadi akumulasi kapital lewat investasi industrial. Peran swasta sangat penting dalam proses ini. Bagi negara miskin, tidak ada cara lain selain melakukan pinjaman asing. Ekonomi akan tumbuh melalui pusat-pusat industri berteknologi tinggi padat modal. Kesejahteraan akan terwujud lewat mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*) dimana kesejahteraan diibaratkan sebagai proses penetasan dari pusat industri ke masyarakat luas. Terjemahan programatik dari prinsip *five stages of growth* di Indonesia adalah perencanaan pembangunan dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang berpegangan bahwa dalam dua puluh lima tahun, Indonesia sudah harus mampu berubah dari negara agraris menuju negara industri. Pelita membagi target transisi dua puluh lima tahun itu ke dalam perencanaan lima tahunan.

Untuk memengaruhi dunia Selatan, pembangunanisme juga melakukan proses reproduksi ilmu pengetahuan berdasarkan ideologi pembangunan. Reproduksi ini dilakukan dengan memberi bantuan pendidikan kepada intelektual di Negara Berkembang yang diharapkan akan menjadi agen dan *policy makers* pembangunan di negaranya. Dalam ekonomi,

¹³ Milikan dan Pye, dalam Fakih, Mansour, *Op.Cit.* hal. 44.

pendekatan yang dipakai tentu saja pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan. Di Indonesia, kita mengenal istilah *Mafia Berkeley*, yaitu sekelompok ekonom Orde Baru yang dididik di Universitas Berkeley, California. Strategi Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Orde Baru menuju masyarakat tinggal landas memakai cara berpikir yang sama dengan *five stages of growth*.

Selain ekonomi, ilmu-ilmu lain juga dibentuk sesuai koridor ideologi pembangunan. Dalam psikologi misalnya, David McLelland (1961) merumuskan pendekatan psikologi yang berorientasi pada *achievement (need for achievement/N. Ach.)*. McLelland menghubungkan psikologi dengan mentalitas pembangunan. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat konsumsi tinggi akan terjadi jika disertai oleh perubahan mentalitas yang berorientasi pada capaian. Tekanan masalah ada pada faktor individu, bukan struktur sosial.

Ilmu-ilmu lain yang didukung oleh Amerika Serikat adalah ilmu yang dinilai ada dalam koridor ekonomi pertumbuhan. Dalam ilmu pertanian, dominasi pendekatan ilmunya ada pada modernisasi pertanian yang meninggalkan pola-pola tradisional. Dalam ilmu komunikasi, pendekatan yang dominan adalah ilmu komunikasi yang berorientasi pada perubahan perilaku (*behaviour change*¹⁴) yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan masyarakat yang produktif, perlu dilakukan perubahan sosial yang berbasis individual lewat strategi komunikasi. Model teori peluru Schramm menjadi landasan teorinya. Contoh klasiknya adalah strategi komunikasi Keluarga Berencana di Indonesia yang pernah dianggap sebagai salah satu yang berhasil di dunia. Pendekatan inilah yang mendominasi hampir semua kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendekatan lain misalnya pendekatan kritis, tidak berkembang pada masa itu.

Indonesia pasca keruntuhan Soekarno dan komunisme dikuasai oleh rejim militer yang strategi ekonominya berorientasi pada ekonomi pertumbuhan. Rejim militer Orde Baru

¹⁴ Strategi komunikasi untuk perubahan perilaku mengupayakan perubahan sosial lewat perubahan konsep di ranah individual dan penciptaan *enabling environment* yang mendukung perubahan itu.

secara mutlak mengedepankan politik pembangunan yang bercirikan investasi dalam negeri berbasiskan pinjaman asing, modernisasi praktik ekonomi, dan penciptaan stabilitas politik demi mengamankan aktivitas ekonomi. Bagi pemegang kekuasaan waktu itu, pembangunan dinilai sebagai cara yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan juga menjanjikan kultivasi kekuasaan politik karena mengedepankan stabilitas politik dan membungkam kebebasan berekspresi rakyat. Inilah yang mendorong munculnya pemikiran bahwa pembangunan sudah menjadi ideologi politik Orde Baru. Di balik dalil-dalil kesejahteraan, tersimpan motivasi kekuatan politik otoriter. Secara pragmatis, pembangunan merupakan koalisi strategis antara kekuatan ekonomi politik internasional dengan kepentingan politik domestik. Janji-janji kesejahteraan merupakan sumber legitimasi penting bagi kekuasaan domestik sekaligus menjadi alasan pembenar bagi tingkah laku represif penguasa domestik. Kekuatan internasional pun cenderung membiarkan tindakan politik represif dalam ranah domestik.

Yang sebenarnya terjadi dalam pembangunan adalah introduksi dasar-dasar sistem ekonomi liberal di Indonesia. Pada masa pembangunan, proses liberalisasi ekonomi berlangsung dalam koridor pemerintahan yang kuat yang melindungi proses-proses industrial. Jika perlu, perlindungan itu dilakukan dengan menegasikan ekspresi rakyat. Pada masa Orde Baru, kita sering mendengar istilah *demi pembangunan* untuk menggambarkan pengorbanan yang harus dibayar oleh rakyat. Proses perlindungan itu dilakukan Soeharto dengan memperkuat peran militer lewat strategi Dwi Fungsi ABRI dimana militer tidak hanya diposisikan sebagai kekuatan pertahanan namun juga sebagai kekuatan politik. Inilah yang memunculkan deretan jenderal dalam tampuk pemerintahan Soeharto.

Proses bergabungnya Indonesia dalam pusaran ekonomi liberal dilakukan secara sistemik lewat strategi pinjaman asing (yang di kemudian hari terbukti menciptakan ketergantungan); bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan; kerjasama militer; dan sokongan politik terhadap rejim yang berkuasa. Sebelum proses itu, terjadi pembungkaman komunisme sampai titik yang paling rendah pada tahun 1965. Proses

BAB 5

KEMENANGAN IMPERATIF EKONOMI

DALAM LIBERALISASI MEDIA

5.1 Liberalisasi Media di Indonesia dalam Konteks Historis

Seperti sudah disinggung di atas, tiga aspek historis (sejarah kapitalisasi media, sejarah bantuan asing, dan sejarah perlawanan terhadap Orde Baru), menjadi basis material penting yang mengonstruksi sejarah liberalisasi media di Indonesia. Ketiganya memiliki dimensi ekonomi politik yang kuat dengan keterlibatan pemain-pemain internasional yang intensif. Intrusi kapitalisasi global sebenarnya sudah terjadi secara ekonomi sejak awal Orde Baru lewat developmentalisme yang dibarengi oleh otoritarinisasi pada dimensi politik. Sesudah Orde Baru, integrasi ke dalam liberalisme yang terjadi adalah intensifikasi dimensi ekonomi dengan liberalisasi politik pada saat yang bersamaan. Dengan modus seperti ini, ternyata dimensi liberalisasi politik mengalami pelemahan dan dimensi ekonomi mengalami keuntungan. Dengan asumsi bahwa kemerdekaan pers merupakan cerminan dari kualitas kedaulatan publik, gejala ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan publik mengalami penurunan sesudah liberalisasi media. Penjelasan di bawah ini akan mengurai persoalan historis tersebut.

5.1.1 Kapitalisasi Media dan Jatuhnya Media Politis

Liberalisasi dalam konteks integrasi Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global secara massif dan sistemik baru terjadi pasca Orde Baru. Akan tetapi, dalam konteks ekonomi politik, akar corak berita sebagai produk dagang sebenarnya sudah berlangsung sejak masa-masa awal sejarah pers di Indonesia. Konteks politik kolonial dan pergerakan nasional juga menjadi latar penting dalam sejarah masa itu. Disadari atau tidak, corak sejarah pers yang ada dalam ideologi pergerakan masa itu tetap mewarnai karakter pers Indonesia hingga saat ini.

Salah satu karya penting dalam tema sejarah ekonomi politik media di Indonesia adalah disertasi Daniel Dhakidae di Cornell University dengan judul *The State, The Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry* (1991). Pembahasan pada bagian ini sangat dipengaruhi cara berpikir Daniel Dhakidae beserta data yang menyertainya. Dalam disertasi tersebut, Daniel menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi politik pers di Indonesia dari jaman pergerakan sampai dengan era Orde Baru di ujung dasawarsa 1980-an. Tesis utama yang dikembangkan oleh Dhakidae adalah bergesernya modus pers sebagai ekstensi gerakan politik ke arah pers yang lebih berorientasi pada kapitalisasi media. Yang menarik adalah bahwa pergeseran itu terjadi dalam sistem ekonomi politik yang sentralistik seperti Orde Baru.

Daniel mengawali pembahasannya dengan menyebutkan bahwa berita pada awalnya bukanlah komoditas ekonomi. Berita dalam konteks publik biasanya adalah bentuk komunikasi penguasa berupa perintah atau hukuman. Namun, berita kemudian bisa dijadikan barang dagangan. Di Indonesia, awal dari berita yang diperdagangkan oleh kaum pribumi adalah surat kabar *Berita Soenda* yang diterbitkan oleh Tirta Adhi Soerjo pada tahun 1903. Tirta Adhi Soerjo melakukan mobilisasi kapital pribumi dengan menyebarkan berita. Akan tetapi, upaya ini gagal. Pada Januari 1907, Adhi Soerjo mendirikan *Medan Prijaji* di Solo dengan format mingguan yang kemudian diubah menjadi harian. *Medan Prijaji* mendapatkan keuntungan langsung dari pelanggan. Dhakidae juga menyebut bahwa *Medan Prijaji* bersifat politis dalam konteks pergerakan, satu hal yang memicu munculnya surat kabar sejenis pada waktu itu. Hubungan pers dan pergerakan secara jelas disampaikan oleh Takashi Shiraishi (1990) yaitu bahwa pers merupakan diskursus awal yang kemudian diterjemahkan ke dalam praksis politik seperti pertemuan-pertemuan politik, pidato, perjanjian, serikat buruh, pemogokan, menuju gerakan politik universal seperti pan-Islamisme dan pan-komunisme.¹ Era pers pergerakan ini dimulai pada tahun 1910-an.

¹ Takashi Shiraishi, *An Age in Motion, Popular Radicalism in Java 1912-1926*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1990

Tahap kedua dari jurnalisme politik adalah tahun 1920-an dalam payung ideologi nasionalisme. Menurut Dhakidae, pada era inilah pembelahan identitas antara Belanda dan pribumi menjadi tegas lewat istilah *sana* (Belanda) dan *sini* (Indonesia) dengan ujung kemerdekaan nasional. Jurnalisme pada masa itu dikaitkan secara instrumental dengan cita-cita kemerdekaan dimana pers menjadi alat dari cita-cita perjuangan kemerdekaan. M. Tabrani (1929), salah seorang pelopor pers nasionalis memberikan penekanan yang tegas:

... national in the broadest sense of the words. It should be the carrier (draagster) of our independence idea.... Thus (is it) neutral? No, anything but neutral. Neutrality does not fit a national press organization in a colony, tolerance yes. ...Neutral papers are not going to be welcome as our land is governed by a foreign authority.²

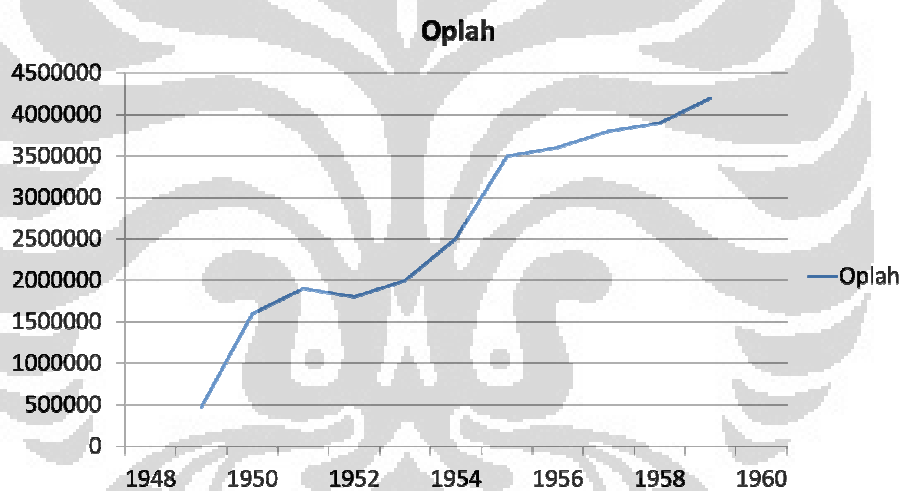
Posisi jurnalisme diletakkan secara instrumental sebagai bagian dari perjuangan politik ideologis nasionalisme. Perbedaan pers nasionalistik dengan pers pergerakan ada pada penggunaan identitas Indonesia. Pada masa pergerakan, tanah, bangsa, dan bahasa belum diberi identitas Indonesia. Sedangkan pada era nasionalisme, identitas itu sudah melekat. Dengan demikian, konsep tentang kemerdekaan juga menjadi semakin jelas dengan pembelahan yang kuat antara Belanda dan Indonesia. Pada masa ini terjadi pertalian yang erat antara jurnalisme dan politik. Kegiatan politik mendasarkan komunikasinya pada kegiatan jurnalistik. Massa politik adalah juga massa jurnalistik. Ukuran pasar jurnalistik serupa dengan jumlah massa politik. Pers secara terang-terangan menjadi corong bagi kegiatan dan cita-cita politik. Secara ekonomi, modal besar belum terlalu tertarik pada investasi di bidang pers karena politik masih bersifat elitis, sedangkan pasar mengikuti dinamika politik.

Geliat pasar baru mulai muncul pada era 1950-an sebagai akibat dari semakin membuminya aktivitas politik yang melibatkan masyarakat pada level yang paling bawah. Politik bukan lagi menjadi aktivitas kelas menengah seperti pada masa

² M. Tabrani, *Ons Wapen, De Nationaal Indonesische Pers en hare Organisatie, Uitgave van den Schrijver, Sumatrastraat, 324, Den Haag, 1929*, halaman 18-19, dalam Daniel Dhakidae, *Op. Cit.* halaman 37

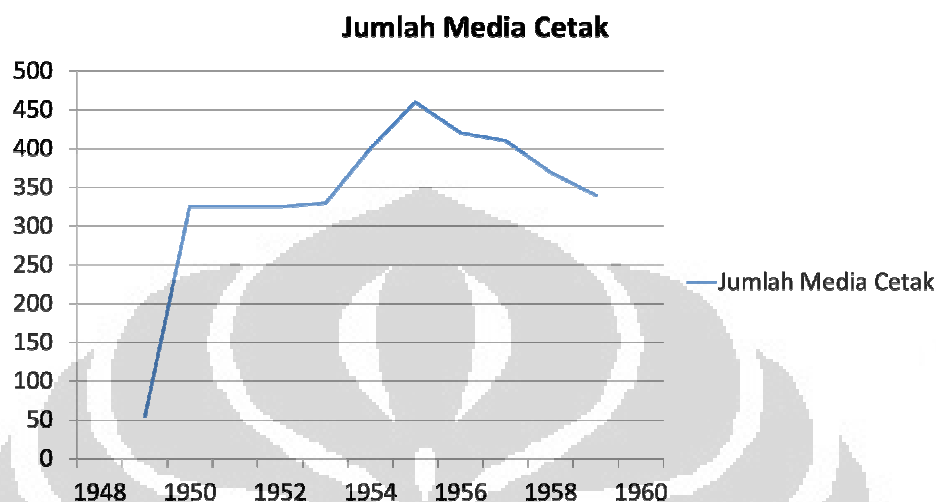
pergerakan namun sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Bahasa Indonesia juga semakin meluas sesudah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949. Hal ini menyebabkan tumbuhnya pasar pers berbahasa Indonesia. Peristiwa politik penting terjadi pada tahun 1955 ketika Indonesia mengadakan pemilu multipartai untuk pertama kalinya. Meskipun hasil Pemilu itu ditolak oleh Presiden Soekarno dan diganti menjadi Kabinet Gotong-Royong, Pemilu 1955 memberikan dampak pada pertumbuhan oplah dan jumlah media cetak.

Tabel 6
Oplah Media Tahun 1950-an



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

Tabel 7
Jumlah Media Cetak Tahun 1950-an

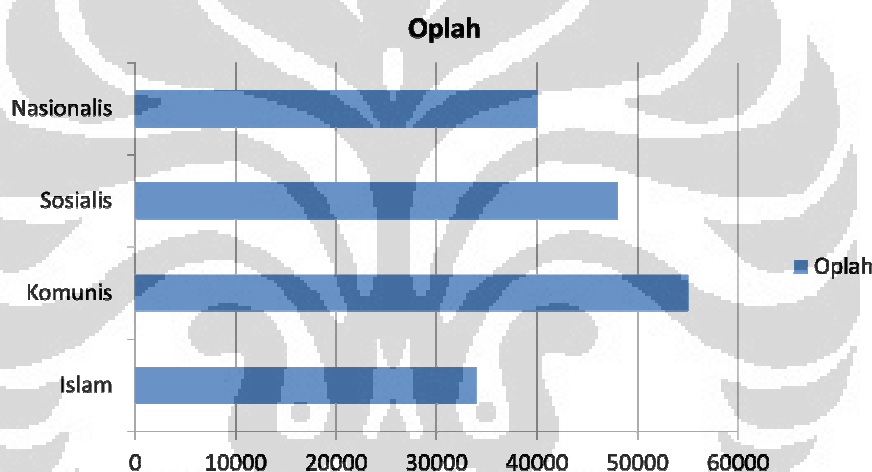


Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

Peristiwa politik penting terjadi pada tahun 1955 ketika Indonesia mengadakan pemilu multipartai untuk pertama kalinya. Meskipun hasil Pemilu itu ditolak oleh Presiden Soekarno dan diganti menjadi Kabinet Gotong-Royong, Pemilu 1955 memberikan dampak pada pertumbuhan oplah dan jumlah media cetak. Tabel di atas menunjukkan bahwa menjelang tahun 1955, terjadi peningkatan jumlah media cetak dengan cukup signifikan. Kemungkinan besar ini berhubungan dengan jumlah kontestan partai di Pemilu yang mencapai 172 partai. Dasar kemungkinan ini adalah bahwa basis pasar media cetak tetaplah afiliasi politik. Tribuana Said dalam Daniel Dhakidae mencatat bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan surat kabar *Harian Rakjat* mencatat oplah tertinggi dengan jumlah 55.000 eksemplar per hari, disusul kemudian oleh *Pedoman* (Partai Sosialisasi Independen) dengan 48.000 eksemplar, *Suluh Indonesia* (Partai Nasionalis Indonesia) dengan 40.000 eksemplar, dan *Abadi* (Partai Masjumi) dengan 34.000 eksemplar. Jumlah total oplah surat kabar partisan itu mencapai 25 persen dari seluruh oplah yang ada. Sisanya, sebanyak 75%, dibagi oleh ratusan media cetak lain

dengan prosentase tidak signifikan per surat kabarnya.³ Konfigurasi oplah media cetak pada masa ini merupakan cerminan dari kekuatan partai pada waktu itu. Kekuatan PKI memang sangat terasa pada politik nasional. PKI juga secara politik mengalami pertumbuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan cakupan *Harian Rakjat*, organ politik PKI.

Tabel 8
Oplah Media Cetak 1954 Menurut Afiliasi Politik⁴



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.*

Era tahun 1960-an adalah era yang ditandai oleh turbulensi politik yang amat tinggi. Kompetisi antar faksi politik menguat antara kelompok nasionalis, sosialis, komunis, dan Islam. Sedemikian kuatnya kompetisi itu sehingga cita-cita Nasakom Soekarno terasa utopis dan tidak pernah bisa terwujud sampai saat ini. Pada sisi yang lain, pemerintah yang direpresentasikan oleh kekuatan militer tampak sekali ingin mengontrol kehidupan

³ Dhakidae, Daniel (1991) *op.cit.* halaman 47

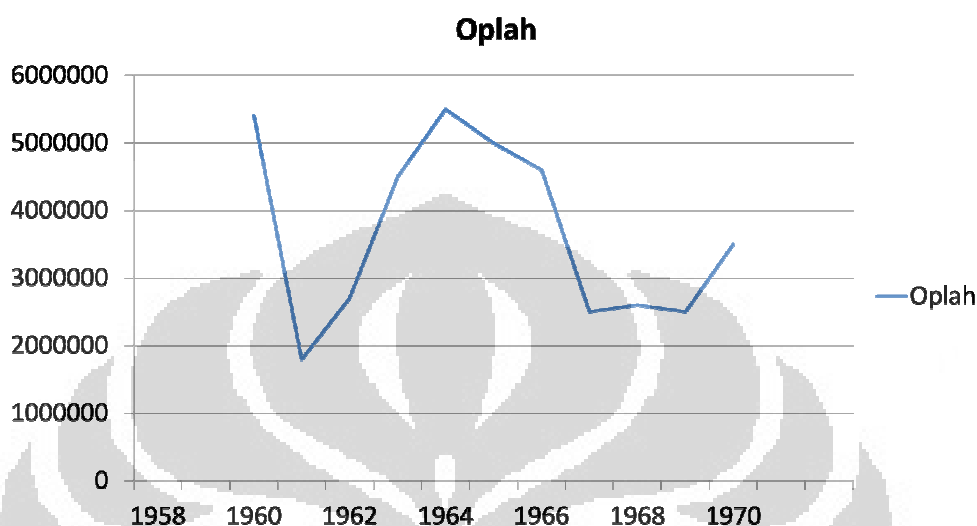
⁴ Said, Tribuana, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, dalam Daniel Dhakidae (1991) halaman 46

pers. Pada 1 Oktober 1958, otoritas militer Jakarta mengharuskan pers memiliki Surat Ijin terbit karena pertimbangan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*, darurat sipil). Selain itu, ada lagi ketentuan Peraturan Peperti No 10/1960 yang isinya adalah bahwa para peminta izin penerbitan harus menyetujui dan menandatangani pernyataan 19 pasal mendukung Manipol-USDEK. Mereka yang tidak menyetujui tidak boleh terbit. Pada 3 Februari 1961, pemerintah membredel *Harian Rakjat*, *Pedoman*, *Bintang Timur*, *Indonesia Raya*, dan *Abadi*.

Efek dari pembredelan itu sangat terasa bagi oplah koran waktu itu. Pada tahun 1961, terjadi penurunan oplah secara drastis dari kisaran 54.000 pada tahun 1960 menjadi sekitar 18.000 pada tahun 1961. Akan tetapi, peningkatan oplah segera terjadi dan pada tahun 1964 jumlahnya hampir setara dengan tahun 1960. Akan tetapi pada tahun 1964 juga terjadi penurunan oplah akibat konflik politik yang terkait dengan Barisan Pendukung Soekarno (BPS) yang oleh kelompok komunis dituduh berupaya menurunkan Soekarno. Sebagai akibatnya, sembilan surat kabar yang terafiliasi ke BPS dibredel pada tahun 1964. Menyusul tragedi 1965, giliran surat kabar komunis yang ditutup yang memuncak pada penurunan total tiras pada kisaran 24.000 pada tahun 1967. Pembubaran surat kabar komunis sangat berdampak pada kontribusi total tiras karena koran komunis merupakan koran terbesar dengan tiras mencapai 63.000 pada tahun 1965.⁵ Dengan jumlah oplah sekitar 24.000 di tahun 1967, praktis pasar pers cetak seperti kembali ke pertengahan dasawarsa 1950-an.

⁵ Crawford, Robert, *The Daily Indonesian Language Press of Djakarta*, disertasi Syracuse University, 1967, halaman 135 dalam Daniel Dhakidae, *op, cit*, 1991

Tabel 9
Pertumbuhan Oplah Media Cetak tahun 1960-an



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

Sampai pada tahap ini kita bisa memahami betapa rentannya surat kabar Indonesia. Kerentanan itu terjadi karena pasar dan sekaligus penentu hidup mati pers cetak adalah politik. Surat kabar tidak bisa berdiri secara independen namun terlibat dalam tarik-menarik ideologi partai sehingga keberlangsungan hidupnya juga ditentukan oleh dinamika kepentingan politik dan pemenangnya. Daniel Dhakidae merumuskannya sebagai berikut:

Looking at the nature of the newspapers of the fifties and the sixties, a fair conclusion can be drawn that the market size depends heavily on the production side and a shakeup in the production – closedowns of newspapers, confiscation of the printing plants – would destroy whatever had been developed before.⁶

Pada satu sisi, konsep pers perjuangan telah berkontribusi terhadap proses pergerakan di Indonesia sampai kemerdekaan. Pers tidak lepas dari dinamika politik perjuangan. Dari

⁶ Dhakidae, Daniel, *op. cit.*, 1991, halaman 49

sisi politik dan perjuangan negara bangsa, tentu saja ini positif. Akan tetapi kelekatan pers pada politik juga membuat pasar pers menjadi terbatas pada segmen politis. Pers juga menjadi rentan terhadap proses-proses politik. Pada titik yang ekstrem, instrument breidel diberlakukan oleh rezim yang merasa dirugikan secara politik oleh pers. Presiden Soekarno beberapa kali melakukan pembredelan seperti pada tahun 1958 (kasus SOB) dan 1961 yang diikuti oleh aturan pembatasan tahun 1963.

Ketergantungan pasar surat kabar pada politik telah memengaruhi secara signifikan dinamika surat kabar. Di sini juga tampak bahwa intervensi yang dilakukan negara tidak berada pada aspek *demand*, namun pada aspek produksi. Selain lewat pembredelan, intervensi lainnya adalah lewat mekanisme pembatasan penjualan lewat larangan menjual secara eceran sebelum pelanggan rutin terpenuhi oleh Departemen Penerangan. Ini karena langkanya *supply* kertas surat kabar. Regulasi ini juga membatasi pembeli eceran maksimal 30%. Aturan ini ada dalam Instruksi Departemen Penerangan No. 240/UPPG/K/63.

Kehancuran PKI segera diikuti oleh regulasi ekonomi politik yang bercorak militeristik, tidak terkecuali regulasi terhadap pers. Pada 1 Oktober 1965 Panglima Kodam Jaya Mayor Jendral Umar Wirahadikusumah hanya mengizinkan dua surat kabar yang disponsori pemerintah saja yaitu *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* untuk terbit di wilayah Jakarta. Kebijakan ini segera diikuti di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Tribuana Said (1987), media cetak yang dilarang terbit di berbagai daerah adalah, Jakarta: *Harian Rakjat*, *Kebudayaan Baru*, *Bintang Timoer*, *Warta Bhakti*, *Ekonomi Nasional*, *Gelora Indonesia*, *Ibukota*, *Huo Chi Pao*, *Chung Chengn Pao*, *Suluh Indonesia*, *Bintang Minggu*, *Berita Minggu*. Bandung: *Warta Bandung*. Semarang: *Gema Massa*. Yogyakarta: majalah *Waspada*. Surabaya: *Djalan Rakjat*. *Djawa Timoer*, *Terompet Masyarakat*, *Indonesia* (mingguan), *Generasi* (mingguan). Pontianak: *Suara Chatulistiwa*, *Kalimantan Membangun*, *Duta Nusa*. Palembang: *Fikiran Rakjat*, *Trikora*. Padang: *Suara Persatuan*. Pekanbaru: *Sinar Massa*, *Berita Revolusi*. Medan: *Harian*

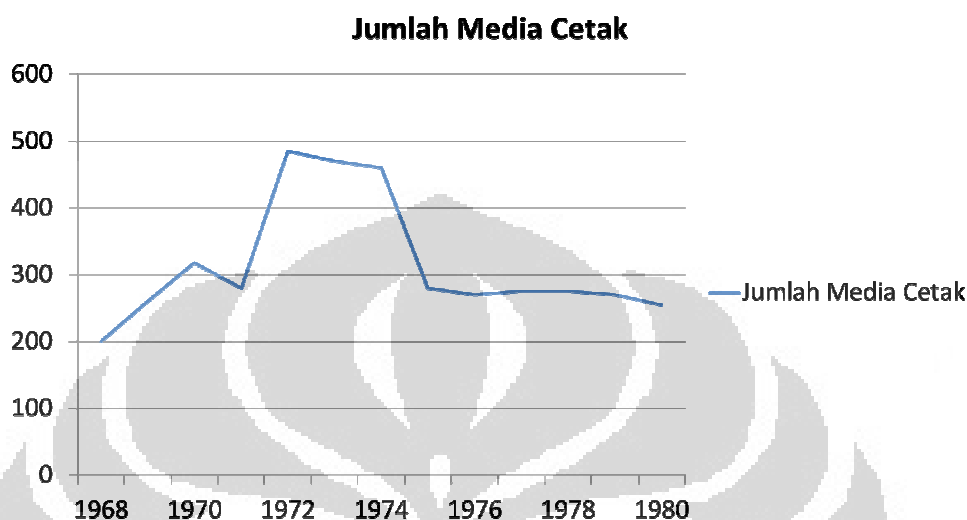
*Harapan, Gotong Rojong, Bendera Revolusi, Pembangunan, Pat riot, Angin Timur, Tavip, Bintang Rakjat.*⁷

Mengikuti situasi tersebut, 108 jurnalis yang terafiliasi dengan komunis juga dipecat. Mereka berasal dari media *Harian Rakjat* dan *Kebudajaan Baroe*. Situasi paling dramatis dialami oleh *Harian Rakjat* karena sebelum dibredel, media ini merupakan media cetak dengan oplah terbesar (63.000) mengikuti situasi politik dimana PKI merupakan partai terbesar di seluruh dunia di luar Uni Soviet pada tahun 1965.

Menurut Dhakidae, ada dua pola yang terjadi sesudah 1965. Pola pertama adalah anomali dimana pers yang disponsori militer ternyata kalah dalam hal sirkulasi jika dibandingkan dengan pers kanan. Jika mengikuti logika politik, maka seharusnya sesudah kehancuran PKI, pers-pers yang berafiliasi dengan militer akan meraih kejayaan pasca 1965. Akan tetapi yang terjadi justru anomali. Pers-pers kananlah yang memegang dominasi pasar – terutama pers Kristen dan Katolik – sampai pada dua dasawarsa selanjutnya lewat *Kompas* dan *Sinar Harapan* sejak 1967. Mereka jauh mengungguli pers-pers yang disponsori militer.

⁷ Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Deppen RI, 1987

Tabel 10
Jumlah Media Cetak pada Tahun 1970-an



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

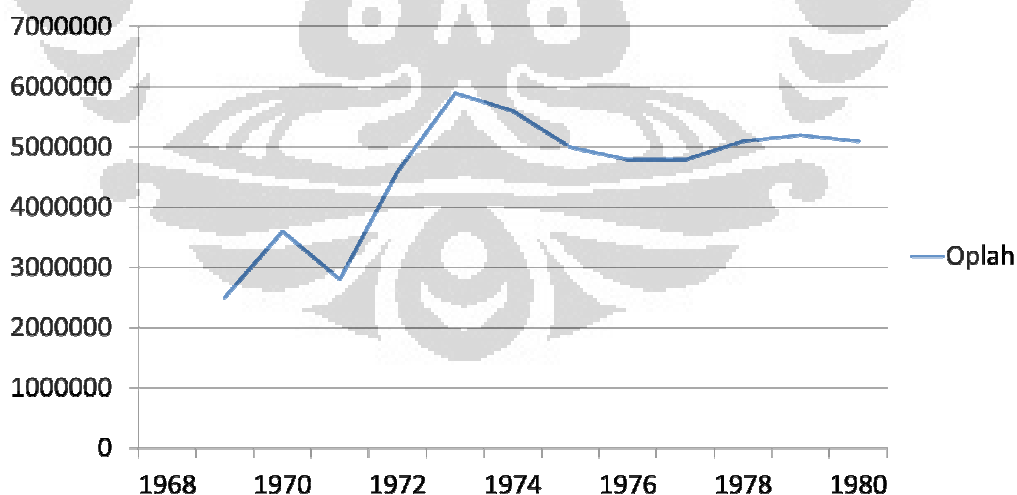
Pola kedua adalah berakhirnya fragmentasi pers berdasarkan ideologi politik. Secara formal, tidak ada lagi kebijakan bahwa media cetak menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan politik meskipun *Kompas*, *Sinar Harapan*, dan *Abadi*, masing-masing berafiliasi dengan Partai Katolik Indonesia, Partai Kristen Protestan Indonesia, dan Nahdatul Ulama. Media cetak yang ideologis justru kehilangan pembacanya akibat dari perubahan tipe jurnalisme dan perilaku khalayak. Jurnalisme pada masa ini mencatat perubahan penting karena karakter surat kabar mengalami depolitisasi seiring dengan masyarakat yang mengalami hal yang sama. Dalam perspektif pemerintah waktu itu, pesan yang dibangun kepada masyarakat kira-kira adalah: silakan kalian memperkaya diri, tapi jangan sentuh wilayah politik.

Meskipun demikian, pertumbuhan media cetak dan oplah pada era 1970-an tidak segera mengalami kemajuan berarti karena terjadi kenaikan harga kertas dari Rp 75 pada tahun 1973 menjadi Rp 245 pada Desember 1974 yang membuat kenaikan harga surat kabar

mencapai 227%. Ini membuat penurunan oplah dan jumlah media sampai pada tahun 1976 (lihat Tabel 10 dan Tabel 11). Sesudah 1976, kenaikan oplah dan jumlah media tidak segera membaik karena ada kebijakan devaluasi pada November 1978 yang membuat harga produksi membubung tinggi sehingga hanya media besar yang mampu bertahan.

Meskipun belum signifikan, konsentrasi dalam pers cetak mulai menemukan tandatandanya pada era ini. Penyebabnya adalah “seleksi ekonomi” akibat devaluasi dan perubahan teknologi cetak yang hanya mampu diakses oleh perusahaan media besar. Devaluasi rupiah membuat banyak perusahaan pers tutup. Kombinasi antara perubahan teknologi cetak, mahalnya harga kertas, dan devaluasi menyebabkan kematian banyak perusahaan pers.⁸ Hanya pers-pers yang kuatlah yang bertahan. Indikasi lainnya, ketika Soeharto membredel enam media termasuk *Kompas* dan *Sinar Harapan* pada awal 1978, ternyata tidak berdampak signifikan pada total oplah sesudah 1978.

Tabel 11
Pertumbuhan Oplah Tahun 1970-an
Oplah



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

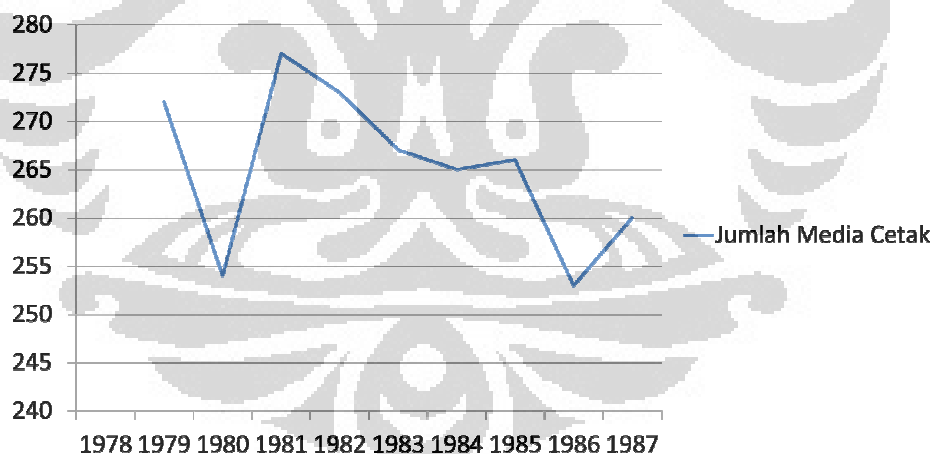
⁸ Dhakidae, Daniel, *op. cit.* halaman 62

Kini kita masuk pada era 1980-an. Meskipun secara umum ekonomi terjadi konsolidasi ekonomi di Indonesia sejak 1970-an akibat dari pinjaman asing, ada dua kejadian penting yang membuat ekonomi Indonesia terganggu yaitu penurunan harga minyak pada tahun 1982 dan 1986. Pada tahun 1982, harga minyak turun dari US\$ 38 menjadi US\$ 28 per barrel, dan pada tahun 1986 merosot menjadi US\$ 12. Karena Indonesia pada waktu itu mengandalkan pendapatan luar negeri dari sektor migas, maka penurunan itu membuat defisit pendapatan luar negeri dan pendapatan negara.⁹ Karena ekonomi negara bertalian erat dengan ekonomi media massa, maka penurunan itu juga berdampak pada penurunan jumlah media cetak pada 1982 dan mencapai titik terendah pada tahun 1986 dengan jumlah total di bawah 255 (Tabel 12)

Tabel 12

Pertumbuhan Media Cetak Tahun 1980-an

Jumlah Media Cetak



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

⁹ Richard Robison, *Authoritarian States, Capital-owning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia*, *World Politics*, October 1988, dalam Daniel Dhakidae, *op. cit.* halaman 64

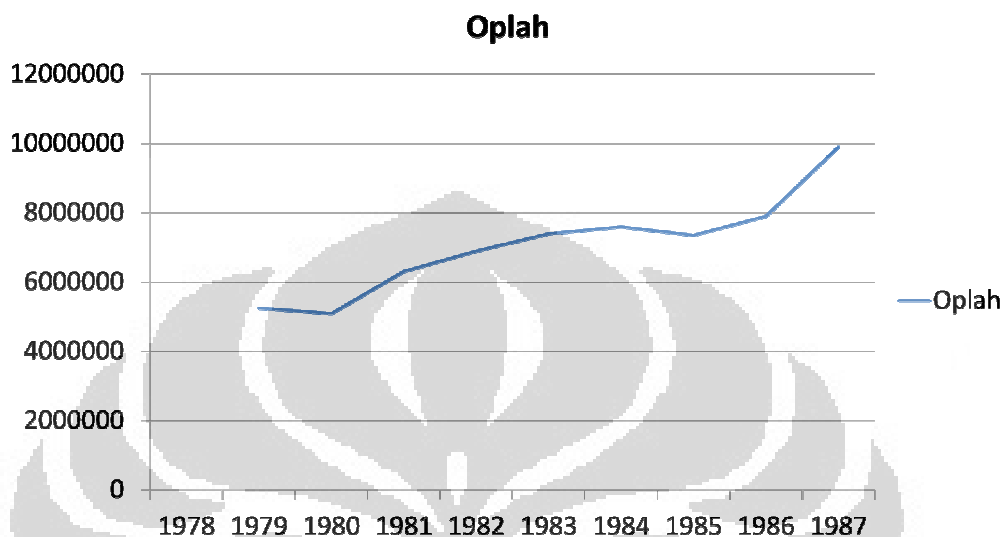
Yang menarik untuk dicatat adalah, meskipun secara umum terjadi penurunan jumlah media cetak sampai pada tahun 1986, secara umum tidak terjadi penurunan oplah media cetak secara total. Penurunan jumlah penerbit tidak berdampak pada penurunan oplah total. Kenaikan oplah terjadi pada beberapa perusahaan saja, sementara perusahaan-perusahaan lain sudah gulung tikar. Dengan demikian, kesimpulan adalah sudah terjadi gejala konsentrasi oplah pada beberapa penerbitan pers cetak yaitu pada mereka yang mampu melewati badai ekonomi penurunan harga minyak. Kita bisa mencatat beberapa pemain besar pada waktu itu seperti *Kompas* dan *Sinar Harapan* pada level nasional, serta *Pikiran Rakyat* dan *Suara Merdeka* pada level daerah.

Pada era ini juga tercatat mulai berkembangnya iklan sebagai bagian penting dalam produksi berita di media cetak. Iklan mulai berkembang pada tahun 1970-an ketika investasi asing mulai masuk ke Indonesia sebagai ikutan dari politik ekonomi Orde Baru yang mengakomodasi kapitalisme global dengan instrumen unik bernama pembangunan pada waktu itu yang sudah dibahas di Bab Dua. Pada era 1970-an, beberapa perusahaan iklan asing sudah mulai mengepung Jakarta dengan mendirikan kantor perwakilan di Singapura, Kuala Lumpur, Manila, dan Hong Kong. Mereka adalah Fortune, Dentsu, McCann-Erikson, Hakukodo, dan JWT.¹⁰

Pertumbuhan iklan membuat bergesernya logika produksi berita. Segmentasi media pada era sampai 1960-an lebih ditentukan oleh afiliasi ideologi politik, sementara depolitisasi sejak era Orde Baru membuat segmentasi itu menjadi kabur. Dengan demikian segmen pembaca menjadi lebih lebar. Dalam kondisi ini, media ingin mencapai raihan pembaca sebesar-besarnya yang berbanding lurus dengan citra di mata pengiklan. Semakin besar pembaca, semakin besar minat para pengiklan untuk memasang iklannya di media tersebut. Inilah yang menandai perkembangan media media pada era 1980-an.

¹⁰ Michael Hugh Anderson, *The Madison Avenue Connection*, halaman 247

Tabel 13
Oplah Media Cetak Tahun 1980-an



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

Lalu di manakah sikap politik media cetak pada era itu? Peristiwa pembredelan *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Pos Sore*, *Merdeka*, *Pelita*, *Indonesia Time*, dan *Sinar Pagi* pada awal tahun 1978 akibat pemberitaan aksi mahasiswa, membuat perubahan penting dalam gaya pemberitaan, terutama *Kompas*. *Kompas* lebih bergaya akomodatif terhadap Soeharto.

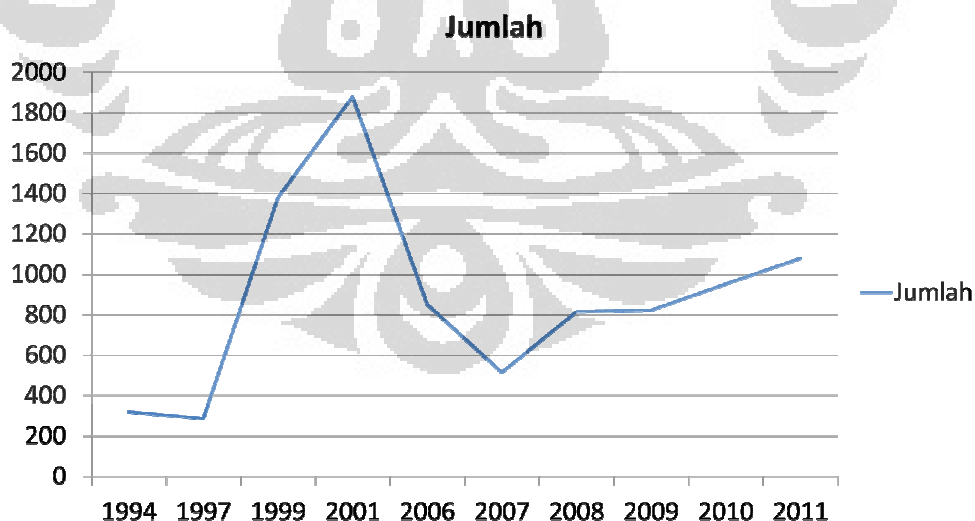
Pada era Soeharto menjabat presiden, itu adalah saat-saat menyenangkan bagi redaktur fotografi surat kabar manapun. Entah siapa yang membuat aturan, ada kewajiban tidak tertulis bahwa acara-acara Soeharto harus dimuat di halaman pertama surat kabar, atau tidak dimuat sama sekali. Artinya, kalau suatu hari Soeharto punya acara, redaktur foto koran mana pun tidak usah repot mencari foto headline (HL) karena foto Soeharto itu otomatis menjadi foto HL.¹¹

¹¹ Kesaksian Arbain Rambey, fotografer *Kompas*, dalam *Warisan (daripada) Soeharto*, Penerbit *Kompas*, Jakarta, 2002, halaman 244

Secara semiotik, pengakuan di atas mencerminkan secara umum sikap politik surat kabar pada saat Soeharto berkuasa. Kebanyakan surat kabar memilih untuk menjadi apolitis. Motivasi surat kabar dikonstruksi untuk lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi surat kabar tersebut tanpa membuat kritik terhadap sikap politik Soeharto. Jika memilih posisi kedua, maka media tersebut harus siap menanggung risiko brebel yang akan membunuh bangunan ekonomi beserta ribuan karyawannya. Kesadaran seperti ini juga mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang diarahkan untuk berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada satu sisi, dan depolitisasi pada sisi yang lain. Asumsi yang dibangun berasal dari mashab ekonomi neo klasik yaitu bahwa stabilitas politik menjadi syarat *enabling environment* bagi pertumbuhan ekonomi. Media cetak juga mengambil “jalan ekonomi” tersebut dengan mengubur dalam-dalam peranan pers dalam sejarah sebagai bagian dari ideologi politik. Masa ini boleh dikatakan terus berlangsung sampai menjelang keruntuhan Soeharto.

Tabel 14

Jumlah Media Cetak 1994-2011



Sumber: Departemen Penerangan RI, dalam Daniel Dhakidae *op. cit.* (1991)

Jika disimak tren perjalanan bisnis media cetak di Indonesia, ada beberapa catatan yang bisa disampaikan. *Pertama*, pergesernya pers politik menjadi pers industrial. Ini adalah tesis utama Daniel Dhakidae yang melihat bagaimana pers telah mengalami perubahan menjadi lebih industrial. Pola ini dimulai segera sesudah peristiwa 1965 dimana ekonomi menjadi tujuan utama Orde Baru dengan mengesampingkan dinamika politik yang mewarnai sejarah Indonesia dan sejarah pers sebelumnya. Pengambilan strategi pembangunan yang berbasiskan ekonomi neo-klasik telah membuat Indonesia menjadi lebih “stabil” secara politik demi memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga mendorong pers menjadi lebih apolitis dalam beritanya sambil menggenjot pendapatan iklan pada sisi yang lain. Media diarahkan untuk menjadi depolitis pada satu sisi, dan menjadi kaya pada sisi yang lain.¹² Logika “swastanisasi” ini cukup berhasil dilakukan dan menjadi pola dimana kapitalisme menjadi cara berpikir baru dalam dinamika media. Cara berpikir ini kemudian menjadi jembatan penting dalam ledakan ekonomi media yang terjadi sesudah UU Pers No. 40/1999.

Pada paruh waktu sejarah Orde Baru, depolitisasi media massa patut dicatat secara khusus karena depolitisasi membuat media berorientasi ekonomi yang mendorong pemberitaan untuk semakin terintegrasi dengan kepentingan iklan. Secara eksternal, tampilan media juga mendorong masyarakat untuk bersikap ekonomis dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Konsumsi menjadi tema penting dalam kajian masyarakat dan media. Dari sinilah konstruksi media sebagai pembentuk logika ekonomi capital berasal.

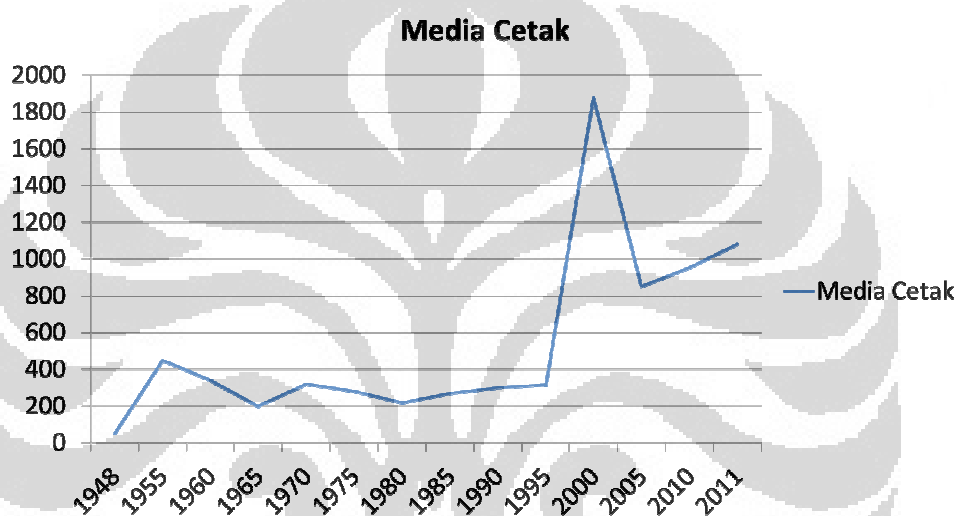
Kedua, tampak sekali bahwa UU Pers No. 40/1999 memberikan dampak pertumbuhan pers yang luar biasa besar yang secara numerik tidak pernah terjadi dalam sejarah pers Indonesia sebelumnya. Pada tahun 2000, ada sekitar 1881 pers yang terdaftar oleh Serikat Penerbit Pers. Itu belum termasuk pers cetak yang tidak sempat terdaftar. Jika dibandingkan dengan tahun 1950-an dan 1980-an, jumlah itu mencapai hampir empat kali

¹² Dalam jenis media yang lain, radio diarahkan untuk menjadi industrial dengan mewajibkan badan hukum PT bagi pengelola radio. Kebijakan Soeharto tahun 1970-an ini menegaskan peran radio di luar fungsi ekonomi.

lipat. Euforia politik pasca runtuhnya tekanan politik Orde Baru dan pembebasan media dari sistem kontrol negara menjadi penyebab meledaknya penerbitan cetak yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pers Indonesia sebelumnya.

Tabel 15

Jumlah Media Cetak 1948-2011



Sumber: Diolah dari Deppen RI, Daniel Dhakidae (1991), Dewan Pers, SPS

Akan tetapi, jumlah itu segera menurun seiring dengan mekanisme seleksi selera pasar dan penerimaan konsumen. Pada tahun 2006, jumlah pers cetak yang terdaftar di Dewan Pers hanya mencapai angka kisaran 800-an dan tumbuh lagi pada kisaran 1000 pada tahun 2010. Euforia politik membuat semua orang memproduksi media cetak tanpa pertimbangan kualitas berita dan *business plan* yang layak.

Dalam konteks sejarah pers, UU No. 40/1999 juga menjadi revolusioner pada satu hal pokok yaitu terlepasnya pers dari logika politik. Sejak masa awal berdirinya pers hingga Orde Baru, pers selalu terkait dengan politik yang menyebabkan rentannya institusi pers

baik secara ekonomi maupun politik itu sendiri. Logika instrumental bahwa pers menjadi ekstensi dari politik ditanggalkan melalui UU Pers No. 40/1999 dan institusi pers menjadi masuk ke dalam logika swa kelola dan swa sensor. Tidak lagi dikenakan pembredelan pada media, tidak ada mekanisme SIUPP, sistem evaluasi kinerja etis pers terlepas dari negara namun berpindah ke Dewan Pers, dan bebasnya jurnalis berserikat di luar ranah *apparatus* ideologis.

UU No. 40/1999 juga menjadi monumen dimana pebisnis media asing dimungkinkan masuk ke Indonesia. Yang berkembang kemudian adalah pola waralaba (*franchise*) yang jumlahnya kian hari kian bertambah.¹³ Inilah bentuk konkret dari integrasi sistem pers nasional ke dalam sistem global yang didorong oleh perluasan pasar kapitalisme global. Yang menarik untuk dicatat, baik Dewan Pers maupun SPS tampaknya tidak membuat perhatian khusus mengenai media waralaba itu. Dalam pendataan tahunan dua lembaga itu, tidak ada kategori media waralaba.

5.1.2 Wacana Anti Otoritarianisme Orde Baru

Pasca 1998, selain euforia politik, wacana anti Orde Baru dan anto Soeharto membuat perubahan-perubahan di level perundangan. Indonesia dengan segera meratifikasi beberapa regulasi yang relevan dengan demokrasi, misalnya UU Pers No. 40/1999 yang secara mendasar merupakan kebalikan dari UU Pers No. 21/1982 produk Orde Baru. UU Pers No. 40/1999 merupakan produk pemerintahan Habibie. Mulai era Habibie sampai 2004 tercatat sebagai era dengan rata-rata produksi UU tertinggi dibandingkan dengan masa jabatan dengan pengesahan RUU menjadi UU sebanyak 175.¹⁴ Habibie juga mengesahkan beberapa UU penting seperti UU No. 5/1999 tentang Anti Monopoli, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi manusia. Wacana anti Orde Baru merupakan

¹³ Belum ada studi khusus tentang perkembangan media waralaba di Indonesia. Penulis belum melakukan pendataan karena data pasti tidak ditemukan baik di Dewan Pers maupun SPS.

¹⁴ <http://parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpr>. PSHK mencatat, tingginya kuantitas belum tentu seiring dengan kualitas UU.

legitimasi utama *structural adjustment* agar Indonesia masuk dalam orbit demokrasi global. Bentuk konkretnya adalah perubahan UU menjadi lebih selaras dengan liberalisme.

Yang pertama kali dilakukan Habibie adalah mereformasi sistem Pemilu agar lebih demokratis lewat UU Partai Politik, UU Pemilu, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk). Hasilnya adalah terpilihnya DPR dan Presiden Abdurrachman Wahid lewat prosedur Pemilu demokratis sejak 1955 pada tahun 1999. Gus Dur kemudian mengeluarkan PP No. 37/2000 untuk membubarkan Departemen Penerangan.

Wacana anti Orde Baru ini berkembang pesat sejak awal 1990-an di kalangan mahasiswa dan LSM. Gerakan bawah tanah bermunculan lewat forum diskusi dan media bawah tanah. Secara teoritik, berkembang pula diskursus polaritas *civil society-political society* dalam¹⁵ tradisi hegemonian Gramsci. Cara pandang hegemonian dinilai paling tepat sebagai pisau analisis Orde Baru. Ini juga berkaitan dengan suburnya gerakan mahasiswa kiri di era itu.

Dalam konteks perlawanan media terhadap Orde Baru, yang patut dicatat adalah peristiwa pembredelan *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada 21 Juni 1994. Peristiwa ini menjadi awal penting bagi gerakan media melawan Orde Baru di Indonesia. Goenawan Mohamad kemudian memotori deklarasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Sirnagalih, Bogor, pada tanggal 7 Agustus 1994 bersama 55 jurnalis lain sebagai bentuk perlawanan terhadap pembredelan tersebut. Peristiwa ini terkenal dengan nama *Deklarasi Sirnagalih*. Substansi *Deklarasi Sirnagalih* jelas-jelas bertentangan dengan karakter Orde Baru. (selengkapnya di Lampiran 1). Selain itu, Goenawan Mohamad juga mendirikan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada tahun 1995 yang menjadi cikal bakal Komunitas Utan Kayu.

AJI dan ISAI penting untuk dicatat karena kedua organisasi ini bahu-membahu dalam menerbitkan *Suara Independen*, sebuah majalah bawah tanah yang berisi berita-berita

kebobrokan Orde Baru. *Suara Independen* diedarkan ke banyak kota dengan mekanisme distribusi bawah tanah terutama ke kalangan mahasiswa dan LSM. Di beberapa kota yang susah terjangkau, distribusi dilakukan dengan fotokopi. Goenawan Mohammad juga berhubungan dekat dengan kelompok perlawanan lain dari kelompok mahasiswa seperti Parta Rakyat Demokratik (PRD).

Salah seorang narasumber, Bimo Nugroho, yang pada awalnya aktif di ISAI dan juga aktif di PRD menuturkan bagaimana konsolidasi organisasional waktu itu dilakukan. Karena kondisi dalam tekanan rejim, bantuan untuk organisasi misalnya dana, harus dibawa secara manual dana bentuk tunai.¹⁶

Di luar Jakarta, wacana tentang perlawanan terhadap Orde Baru juga kuat terutama di kelompok mahasiswa di Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Kegiatan yang dilakukan adalah penerbitan kampus, kelompok diskusi, pengorganisasian warga miskin dan buruh, pelatihan, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini merupakan latar dari peristiwa-peristiwa penting selanjutnya seperti peristiwa penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996 dan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Wacana anti Soeharto merupakan wacana penting segera sesudah 1998 dalam hal reformasi sistem hukum dari otoriter ke liberal, termasuk di dalamnya adalah kelahiran UU Pers No. 40/1999 yang praktis merupakan antitesis dari sistem Orde Baru. Wacana anti otoritarianisme Orde Baru juga penting sebagai legitimasi bagi perubahan regulasi pada sektor-sektor lain, seperti pemisahan TNI dan Polri, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, revisi UU Pemilu, dan lain-lain.

Akan tetapi, menarik untuk dicatat bahwa tidak semua aktivis memahami adanya agenda liberalisasi dalam gerakan-gerakan itu. Christiana Chelsia Chan menuturkan bahwa di kalangan aktivis pada waktu penyusunan UU Pers dan UU Penyiaran, wacana dominan yang berkembang adalah bahwa seluruh gerakan itu dalam rangka memperbaiki sistem yang lama diterapkan Orde Baru menuju sistem yang demokratis. Demokratisasi menjadi

¹⁶ Wawancara dengan Bimo Nugroho, Jakarta, 5 April 2012

kata kunci dari cita-cita masyarakat sipil waktu itu.¹⁷ Christiana Chelsia Chan pada tahun 1999 aktif di *Internews*, sebuah LSM Amerika yang memfasilitasi penyusunan UU Pers.

Penulis yang pada waktu itu aktif di gerakan mahasiswa di Yogyakarta juga merasakan bahwa semangat anti Orde Baru dan norma demokratisasi lebih merupakan amunisi psikologi politik gerakan mahasiswa pada umumnya, daripada liberalisasi. Agenda liberalisasi politik bukan merupakan wacana yang disadari pada waktu itu.

Perubahan sistem pers terjadi secara radikal pada tahun 1999 lewat UU Pers No. 40/1999 yang memfalsifikasi sistem pers sebelumnya lewat UU Pers No. 21/1982. Perubahan mendasar dalam UU Pers No. 40/1999 adalah pembebasan sistem perijinan lewat Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), penghapusan sistem breidel dan sensor, serta berdirinya Dewan Pers sebagai lembaga etik independen yang bertugas mengawasi kinerja etik dan profesional media.

Yang patut juga dicatat dalam proses tumbanganya Soeharto adalah televisi swasta pada era itu yang isi beritanya cenderung pro terhadap reformasi. Padahal secara struktural, beberapa televisi swasta seperti RCTI adalah milik keluarga dan kroni Soeharto. Hal ini memunculkan konfigurasi masalah menarik terkait kapitalisme semu yang akan di bahas di bagian selanjutnya.

5.1.3 Liberalisasi Media dan Perubahan Paradigma Bantuan Asing pada Sektor Media

Persoalan bantuan asing perlu disampaikan dalam pembahasan mengenai liberalisasi media terutama karena gerakan liberalisasi media oleh masyarakat sipil didukung secara finansial oleh lembaga bantuan asing. Bahkan dalam “jaman perjuangan” bawah tanah di penghujung Orde Baru, lembaga seperti USAID telah memberikan bantuan kepada masyarakat sipil yang bertujuan menjungkalkan Orde Baru. Akan tetapi, potret

¹⁷ Wawancara dengan Christiana Chelsia Chan dan Dyah Ryadi, Jakarta, 13 Januari 2012

selanjutnya menunjukkan bahwa sesudah agenda liberalisasi tuntas dilaksanakan, perhatian lembaga banuan asing pada sektor media cenderung menurun.

Ketidaksadaran akan agenda liberalisasi di kalangan masyarakat sipil dan aspek integrasi ke dalam kapitalisme global merupakan gejala yang spesifik terjadi dalam pola liberalisasi media pada era 1990-an. Jika ditarik pada sejarah bantuan asing ke belakang, pola ini (demokratisasi) menjadi corak baru dalam strategi liberalisasi dengan instrumen bantuan asing. Masyarakat sipil yang dalam konteks domestik menjadi pemain strategis dalam demokratisasi, tidak bisa terlepas dari konteks strategi liberalisasi global yang dimainkan oleh para pemberi bantuan asing.

Tabel 3 dan Tabel 4 pada Bab Empat menjelaskan dengan gamblang bagaimana strategi itu terjadi. Pada era 1980-1990-an, dominasi dana asing yang masuk ke Indonesia lewat Bank Dunia didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebanyak 17%. Akan tetapi pada era sampai 2010, persentase terbesarnya bergeser ke sektor hukum, keadilan, dan administrasi publik sebesar 53%. Perubahan itu menarik untuk dilihat dari sisi bagaimana bantuan asing telah mengalami perubahan paradigma sejak tahun 1947, paska Perang Dunia Kedua.

Jika kita tengok ke belakang, sejak Marshall Plan diagendakan pada tahun 1947-1951 oleh Amerika untuk membantu ekonomi Eropa paska Perang Dunia II, paradigma bantuan asing berfokus pada investasi dimana dana diberikan untuk menambah dana investasi suatu negara agar ekonomi tumbuh. Monique Kremer (2009) membuat istilah paradigma pertama dalam sejarah bantuan asing ini sebagai *financial push paradigm*. Bantuan keuangan pada paradigma ini berfokus pada argumen bahwa kemajuan ekonomi bisa diraih dengan melakukan investasi agar industri berjalan, infrastruktur tersedia, pendidikan berjalan, tenaga terserap, dan ekonomi bergerak. Kemiskinan dianggap sebagai akibat dari tiadanya industri. Paradigma ini menurut Kremer berhasil dilakukan untuk memperbaiki ekonomi Eropa namun tidak menunjukkan kemajuan berarti di kawasan lain, misalnya Afrika.

Afrika dan pemegang bantuan utama dunia waktu itu - IMF dan *World Bank* – kecewa dengan hasil dari paradigma bantuan asing pertama karena industrialisasi ternyata tidak mampu memunculkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup lewat pendidikan dan kesehatan. Pemikiran ini diwakili oleh pemenang Nobel ekonom Gunnar Myrdal (1968) yang menekankan perlunya paradigma ekonomi sosial. Pembangunan ekonomi lewat industrialisasi harus disertai oleh redistribusi deviden ekonomi melalui peningkatan kualitas kehidupan, utamanya kesehatan dan pendidikan.

Sebagai dampak dari sejarah pinjaman asing yang dimulai tahun 1950-an, terjadi ledakan hutang luar negeri di banyak negara pada era 1980-an. Bank-bank sentral di Barat menaikkan bunganya untuk menurunkan inflasi. Bank sentral Amerika, FED, pertama kali melakukannya pada Oktober 1979. Ini segera disusul oleh Mexico yang mengumumkan tidak bisa membayar hutang pada Agustus 1982. Negara-negara di kawasan Afrika dan Latin pun mengeluhkan hal yang sama.¹⁸

Diagnosis yang diberikan oleh ekonom-ekonom Barat pada era ini adalah bahwa struktur kebijakan negara terhadap ekonomi makro telah membuat pasar tidak leluasa bergerak karena hukum domestik dan terlalu banyak intervensi pemerintah pada ekonomi. Terkait dengan hal ini adalah subsidi negara pada sektor kebutuhan publik. Rekomendasinya dengan demikian jelas: mengurangi peran negara pada aktivitas ekonomi. Hukum harus diubah agar lebih pro terhadap pasar melalui *structural adjustment*. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bisa disediakan oleh pasar sehingga negara harus melakukan privatitsasi pada sektor ini. Kremer menyebut paradigma ini *internal and external market paradigm with little role for the state*.

Inilah era penting dimana penetrasi pasar besar-besaran terjadi sejak era 1980-an di banyak negara sedang berkembang. Prinsip ini juga mengangkat kita pada doktrin liberalisme pada wilayah ekonomi untuk mengurangi peran negara seperti tertuang dalam Washington Consensus tahun 1994. Pada era ini pula, tekanan ekonomi politik global

¹⁸ Kremer, Monique, *Doing Good or Doing Better, Development Policies in A Globalizing World*, Scientific Council for Government Policy, The Hague, 2009, halaman 16

terhadap dinamika media massa Indonesia dimulai yang berujung pada pembukaan televisi swasta pada tahun 1987. Pembukaan Indonesia terhadap pasar bebas dan privatisasi berbagai sektor – dimulai perbankan pada tahun 1984 - juga marak dimulai pada dasawarsa 1980-an.¹⁹

Pada era 1990-an, muncul kesadaran baru di kelompok pemberi bantuan di Barat yang menemukan bahwa perluasan pasar memerlukan pemerintahan yang akutabel, transparan, tidak korup, dan efektif. Maka resep ini diinjeksikan kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada era inilah istilah *good governance* marak dan menjadi bagian dari pidato-pidato politik pemimpin negara (termasuk SBY). Paradigma ini disebut *governance paradigm*. Negara-negara donor selalu mendikte resep berdasarkan diagnosis yang mereka buat sendiri.

“Excuse me Mr. President, last decade we indeed said it was important to marketize state functions, but now we think it is important to have a well-functioning state, which is accountable and transparent. It would also be a good idea to combat corruption and become democratic, if you still want to be entitled to our money.”²⁰

Kremer menggarisbawahi bahwa proses pemberian bantuan yang didasarkan pada asumsi, diagnosis, dan sejarah ekonomi Barat tanpa menimbang aspek partikular tiap negara yang berbeda-beda. Empat paradigma di atas mendasarkan pada prinsip bahwa perbaikan ekonomi seluruh dunia bisa dilakukan melalui satu peluru ajaib (*magic bullet*) yang bisa dipakai ke seluruh negara. Inilah kritik penting Kremer pada bantuan asing. Rekomendasinya adalah memberikan bantuan asing dengan melihat aspek partikular setiap kawasan dengan resep yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

¹⁹ Agenda privatisasi secara kritis sering dianggap berlawanan dengan semangat konstitusi terutama pada aspek layanan publik. Kewajiban negara untuk menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan digeser oleh pasar sehingga hak individu sebagai warga negara digeser menjadi konsumen. Dengan demikian warga miskin bisa kehilangan akses terhadap layanan dasar. Liberalisasi ekonomi juga berseberangan dengan semangat ekonomi nasional (Vincent Mosco, 2009).

²⁰ Kremer, Monique, *Op. Cit.*, halaman 18

Ada beberapa catatan yang bisa diambil dari empat paradigma bantuan asing ini jika dilihat pada konteks sejarah komunikasi dan media massa di Indonesia. *Pertama*, dalam konteks dinamika komunikasi dan media massa keempat paradigma di atas penting sebagai panduan untuk melihat corak ekonomi politik media pada setiap periode. Proses komunikasi di Negara Berkembang selalu dilibatkan dalam setiap paket bantuan ekonomi sehingga corak, regulasi, dan karakter komunikasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh paradigma bantuan asing. Pada era pembangunan di bawah Orde Baru, paradigma ekonomi dominannya adalah pertumbuhan yang termasuk dalam *financial push paradigm*, mengikuti kisah sukses Eropa. Pembangunan dalam era Orde Baru adalah manifestasi dari paradigma ini dimana corak komunikasi dan jurnalistiknya dipaksa untuk mengikuti paradigma ini. Istilah *pers pembangunan* mengindikasikan bahwa dinamika jurnalistik disubordinasikan ke dalam arena pembangunan saja sehingga corak pers di luar itu dianggap subversif. Pembredelan *Kompas* pada 25 Januari 1978 menjadi contoh kasusnya.

Contoh lain adalah dominasi paradigma komunikasi *behavior change* yang diusung oleh John Hopkins University bersama BKKBN untuk mengerem jumlah penduduk melalui strategi KB di Indonesia. Komunikasi diposisikan sebagai instrumen untuk perubahan sosial dalam jalur modernisasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang berlebih tidak efisien untuk pertumbuhan ekonomi. Strategi komunikasi untuk KB di Indonesia pernah dianggap sebagai strategi komunikasi terbaik pada eranya.²¹

Kedua, dengan premis bahwa dinamika komunikasi di Negara Berkembang selalu terkait dengan paradigma bantuan asing, maka demokratisasi media pada era 1990-an juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma bantuan asing tersebut. Pada konteks ini pula wacana demokratisasi pada era 1990-an di penghujung Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari paradigma yang dipakai bantuan asing. Gerakan demokratisasi media, kebebasan berpendapat dan berserikat untuk jurnalis pada era 1990-an juga tidak bisa dilepaskan dari corak bantuan asing. Gerakan-gerakan jurnalis dan media pada era 1990-an di

²¹ Lawrence Kincaid, *Asas-Asas Komunikasi Antar Pribadi*, LP3ES, Jakarta, 1981

Indonesia juga tidak bisa lepas dari peran donor asing seperti USAID yang tidak mungkin lepas dari paradigma bantuan asing pada waktu itu. Dalam kasus ini, kelompok-kelompok reformis pun mendapatkan bantuan tersebut. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) menerima bantuan dari USAID baik melalui skema resmi maupun bawah tanah untuk menghindari tekanan politik Orde Baru. Hal ini dikonfirmasi oleh nara sumber Rita Nasution, manajer keuangan ISAI. Penerbitan media alternatif *Suara Independen* yang historis itu juga masuk dalam skema ini. Rita Nasution menuturkan bahwa USAID membantu ISAI sejak pendiriannya tahun 1996 termasuk untuk kegiatan bawah tanah. Untuk keperluan audit, karena alasan politik USAID tidak meminta penjelasan detail kegiatan, sehingga auditor juga tidak mencantumkan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai oleh USAID. Namun Rita memastikan bahwa pembiayaan *Suara Independen* berasal dari USAID. Kode pembukuan untuk kegiatan ini adalah DR (Dana Revolusi) dengan sebutan sandi *Unit 2* untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang didanai USAID.²² Jumlah dana yang masuk dari USAID ke ISAI setara dengan kira-kira Rp 1,15 miliar. *Program Officer* USAID untuk media pada waktu itu adalah Novalina J. Kusdarman yang sekarang bermukim di Amerika Serikat.

Tabel 16

Donasi USAID ke ISAI

NAMA KONTRAK	WAKTU	NILAI (rupiah)
USAID - Freedom of the Press No. 497-0385-G-00-5027-00	12/08/95-11/08/98	1.158.177.200
USAID - Freedom of the Press (modifikasi) No. 497-0385-G-00-5027-00	08/10/97	727.000.000
USAID -- Follow-on & Crash Program	15/7/98-15/7/2000	7.395.200.000

²² Wawancara dengan Rita Nasution, 24 Mei 2012

No. 497-G-00-98-00022-00	(ada bagian yang selesai lebih dulu)	
USAID -- Media Watch	17/05/99-17/05/02	9.542.660.000
No. 497-G-00-99-00020-00		

Sumber: Memorandum Laporan Pertanggungjawaban Kerja ISAI 2001-2006

Narasumber Eko Maryadi (pendiri dan ketua AJI 2011-2014) menuturkan bahwa *Suara Independen* merupakan lanjutan dari majalah bawah tanah *Independen* yang mulai diterbitkan secara mandiri oleh kalangan jurnalis pada tahun 1994 dimana Eko Maryadi menjadi salah satu pengelola bersama kelompok jurnalis Bandung. Pendanaan dilakukan secara swadaya melalui penjualan kepada tokoh-tokoh kritis seperti WS Rendra, Eros Djarot, Sri Bintang Pamungkas, dosen, mahasiswa, dll. Merekalah yang menyubsidi secara sukarela. Pada 16 Maret 1995, Eko Maryadi ditangkap dan dipenjara rezim Soeharto bersama Ahmad Taufik dan Danang. Pada tahun 1996, terbit *Suara Independen* sebagai lanjutan dari *Independen* yang dimotori kelompok Utan Kayu/ISAI dan Goenawan Mohammad dengan skema pendanaan dari USAID. Janet Steele (2007) yang membuat riset tentang ISAI atas sponsor USAID juga mengonfirmasi peran USAID dalam proses ini.

Selain ISAI, USAID pada masa itu juga mendukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Indonesia Media Law and Policy Center* (IMLPC), Visi Anak Bangsa, Yayasan SET, Lembaga Studi Pers dan Informasi (LSPP). ISAI juga memiliki jaringan LSM di daerah yang disebut sentra yang terdiri dari KIPPAS Medan, LeSPI Semarang, LSPS Surabaya, dan ELSIM Makassar. Kelompok LSM ini kemudian membentuk *Koalisi Media untuk Pemilu* tahun 2004 yang didanai USAID. LSM Amerika, *Internews*, juga turun langsung ke Indonesia untuk mengadvokasi UU Pers dan UU Penyiaran, melakukan training radio, pelatihan jurnalistik, dan lain-lain. Sesudah proyek *Koalisi Media untuk Pemilu 2004*, praktis tidak ada lagi proyek yang didanai langsung oleh USAID kepada LSM lokal. Pola

yang kemudian dipakai adalah memberikan kontrak kepada lembaga swasta Amerika sendiri untuk melakukan kegiatan. Mereka ini disebut kontraktor, seperti Research Triangle Institute, Chemonics, John Hopkins University, dll. Setelah UU Pers dan UU Penyiaran disahkan, terjadi perubahan penting dalam pola pembiayaan donor-donor besar terutama USAID. Advokasi untuk perubahan kebijakan hanya difokuskan pada pengesahan UU Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan tahun 2008. Sementara program-program advokasi media menjadi minimal. Pola pendanaan untuk media lebih mengarah pada *media support* untuk isu-isu sektoral, misalnya jurnalisme untuk lingkungan, jurnalisme untuk *good governance*, dan sejenisnya. Hal ini karena proyek liberalisasi lewat *structural adjustment* kebijakan media sudah dianggap selesai. Senada dengan yang disampaikan Kremer, USAID di Indonesia juga kemudian memfokuskan programnya pada aspek *governance* melalui proyek *Democratic Reform Support Program* (DRSP) dan *Local Government Support Program* (LGSP) dimana LGSP mengelola dana US\$ 60 juta, jumlah yang sangat tinggi untuk ukuran proyek USAID saat itu.²³

Proses liberalisasi media di Indonesia terjadi dalam dua tahapan sejarah. Tahapan pertama adalah tahapan paradigma perluasan pasar era 1980-an yang memunculkan privatisasi televisi Indonesia tahun 1987. Tahapan kedua terjadi pada era paradigma *good governance* dan demokratisasi era 1990-an dimana masyarakat sipil terlibat aktif melalui skema bantuan asing. Bahkan aktivis kiri seperti PRD dan Aldera Bandung pun tidak bebas dari jaring-jaring pendanaan ini melalui Utan Kayu. Inilah proses dimana agenda demokratisasi yang diusung Barat bertemu dengan kepentingan domestik masyarakat sipil – termasuk gerakan kiri - dalam konteks perlawanan terhadap Orde Baru.

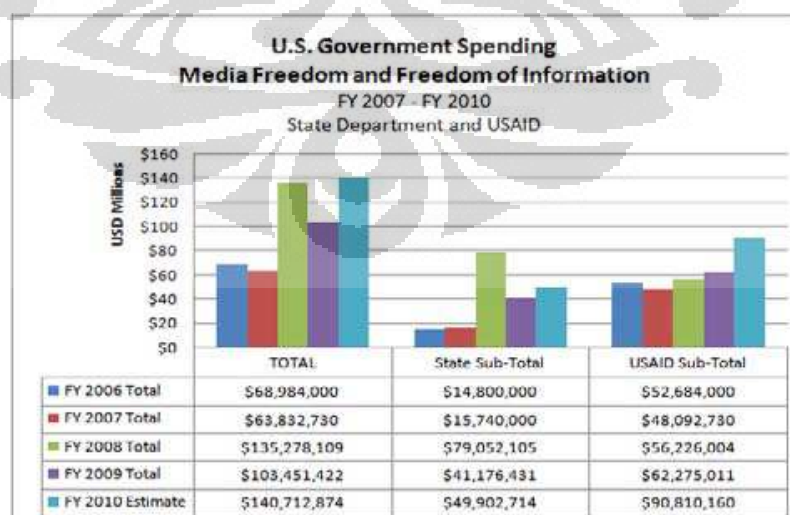
Tabel 19 menunjukkan bahwa walaupun jumlah bantuan untuk sektor media dan kebebasan informasi meningkat, namun secara geografis, Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada tahun 2007-2010 tidak lagi menjadi prioritas. Untuk Asia, prioritasnya adalah Asia Selatan dan Asia Tengah, kawasan dimana terorisme tumbuh. Asia Timur juga menjadi perhatian karena aspek China. Penelaahan peran donor dari Amerika

²³ Penulis pernah bekerja di proyek LGSP sebagai media specialist pada tahun 2006-2008

penting untuk dilakukan karena Amerika masih merupakan pendonor paling penting untuk sektor media yang pada tahun 2008 estimasi dananya sebesar US\$ 124 miliar. Bandingkan dengan Norwegia yang hanya US\$ 19 (Tabel 21). Dalam sejarah bantuan di sektor media, USAID juga menyumbang dalam jumlah besar. Sekarang AUSAID Australia mulai menggeser peran USAID.

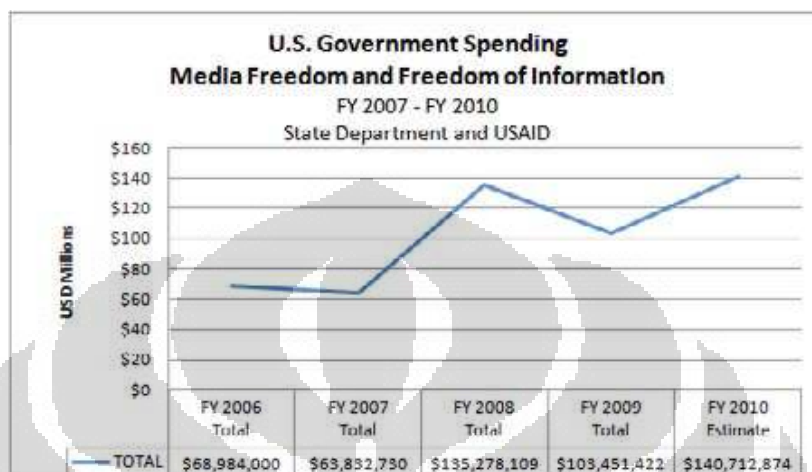
Data-data itu memang tidak menunjukkan perubahan orientasi pendanaan untuk Indonesia. Akan tetapi, sulit untuk mengatakan bahwa pada era transisi demokrasi pertengahan dan akhir 1990-an Indonesia bukan merupakan fokus. Negara sebesar Indonesia dengan posisi geopolitik strategis pasti menjadi fokus perubahan. Yang menarik adalah, setelah 2002, terasa sekali ada perubahan orientasi tema di sektor media yang didukung. Indikatornya adalah matinya banyak LSM media lokal pada periode itu. Tema-tema yang didukung sebelumnya tidak lagi didukung pada waktu itu. Ini adalah tanda bahwa sesudah target liberalisasi lewat UU Pers dan UU Penyiaran selesai, maka proyek *structural adjustment* lewat bantuan asing sudah dianggap selesai. Dalam perspektif pragmatis bantuan asing, tidak ada urgensi lagi untuk mendukung perubahan media di Indonesia. Itulah mengapa tabel-tabel berikut tidak menunjuk Asia Tenggara sebagai bagian dari area yang dituju bantuan asing.

Tabel 17



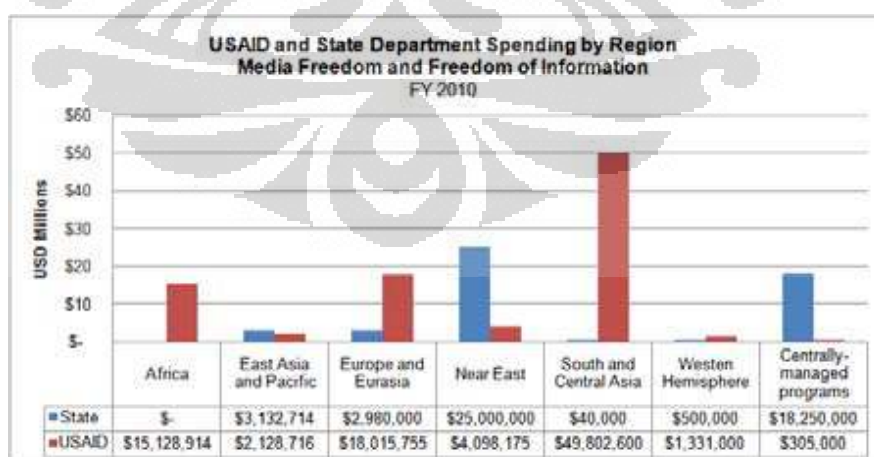
Sumber: www.cima.ned.org

Tabel 18



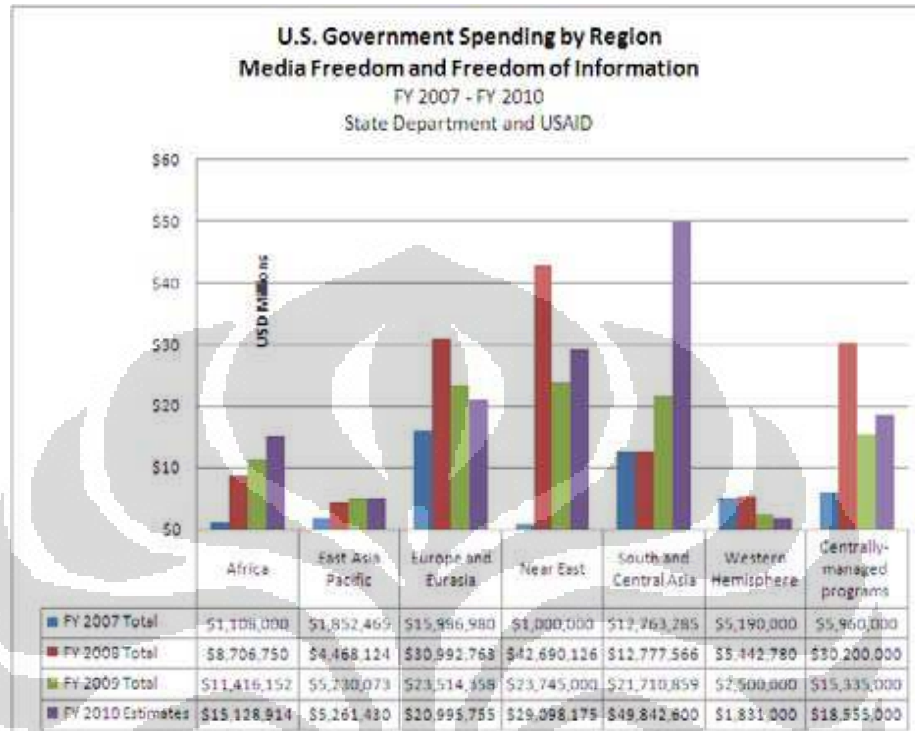
Sumber: www.cima.ned.org

Tabel 19



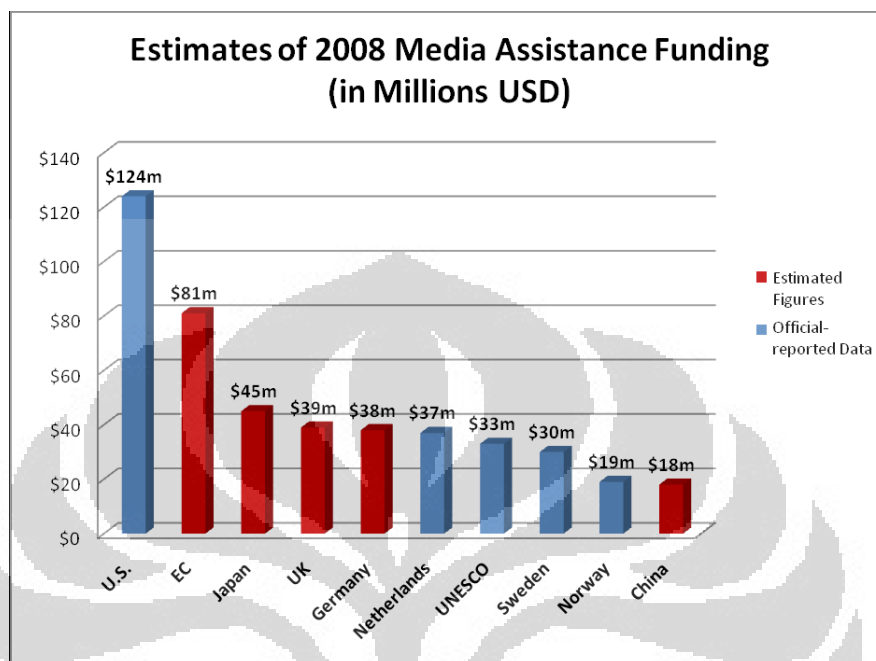
Sumber: www.cima.ned.org

Tabel 20



Sumber: www.cima.ned.org

Tabel 21



Sumber: www.cima.ned.org

5.2 Perubahan Regulasi Media: *Structural Adjustment* untuk Pembukaan Pasar Global

Jantung persoalan liberalisasi media adalah perubahan sistem kebijakan, dalam hal ini adalah UU Pers dan UU Penyiaran pada tahun 1999-2002. Perubahan regulasi merupakan instrumen strategis bagi kapitalisme global untuk menarik negara-negara yang sebelumnya belum masuk ke dalam puserannya untuk terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global. Dalam perspektif ini, diandaikan bahwa negara-negara di seluruh dunia belum tentu memiliki sistem hukum yang relevan dengan kapitalisme global. Untuk pembukaan pasar dan mengintegrasikan mereka ke dalam kapitalisme global, perlu serangkaian tindakan agar sistem hukumnya berubah. Istilah yang sering mereka pakai untuk menyebut proses ini adalah *structural adjustment*. Struktur hukum yang memayungi tindakan ekonomi dan politik harus relevan terhadap sistem liberal. Kadang-

kadang upaya penyesuaian itu disertai oleh tekanan misalnya tidak memberikan bantuan atau hutang sebelum suatu negara meratifikasi sebuah kebijakan yang pro pasar. Dalam konteks itu kita mudah membaca bahwa perubahan regulasi domestik memang merupakan bagian dari strategi kapitalisme global. Tekanan-tekanan seperti itu sering dilakukan yang membuat suatu negara dalam kondisi mau tidak mau harus menyetujui.

Terkait dengan regulasi informasi, biasanya ada semacam paket kebijakan yang saling mendukung untuk menjamin negara benar-benar terintegrasi ke dalam sistem demokrasi pada satu sisi dan kapitalisme global pada sisi yang lain. Paket itu biasanya terdiri dari UU Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Kebebasan Memperoleh Informasi. Dari kasus *Arab Spring*, momentum melemahnya legitimasi penguasa aktual memberikan celah demokratisasi. Kesempatan ini diambil oleh pemain-pemain internasional untuk melakukan penetrasi *structural adjustment*.

Akan tetapi munculnya UU Pers dan UU Penyiaran masalahnya tidak sesederhana itu. Kehendak kapitalisme global untuk menarik Indonesia ke dalam pusaran liberalisme bersamaan waktunya oleh keinginan masyarakat sipil pada level domestik untuk melakukan demokratisasi sebagai jawaban sosial politik dari otoritarianisme Orde Baru. Perkara inilah yang membuat perubahan regulasi media tidak hanya berdimensi ekonomi namun juga politik.

UU Pers diterbitkan Presiden BJ Habibie dalam konteks tuntutan yang keras terhadap kebebasan pers sesudah kontrol Orde Baru yang membungkam media di Indonesia selama tiga dekade. UU Pers merupakan monumen penting dalam sejarah pers di Indonesia. Ketika “harga saham politik” pemerintah menurun drastis sesudah 1998, mau tidak mau pemerintahan Habibie mengakomodasi seluruh usulan regulasi dari masyarakat sipil. Dalam konteks pembentukan UU Pers, sejarah melihat bagaimana Menteri Penerangan Junus Jofiah dan DPR sangat akomodatif terhadap gerakan masyarakat sipil pada waktu itu, termasuk memberikan kebebasan kepada Timor Timur untuk melakukan referendum. Akomodasi pemerintahan Habibie terhadap gerakan masyarakat sipil kelihat sekali misalnya dengan memberikan kesempatan kepada

Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI²⁴) yang dibentuk Oktober 1998 untuk mewakili pemerintah dalam sidang-sidang bersama DPR.²⁵ Pemerintah juga menerima konsep-konsep dari lembaga asing seperti *Internews* yang didukung USAID maupun lembaga multilateral seperti UNESCO yang mengirim pengacara dan ahli media asal Kanada, Toby Mendel.

Ada beberapa karakter UU Pers No. 40/1999 yang relevan dengan prinsip-prinsip liberal, yaitu:

A. Dihapuskannya Penyensoran dan Pembredelan

Pasal 4 ayat 2 mengatur bahwa tidak dikenai penyensoran dan pembredelan terhadap pers nasional. Ini merupakan antithesis tegas dari ketentuan-ketentuan sebelumnya sejak jaman Belanda dimana pemerintah memiliki kekuasaan lebih dibanding pers karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyensor dan membredel. Pada level ini kontrol politik terhadap pers dihapus. Pelanggaran terhadap aturan ini diatur menurut delik kriminal. Ini sesuai dengan prinsip liberal dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi dari setiap individu dijamin sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak mendorong orang lain untuk bertindak criminal (*hate speech*).

B. Penghapusan Sistem Surat Ijin Usaha Perusahaan Penerbitan (SIUPP)

UU Pers menghapus otoritarianisme karena tidak lagi ada kewenangan lembaga negara untuk menerbitkan surat ijin produksi dan sensor. Sensor dilakukan secara internal. Keberatan pada isi media massa disampaikan pada Dewan Pers dan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers. Penghapusan SIUPP ini membuat siapa pun bisa melakukan kegiatan penerbitan pers. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa

²⁴ Tokoh-tokoh MPPI merupakan figure-figur senior dalam media massa seperti Atmakusumah, Azkarmin Zaini, Amir Effendi Siregar, Zainal Suryokusumo, Fahri Muhammad, Abdullah Alamudi, Hinca Panjaitan, dan Kukuh Sanyoto, dll

²⁵ Ade Armando, *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2011 halaman 154

setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. UU Pers juga cenderung mengakomodasi keberadaan pers dan modal asing dengan menyebutkan bahwa penambahan modal asing bisa dilakukan melalui pasar modal (Pasal 11). Keberadaan pers asing juga diatur sesuai UU yang berlaku (Pasal 16).

Secara normatif, pembebasan SIUPP bermakna bahwa setiap warga negara berhak untuk menyatakan pikirannya melalui pendirian media massa. Akan tetapi mekanisme ini memiliki asumsi yang salah yaitu bahwa mendirikan perusahaan media massa memerlukan kapasitas modal. Pada akhirnya, yang terjadi adalah penguatan kekuatan industri media – yang tercermin dari lonjakan jumlah media cetak sesudah 1999 – yang nantinya justru melawan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

C. Jaminan Mencari, Memperoleh, dan Menyebarkan Informasi

Jaminan itu diatur oleh Pasal 4 ayat 3. Kepada pers dibebaskan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi sebagai bagian integral dari kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum HAM dan UUD 1945. Pelanggaran terhadap prinsip ini diancam melalui delik kriminal dengan ancaman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

D. Tidak Adanya Pengaturan Kriminalisasi Pers Termasuk Pencemaran Nama Baik

Inilah aturan hukum media pertama yang tidak meletakkan masalah sengketa pers ke dalam delik kriminal. Mekanisme hak jawab dan defamasi diakomodasi oleh UU ini. Sengketa lain juga diupayakan tidak melalui proses peradilan namun difasilitasi oleh Dewan Pers. Dewan Pers menjadi semacam mediator antara media dan masyarakat. Pada persoalan defamasi, UU Pers juga melakukan terobosan penting karena tidak meletakkan defamasi dalam delik kriminal. Ini sebenarnya bertentangan dengan KUHP pasal 310 yang masih meletakkan

defamasi dalam kerangka kriminal. Pertentangan ini mengakibatkan ambiguitas di proses peradilan. Ada aparat hukum yang memakai KUHP sebagai dasar pertimbangan; namun ada pula yang memakai UU Pers sebagai dasar pertimbangan. Dengan memakai KUHP, masih mungkin adanya pemenjaraan jurnalis seperti terjadi di Yogyakarta dan Medan tahun 2008. Kemenangan *Time* terhadap Soeharto terjadi karena memakai UU Pers.

Persoalan kriminalisasi patut mendapat catatan karena regulasi ini secara substantif bertentangan dengan aturan-aturan KUHP pasal 310 dan 311 misalnya, soal pencemaran nama baik. Pertentangan itu akhirnya diselesaikan lewat mekanisme SEMA yang mengatur bahwa sengketa pers dalam peradilan wajib menyertakan Dewan Pers sebagai ahli.

E. Pengakuan Kemerdekaan Pers sebagai Bagian dari Hak Masyarakat yang Berdaulat

Kemerdekaan pers diakui bukan untuk pelaku pers saja tetapi merupakan bagian dari hak masyarakat yang berdaulat dan demokratis untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi serta berkomunikasi. Komunikasi adalah hak manusia yang esensial sebagai bagian dari hubungan dengan orang lain. Kemerdekaan pers adalah akomodasi terhadap nilai liberal *freedom of speech*.

Berhubungan dengan pers asing, UU Pers No. 40/1999 menjadi pintu penting bagi masuknya pers asing ke Indonesia. Memang UU ini tidak mengizinkan adanya pers di luar yang berbadan hukum di Indonesia (Pasal 9 ayat 2). Integrasi ke dalam sistem global juga tampak dari aspek penambahan modal asing yang dimungkinkan melalui mekanisme pasar modal. Dengan demikian UU ini tidak berdampak langsung pada aspek kepemilikan media yang bisa dikuasai asing. Integrasi ke dalam sistem kapitalisme global dimungkinkan melalui mekanisme

waralaba (*franchise*) dan iklan asing. Dalam konteks yang lain, perusahaan iklan asing boleh beroperasi di Indonesia sedangkan badan hukum medianya diharuskan di Indonesia. Dengan demikian integrasi ke dalam sistem kapitalisme global dari ranah media tidak hanya terjadi melulu pada sektor media namun berlangsung secara sistemik melalui regulasi periklanan. Media waralaba juga cenderung menjamur sesudah UU Pers ini diterapkan dengan jumlah saat ini sekitar 40-an.²⁶

Secara lebih luas, UU Pers No. 40/1999 juga merupakan salah satu bagian dari strategi minimalisasi peran negara dalam sistem media. Pengurangan peran negara ini jelas-jelas relevan dengan liberalisasi dengan asumsi bahwa selama pasar bisa mengatur, biarkanlah pasar yang mengatur. Proses ini menemukan momentum historisnya di Indonesia sebagai akibat dari otoritarianisme Orde Baru. Proses hancurnya Orde Baru tidak saja mematahkan kekuatan politik Orde Baru, namun juga merupakan momentum historis bagi liberalisme untuk menguatkan pengaruh pasarnya.

Proses pembentukan UU Penyiaran No. 32/2002 juga melibatkan masyarakat sipil dan televisi swasta pada awalnya. Namun konfigurasi pelaku pada waktu proses pembentukan UU Penyiaran berbeda dengan saat pembentukan UU Pers. Kelompok masyarakat sipil mengalami pembelahan antara yang ingin UU Pers sebagai payung penyiaran dan yang menginginkan UU Penyiaran berdiri sendiri. Di luar MPPI kemudian muncul kelompok Kreasi yang terdiri dari LSM-LSM media. Kelompok industri yang sebelumnya berkoalisi dengan masyarakat sipil pun akhirnya berpisah. ATVSI menemukan titik-titik dimana regulasi yang diusulkan bisa mengancam gurita bisnis mereka yang terlanjur besar dalam lindungan Orde Baru. Inilah akar dari konflik kekuasaan ekonomi dengan prinsip perlindungan publik dalam penyiaran yang masih berlangsung hingga saat ini.

²⁶ Jumlah ini adalah hasil dari riset kecil di lapangan. Sampai saat ini belum ada pendataan jelas tentang media waralaba.

Konfigurasi kepentingan seperti ini membentuk kondisi ekonomi politik penyiaran Indonesia hingga saat ini.

Masduki (2005) mencatat bahwa pada dasarnya yang terjadi di Indonesia dalam ranah hukum penyiaran adalah perubahan dari sistem otoriter ke sistem liberal. Perubahan itu berlangsung dengan cepat dan lancar karena konteks ekonomi politik pada waktu itu sangat mendukung gerakan-gerakan sosial dan perubahan regulasi dalam payung demokratisasi. Menurut Masduki, yang terjadi dalam transisi regulasi di Indonesia adalah proses liberalisasi. Berikut bagan yang disusun Masduki:

Aspek	Otoritarian/Fasis	Libertarian/Neoliberal	Demokratis
Orientasi dan Bentuk Lembaga Penyiaran	Media organik pemerintah, media publik	Media komersial, media publik dan pemerintah	Media publik, publikasi penyiaran pemerintah
Pilihan Isi Siaran	Propaganda politik pembangunan	Hiburan dan informasi untuk komodifikasi	Pendidikan dan partisipasi sosial
Lembaga Regulator	Perlu oleh pemerintah atau badan pemerintah yang bertanggungjawab pada pemerintah	Tidak perlu, diserahkan kepada mekanisme pasar melalui asosiasi penyiaran komersial	Perlu oleh badan independen yang dibentuk negara, bertanggungjawab kepada publik
Status Frekuensi	Milik publik yang dikuasai penuh oleh pemerintah atas nama negara	Milik publik, dikelola secara komersial oleh pribadi pemilik modal	Milik publik, yang dikelola oleh badan independen atas nama negara

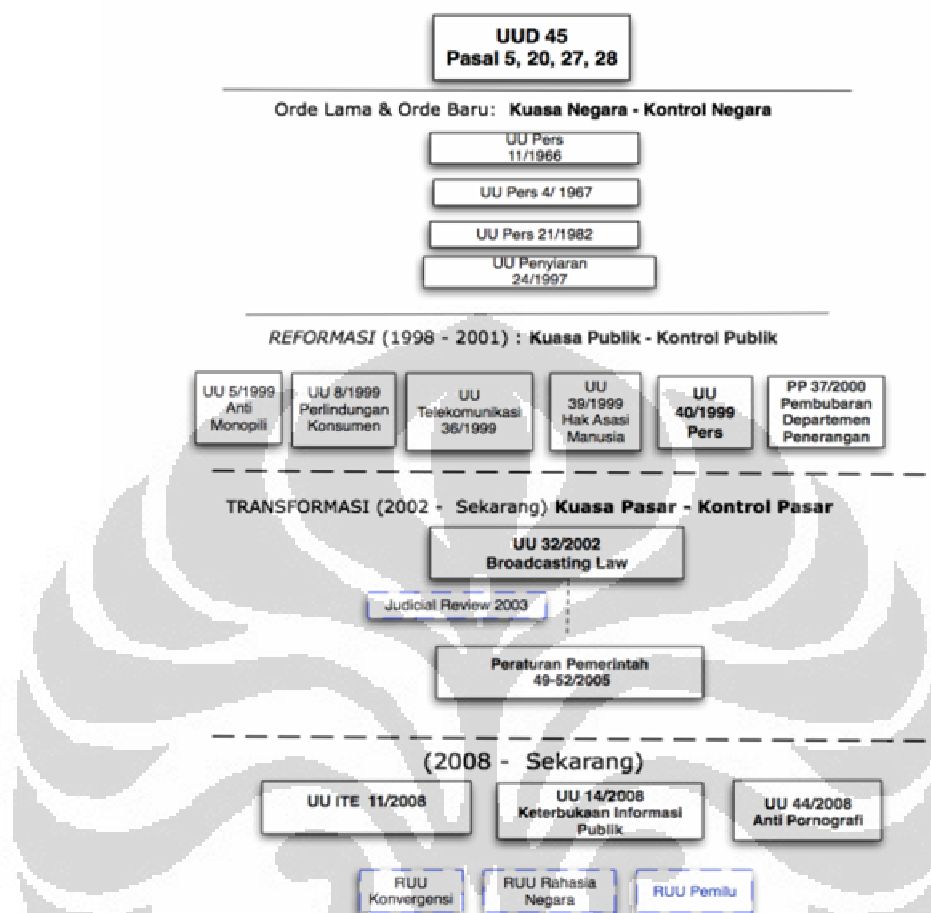
Partisipasi Publik Penyiaran	Lemah, semua urusan diklaim sepihak oleh pemerintah	Lemah, semua sektor penyiaran dikuasai oleh pemilik modal	Kuat, langsung atau melalui lembaga independen
Tujuan Regulasi Berbentuk UU	Mengatur agar tetap ada peluang politisasi media penyiaran	Mengatur agar makin terbuka peluang komersialisasi, privatisasi	Mengatur agar terjamin akses publik secara merata dan adil
Monopoli Isi dan Pemilikan	Boleh selama bisa dikendalikan pemerintah	Harus, untuk mendorong akumulasi kapital	Tidak boleh, karena antikeberagaman dan kebebasan berekspresi
Intervensi Asing dalam Modal dll	Tidak boleh karena dianggap intervensi asing, antipemerintah	Boleh karena mendorong efisiensi lembaga penyiaran secara konvensional	Tidak boleh atau dibatasi atau bersifat sementara untuk memproteksi kepentingan lokal

Jika mengikuti alur berpikir Masduki, yang terjadi dalam proses penyusunan UU Penyiaran Indonesia adalah liberalisasi yang bercampur dengan demokrasi pada beberapa aspek. Demokrasi ada pada aspek kelembagaan misalnya lewat pengakuan eksistensi lembaga penyiaran pemerintah. Pada awalnya, UU Penyiaran didisain untuk mengikuti logika UU Penyiaran dimana demokrasi dijadikan kiblatnya. Akan tetapi muncul konflik-konflik misalnya pada aspek regulator independen, status frekuensi, dan kepemilikan, yang mengubah orientasi penyiaran lebih kepada dimensi liberal kapitalistik.

Dalam aspek substansi regulasi dan posisi masyarakat sipil, UU Penyiaran tidak semulus UU Penyiaran. UU Penyiaran merupakan kemenangan mutlak masyarakat sipil karena tidak terjadi pembelahan kepentingan antara kepentingan industri cetak, jurnalis dan masyarakat. Ketiga unsur itu memiliki kepentingan yang sama dan bersatu dalam wacana anti otoritarianisme. Sedangkan dalam proses penyusunan UU Penyiaran, terjadi pembelahan-pembelahan di tengah jalan baik antara pelaku masyarakat sipil sendiri maupun dengan industri. Pada saat pengesahannya, bahkan kelompok ATVSI menyebutnya sebagai kematian penyiaran Indonesia. Mereka melakukan aksi besar-besaran dengan tayangan langsung di televisi. ATVSI tidak bisa menerima prinsip pengaturan oleh lembaga independen. *Judicial review* kemudian dilakukan oleh ATVSI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dimana MK mengabulkan pembatasan wewenang KPI dan mengembalikan peran pemerintah sebagai pengendali.

Kejadian-kejadian itu membuat konfigurasi yang membedakan UU Pers dan UU Penyiaran. Dalam kondisi yang demokratis, seharusnya ada lembaga independen semacam FCC di Amerika. Akan tetapi *judicial review* oleh ATVSI membuat pemerintah kembali masuk sebagai regulator.

Dalam hal penguatan pasar, titik masalahnya ada pada persoalan kepemilikan dimana sejarah membuktikan bahwa UU Penyiaran tidak sepenuhnya ditepati oleh industri penyiaran. Beberapa perusahaan penyiaran bisa memiliki lebih dari satu stasiun televisi di satu provinsi. Dengan demikian transisi regulasi belum berhasil menciptakan sistem yang mendorong keragaman kepemilikan dan keragaman isi.



Pada aspek yang lain, hal ini juga membuktikan bahwa tesis yang dikembangkan oleh CIPG-HIVOS seperti tampak dalam grafik di atas tidak sepenuhnya menggambarkan realitas. Tesis itu memandang bahwa telah terjadi kontrol pasar melalui perubahan regulasi media. Sampai pada titik ini benar, akan tetapi tidak lengkap. Perlu dicatat bahwa dalam ranah penyiaran, kontrol pasar tersebut juga disertai oleh kembalinya kontrol negara yang menggeser regulator independen seperti KPI dalam proses perijinan. Kembalinya peran negara ini menjadi awal penting dalam sejarah regulasi media sesudahnya karena beberapa regulasi terkait media selanjutnya mengindikasikan kembalinya kontrol negara, misalnya UU ITE No. 11/2008 dan UU Film No. 33/2009.

5.3 Indikator-Indikator Kemenangan Industri Media dalam Media Liberal

5.3.1 Konglomerasi Media: Paradoks Demokrasi

Dedy N. Hidayat (2005) memberikan metafora yang sangat tepat untuk menggambarkan proses struktural dalam ekonomi politik media di Indonesia: dari istana ke pasar. Struktur yang memengaruhi kehidupan media massa di Indonesia telah bergeser dari logika dominasi politik ke logika dominasi ekonomi. Dalam konteks media cetak, proses ini berakar dari konsentrasi oplah yang dimulai dari tahun 1980-an pada saat terjadi penurunan harga minyak. Dalam konteks media penyiaran, akarnya adalah privatisasi praktik penyiaran juga pada era 1980-an yang dilakukan dalam koridor kontrol politik Keluarga Cendana dengan latar kapitalisme semu. Pola ini masih dominan dalam dunia penyiaran dengan lima stasiun televisi sebagai pemegang bisnis utama sampai runtuhnya Orde Baru. Sesudah UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002, pola itu berubah drastis.

Penelitian terbaru tentang peta industri media di Indonesia dilakukan oleh tim peneliti CIPG dan Hivos (2012) atas sponsor dari The Ford Foundation. Pada bab tentang konglomerasi media, penelitian itu membuka pembahasan dengan mengutip wawancara dengan Bimo Nugroho, eks aktivis ISAI, eks anggota Komisi Penyiaran yang pada saat wawancara bekerja sebagai *Corporate Secretary* Kompas TV.

*Conglomeration in the media industry is a logical consequence. [It is] a logical consequence where it [the media business] became spread out and then became concentrated. Business will always be like that. But that is not the most important part. What matters is how the media industry could help us to become better human beings.*²⁷

Bimo Nugroho menyampaikan bahwa konglomerasi media – sebagaimana konglomerasi pada bisnis sektor lain – merupakan keniscayaan atau konsekuensi logis dari usaha. Pertama-tama bisnis menyebar dan dilakukan oleh banyak orang, lalu terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan yang kuat saja, *survival of the fittest*. Konsentrasi dalam cara

²⁷ Yanuar Nugroho et. al. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*, CIPG-Hivos, Jakarta, 2012, halaman 46

pikir adalah ikutan teknis dari kualitas produk yang bagus, sistem produksi yang efisien, sistem distribusi yang efisien, dan tingkat penerimaan konsumen pada produk yang tinggi.

Asumsi dasar bahwa bisnis media sama dengan bisnis lain bisa dijadikan awal masalah dan sangat krusial jika menyangkut bisnis penyiaran terestrial yang memakai frekuensi publik. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga penting untuk dibahas terkait dengan kualitas opini publik dan *public sphere* untuk mencapai *better human beings*.

Menurut Yanuar Nugroho *et. al.* (2012), gejala konsentrasi media bisa dilacak pada era 1980-an ketika Keluarga Cendana mulai memasuki bisnis televisi sebagai respon terhadap teknokapitalisme global yang memaksa masuk ke Indonesia. Temuan ini benar pada ranah industri penyiaran. Akan tetapi, sebenarnya gejala konsentrasi pada pers cetak sudah terjadi satu dasawarsa sebelumnya dan terus semakin menguat sampai sekarang. Gejala konsentrasi media cetak sudah memunculkan tanda-tandanya pada tahun 1970-an pada pers cetak. Persisnya hal itu terjadi sesudah krisis devaluasi pada tahun 1976. Indikasinya adalah tetap stabilnya oplah total pada tahun 1978 pada kisaran angka lima juta eksemplar meskipun enam media besar seperti *Kompas* dan *Sinar Harapan* yang pada waktu itu merupakan pemain-pemain utama, dibredel Soeharto pada awal 1978. Indikasi konsentrasi semakin tampak menguat pada paruh pertama 1980-an yang dimulai pada tahun 1981 dimana jumlah industri pers cetak menurun namun jumlah oplah total justru meningkat. Artinya dengan pemain yang lebih sedikit, terjadi kenaikan omset industri.

Semakin dinamisnya iklan membuat potensi konsentrasi semakin membesar yang indikatornya bukan semata-mata jumlah pembaca namun jumlah pendapatan iklan yang bisa diraih. Pada kurun waktu 1982-1986, *Kompas* merupakan surat kabar yang paling banyak mendapatkan iklan dengan jumlah akumulatif US\$ 60 juta, disusul *Sinar Harapan*, *Pikiran Rakyat*, *Suara Merdeka*, *Surabaya Post* dan *Pos Kota*.²⁸ *Kompas* dan *Jawa Pos* merupakan dua perusahaan cetak yang secara intensif melakukan perluasan

²⁸ Daniel Dhakidae *op. cit.* halaman 92

bisnis dengan membuka jaringan bisnis di daerah sejak tahun 1990-an. *Jawa Pos* mencetak rekor tertinggi dengan memiliki 171 media cetak melalui jaringan *Radar*, sementara *Kompas* memiliki 88 media cetak (Tabel 22).

Pada tahun 2012, kepemilikan media di Indonesia hanya beroperasi di wilayah 12 kelompok bisnis saja. Dengan potensi penonton sebesar Indonesia, jumlah ini sebenarnya mengkhawatirkan karena opini publik relatif terkendali oleh mereka saja. Sementara pada kelompok media cetak dikuasai oleh *Jawa Pos Group*, pada kelompok media televisi *Jawa Pos Group* juga dominan dengan 20 stasiun bersama MNC Group. Pada media *online*, kepemilikan menyebar pada 12 kelompok usaha kecuali *Kompas* yang memiliki 2 media *online*.

Tabel 22

Kepemilikan Media Indonesia

No.	Grup	TV	Radio	Media Cetak	Online	Bisnis Lain	Pemilik
1	Global Mediacomm (MNC)	20	22	7	1	Produksi&Distri busi Konten, <i>Talent Management</i>	Hary Tanoesoedibjo
2	Jawa Pos Group	20	-	171	1	Pabrik kertas, percetakan, energi	Dahlan Iskan, Azrul Ananda
3	Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Properti, Toko Buku, Manufaktur, EO, universitas	Jacob Oetama
4	Mahaka Media Group	2	19	5	-	<i>Event Organiser, PR Consultant</i>	Abdul Gani, Erick Thohir
5	Elang Mahkota	3	-	-	1	Telekomunikasi	Keluarga

	Teknologi						Sariatmadja
						<i>IT solutions</i>	
6	CT Corp	2	-	-	1	Jasa keuangan, <i>Lifestyle and Entertainment</i> , SDA, Properti	Chairul Tanjung
7	Visi Media Asia	2	-	-	1	SDA, network provider, Properti	Bakrie&Brothers
8	Media Group	1	-	3	1	Hotel	Surya Paloh
9	MRA Media	-	11	16	-	<i>Retail</i> , Properti, <i>Food & Beverage</i> , Otomotif	Adiguna Soetowo&Soetokno Soedardjo
10	Femina Group	-	2	14	-	<i>Talent Agency</i> , Penerbitan	Pia Alisjahbana
11	Tempo Inti Media	1	-	3	1	Dokumentasi	Yayasan Tempo
12	Beritasatu Media Holding	2	1	10	1	Properti, kesehatan, TV kabel, internet, service provider, universitas	Lippo Group

Sumber: CIPG-Hivos, 2012) dgn. modifikasi pada bagian CT Trans

Tabel 23
Perubahan Hukum dan Tren Industri

1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998 REFORMASI	2000	2005	2010	present
1962 TVRI established	KOMPAS established	1970's radio network expanding	1974 PRSSNI established	1978 KOMPAS being banned	1989 RCTI established	1993 ANTV established	1997 first franchise print-media (Cosmopolitan)	Metro TV established	TV7 changed into Trans 7	Lativi changed into TVOne	Kaskus is acquired by Djarum	
1949 JAWA POS established	Print media expanding	Sinar Harapan and 12 other medias are being banned	1990 SCTV established	1994 Indosiar established	TEMPO re-established	TV7 established	2004 Integration of Mahaka Media	Vivanews established	Indosiar is acquired by SCTV			
1945 RRI established	1971 TEMPO established	1982 TEMPO is temporarily closed	1990 TPI established	1993 Republika established	2000 ATYSI - Indonesian Private Television Association is formed	2001 Koran Tempo established	2001 TransTV established	2002 Lativi established	2002 ATVJ - Indonesian Local Television Association is formed			
UU No 4 1963 Public Order Law	UU No 11/1966 Press Law UU No. 4/1967 Press Law	UU No 21/1982 Broadcasting Law	UU. 20/1994 Foreign investment Law	UU No. 24/1997 Broadcasting Law	UU No. 5/1999 Anti-Monopoly Law	UU No. 8/1999 Consumer Protection Law	UU No 36/1999 Telecommunication Law	UU No. 39/1999 Telecommunication Law	UU No. 5/1999 Anti-Monopoly Law	UU No 40/2007 Company Law	UU No 25/2007 Foreign Investment Law	UU No 11/2008 Election Bill
									PP No 49/2005	PP No 50/2005 on Private Broadcasting	PP No 51/2005 on Community Broadcasting Institution	PP No 52/2005
									PP 37/2000 Department of Information is closed down	UU No 14/2008 Freedom of Information	UU No 44/2008 Anti Pornography Law	UU No 14/2008 State Secrecy Bill

Modus perluasan bisnis media massa di Indonesia ada tiga bentuk. Bentuk pertama adalah sebuah usaha media yang pada mulanya kecil dan sejak awal memang berkecimpung di bisnis media massa, melakukan ekstensifikasi usaha dengan cara membangun jenis media baru dan memperluas cakupan *core business*-nya. Ini misalnya dilakukan oleh Kelompok Kompas Gramedia dan Jawa Pos Group. *Core business* mereka pada awalnya adalah penerbitan surat kabar yang kemudian memperluas usahanya dengan membangun bisnis jenis media lain dan bahkan merambah ke bisnis non media.

Bentuk yang kedua adalah bersatunya beberapa perusahaan media ke dalam satu usaha. Hal ini biasanya berupa perusahaan besar membeli perusahaan-perusahaan media yang

lebih kecil untuk memperbesar portofolio kepemilikan media dan *merger*. Hal ini dilakukan setidaknya oleh *Lippo Group* yang membeli *Beritasatu*. *Beritasatu* pada mulanya adalah portal investigatif dengan modal tidak besar yang didirikan salah satunya oleh Ulin Ni'am Nusron, eks wartawan Kontan. *beritasatu.com* kemudian dibeli oleh *Lippo Group* dan menjadi *brand* dari *media holding* *Lippo* dengan 2 televisi, 1 portal, dan 10 media cetak. Kisah pembelian *detik.com* yang didirikan oleh Budiono Sudarsono ke *CT Trans* milik Chaerul Tanjung juga termasuk ke dalam bentuk yang kedua ini. Ini menambah kepemilikan media *CT Trans* yang sebelumnya "hanya" memiliki televisi dan radio *Ramako FM*. *CT Trans* belum memiliki media cetak. Merger antara *SCTV* dan *Indosiar* juga masuk dalam bentuk ini. Merger ini memiliki komplikasi hukum yang serius terkait dengan aturan pembatasan kepemilikan dalam UU Penyiaran.

Bentuk yang ketiga adalah masuknya pebisnis-pebisnis baru media yang pada mulanya tidak berfokus pada bisnis media. Dengan basis modal yang kuat, mereka dengan segera bisa masuk ke dalam kelompok besar pemilik media dengan jumlah media lebih dari satu. Mereka ini misalnya *Visi Media Asia* milik keluarga Bakrie dan *Lippo Group* yang baru masuk pada bisnis media. Pola ini terutama terjadi sesudah 1999 bersamaan dengan mekinya terbukanya kesempatan untuk masuk ke bisnis media.

Masalah normatif dari konsentrasi kepemilikan media adalah konsentrasi opini. Dalam cara pandang *diversity of content* dan *diversity of ownership* yang dianut negara-negara demokratis, prinsip yang dipakai adalah bahwa keragaman berita hanya akan terjadi dalam situasi keragaman kepemilikan. Konglomerasi kepemilikan media pada akhirnya akan menciptakan homogenisasi berita dimana aspek yang dominan adalah aspek ekonomi yang mereduksi kualitas ruang publik.

Dalam konteks penyiaran, masalahnya menjadi lebih rumit. Konsentrasi kepemilikan satu *holding* yang memiliki beberapa stasiun penyiaran memiliki komplikasi legal yang kuat. Penyebab utamanya adalah penyiaran terrestrial menggunakan frekuensi publik sebagai sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatannya wajib diatur dengan ketat oleh

negara. Pembatasan kepemilikan juga diatur dengan ketat supaya frekuensi publik itu tidak digunakan secara monopolistik.

UU Penyiaran No. 32/2002 sebenarnya cukup mewadahi aspirasi demokrasi penyiaran. UU ini membagi penyiaran dalam empat kategori yaitu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Dalam hal kepemilikan lembaga penyiaran swasta, UU ini membatasi kepemilikan lembaga penyiaran swasta untuk mendorong keberagaman isi dan identitas lokal berbagai daerah di Indonesia (Pasal 18 ayat 1). Secara konkret, UU Penyiaran tidak membolehkan adanya kepemilikan tunggal atas dua stasiun penyiaran swasta di satu provinsi. Inilah paradigma *diversity of ownership* yang menjadi salah satu pilar penting demokrasi penyiaran karena akan memunculkan *diversity of content*.

Akan tetapi prinsip *diversity of ownership* itu pula yang sampai sekarang belum berhasil ditegakkan dalam sistem penyiaran swasta kita. Ketimbang mendorong keberagaman kepemilikan, yang terjadi justru pemusatan kepemilikan ke segelintir kelompok bisnis saja. Pada tahun 2007, PT Media Nusantara Citra (MNC) memiliki saham *RCTI* sebesar 99%, *Global TV* 99%, dan *TPI* (sekarang *MNC TV*) 75%. Tren yang sama juga tampaknya akan muncul lewat upaya merger Indosiar dan *SCTV*, bersatunya *Trans TV* dan *Trans7*, dan bersatunya *TVOne* dan *Anteve*. Dari sini saja sudah tampak jelas adanya pelanggaran perundangan.

Di Amerika yang liberal pun mengenakan pembatasan kepemilikan. Satu perusahaan penyiaran tidak boleh melebihi *coverage* sebesar 39% dari jumlah total TV di rumah (TV home). Indonesia memakai prinsip geografis dalam membatasi kepemilikan. Selain persoalan pemusatan, juga patut diduga adanya kepemilikan asing yang melebihi 20% melalui mekanisme kepemilikan berjenjang pemegang saham kepemilikan televisi secara langsung maupun tidak langsung di kelompok bisnis MNC dan EMTEK yang memiliki *SCTV*.²⁹ Ini juga jelas melanggar UU Penyiaran.

²⁹ Aliansi Masyarakat untuk Demokratisasi Penyiaran, Yogyakarta, 2011

Konsentrasi kepemilikan media penyiaran berakar pada kisah awal pendirian televisi swasta di Indonesia pada tahun 1980-an yang dimiliki oleh kelompok bisnis yang dekat dengan Soeharto. *RCTI, Indosiar, SCTV, MNC TV* (sebelumnya TPI), merupakan bisnis awal televisi pada era kapitalisme semu. Pemberian izin operasi pada mereka ini memberikan titik *start* lebih awal daripada kelompok bisnis media penyiaran lain. Kelompok usaha ini memiliki waktu dan pengalaman lebih banyak untuk tampil sebagai bagian dari kelompok usaha yang dominan pada era liberal.

Pada bisnis media cetak, situasinya agak berbeda. Bisnis cetak yang tumbuh pada era Orde Baru tidak berada dalam lingkaran-lingkaran bisnis Orde Baru. Mereka tumbuh dalam sistem otoritarianisme Orde Baru dimana komplikasi yang muncul lebih bersifat konten berita ketimbang jaring-jaring kepemilikan. *Kompas* dan *Jawa Pos* tumbuh besar dengan mengendap-endap di antara kepentingan kritis, mengamankan diri dari breidel, dan memperbesar bisnis.

Pemikir Amerika, Robert McChesney, sudah memperingatkan kecenderungan konglomerasi media dalam bukunya *Rich Media, Poor Democracy* (1999). Dalam tren liberalisasi media di negara-negara pasca otoritarian, tampak bahwa jika pemerintah gagal mengontrol kerakusan korporasi, maka media akan menjelma menjadi gurita yang mencederai demokrasi itu sendiri. Kisah *News Corp* di Inggris bisa dijadikan contoh bagaimana media yang meraksasa bisa muncul menjadi tiran baru dalam demokrasi liberal.

Pada tahun 2011 lalu, publik Inggris dan dunia diguncang oleh skandal tabloid *The News of the World* dalam grup bisnis *News Corporation (News Corp)* milik baron media Rupert Murdoch. Surat kabar berusia 168 tahun itu terpaksa ditutup dan memaksa Murdoch meminta maaf secara resmi setelah skandal peretasan dan suap kepada polisi yang dilakukan oleh redaksinya selama bertahun-tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat *voice mail* dari 4.000 orang dari kalangan kerajaan, pesohor, dan tokoh-tokoh lainnya telah disadap. Sekarang otoritas publik di Inggris sedang melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

Kasus *News Corp* mengingatkan pada salah satu film serial James Bond, *Tomorrow Never Dies* (1996). Berbeda dengan film-film James Bond yang biasanya meletakkan tokoh komunis atau teroris Timur Tengah sebagai musuh, film *Tomorrow Never Dies* justru memasang Elliot Carver, seorang konglomerat media, sebagai musuh utama karena mendorong perang antara China dan Inggris. Carver melalui televisinya memengaruhi opini publik yang mendorong lahirnya Perang Dunia Ketiga.

Lewat kasus itu, adagium bahwa media massa merupakan pilar keempat demokrasi musti dilihat dengan lebih jernih terutama dalam iklim liberal dimana media massa selain merupakan entitas publik, juga merupakan entitas ekonomi. Kesadaran perspektif ekonomi ini menuntun kita untuk sadar bahwa media memiliki kepentingan internal yang kadang-kadang bisa merusak mandat publiknya. Kapitalisme global yang memungkinkan munculnya gurita kepemilikan internasional terhadap media juga potensial memenjarakan jurnalisme sekedar sebagai alat produksi yang didikte oleh industri.

Kasus *News Corp* menegaskan bahwa dalam situasi industri yang tidak sehat, media gagal berfungsi sebagai *watch dog* dan malah mencederai demokrasi. Penyebab utamanya adalah dominasi kepemilikan terhadap banyak media sehingga melanggar norma keberagaman isi berita (*diversity of content*). Penguasaan terhadap banyak media potensial menggiring media menjadi alat politik atau ekonomi bagi pemiliknya. Inilah ancaman kegagalan media dalam industri yang tidak terkontrol. Tanpa pengawalan etis yang kuat, media justru potensial menjadi penumpang gelap demokrasi.

Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan media memiliki komplikasi hukum dan politik yang serius. Pada ranah hukum – yang seharusnya mengatasi kepentingan ekonomi – kepemilikan media penyiaran memiliki komplikasi serius karena aturan kepemilikan di UU No. 32/2002 jelas-jelas melarang kepemilikan lebih dari satu stasiun pada perusahaan yang sama pada wilayah siar yang sama.

Ada tiga pasal penting dalam UU Penyiaran sebagai aturan untuk menjamin keanekaragaman (*diversity*) kepemilikan dan isi serta mencegah lembaga penyiaran swasta melakukan konsentrasi, pemusatan kepemilikan yang berlebihan, serta jual beli

lembaga penyiaran sekaligus ijinnya, yaitu pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: *Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.*

Pasal 20 menyatakan: *Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.*

Pasal 34 Ayat (4) menyatakan: *Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Penjelasan Pasal 34 Ayat (4): Yang dimaksud dengan Izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.*

Akan tetapi terbukti bahwa ranah hukum tersebut terpaksa dikalahkan oleh ranah ekonomi. Lembaga penyiaran swasta banyak yang melakukan pelanggaran di antaranya *MNC* yang memiliki *RCTI*, *Global TV*, dan *MNV TV*; *Visi Media Asia* milik Bakrie yang memiliki *ANTV* dan *TVOne*, serta bersatunya *SCTV* dan *Indosiar*. Semuanya dalam wilayah siaran sama: DKI Jakarta.

Komplikasi politik konsentrasi kepemilikan media berhubungan dengan kualitas demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia. Transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratis tidak menjamin bahwa demokrasi akan terjadi. Akan terjadi banyak penyanderaan-penyanderaan entah oleh kekuatan anarkisme ideologis yang dilakukan oleh publik, kembalinya regulasi yang berpihak pada rejim lama, serta munculnya kekuatan pasar sebagai pengontrol baru.³⁰ Pada wilayah media massa, gejala yang terakhirlah yang kelihatan.

³⁰ Dalam hubungan horisontal, mulai terasa bahwa kekuatan-kekuatan berbasis identitas primordial semakin anarkis dalam berperilaku di ruang publik. Regulasi-regulasi seperti UU Film, UU ITE, RUU Rahasia Negara, juga membuktikan bahwa negara tidak sepenuhnya mau berperilaku demokratis.

Kondisi terakhir yang mengkhawatirkan adalah bertemunya pemain-pemain politik dengan pemain bisnis media. Pemilik *MNC*, Harry Tanoe, memutuskan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat yang diketuai oleh Surya Paloh, pemilik *Media Group*. Aburizal Bakrie adalah Ketua Golkar sekaligus pemilik *Visi Media Asia* yang mengontrol *TV One* dan *ANTV*. Bertemunya kapital ekonomi dan kapital politik dalam bisnis media berdampak langsung pada kualitas ruang publik dan demokrasi. Hal pertama yang menjadi dampaknya adalah opini publik. Media massa rentan menjadi instrumen politik yang jauh dari kepentingan publik namun dekat pada kepentingan politik pemiliknya. Media massa rentan sebagai alat memperkuat citra politik pemiliknya atau merusak citra politik lawan politiknya. Dalam situasi politis misalnya Pemilu, hal ini sangat berbahaya bagi.

Dalam perspektif liberalisasi, pemberian kesempatan usaha yang lebih luas lewat UU Pers dan UU Penyiaran telah memunculkan konsolidasi kapitalisme media yang hanya memberikan keuntungan bagi pemilik industri saja. Kapitalisme yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berusaha, ternyata memunculkan anomali dimana kebebasan media justru menciptakan konvergensi kepemilikan media. Ruang ekonomi dalam liberalisasi media masih terlalu kuat dibandingkan ruang ekspresi yang juga merupakan elemen dari prinsip-prinsip liberal. Liberalisasi media menjadi paradoks dalam dirinya sendiri.

Persoalan teknologi juga penting untuk dibahas berkaitan dengan tema konglomerasi. Jika dilihat pada Tabel 22, perluasan bisnis sebuah kelompok usaha media sebagian besar disertai oleh ekspansi pada media *online*. Hanya ada 3 kelompok bisnis yang tidak memiliki media *online* yaitu *Femina Group*, *MRA Group*, dan *Mahaka Group*.

Dengan payung hukum yang rentan dalam aspek kepemilikan, pertumbuhan teknologi di Indonesia tidak disertai oleh regulasi yang kuat. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas perihal konvergensi media. Saat ini Indonesia baru memiliki draft UU Konvergensi. Dalam ketiadaan hukum itu, persoalan hukum kepemilikan media online menjadi kabur. Kondisi ini pernah dimanfaatkan oleh

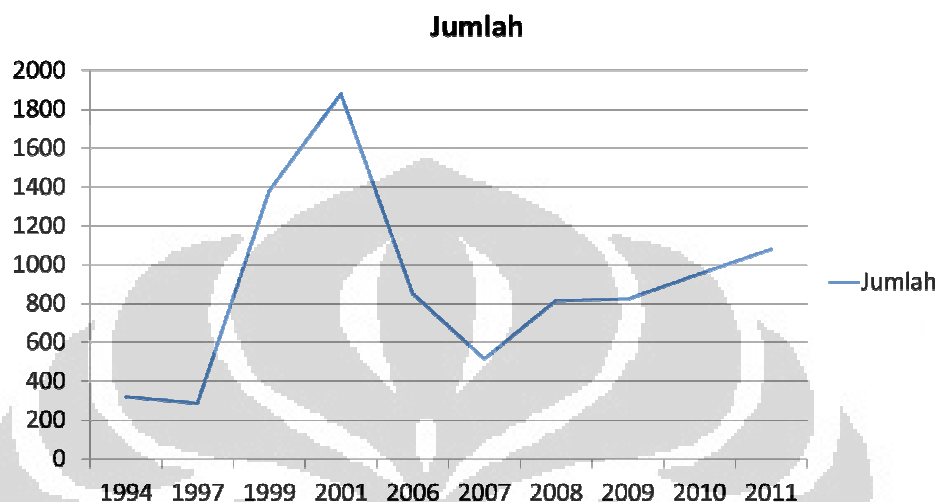
kelompok bisnis penyiaran dengan bekerjasama dengan regulator yaitu Depkominfo lewat Peraturan Menteri No 22 dan 23 tahun 2011 tentang kepemilikan *multi plexing* dalam penyiaran digital. Peraturan ini pada intinya mengatur bahwa kepemilikan media penyiaran digital langsung mengikuti kepemilikan media penyiaran terrestrial. Ini ironis dalam konteks demokratisasi penyiaran karena konsentrasi kepemilikan sudah terjadi dalam penyiaran terrestrial. Jika mereka otomatis memiliki penyiaran digital, maka usaha diversifikasi kepemilikan yang sangat mungkin terjadi lewat medium digital menjadi hilang. Peraturan ini juga sumir karena Indonesia belum memiliki UU Penyiaran Digital tapi menteri sudah menerbitkan Permen. Permen ini akhirnya dibatalkan. Meskipun batal, tapi cara berpikir seperti yang tercermin dalam Permen ini bisa menjadi preseden penting.

5.3.2 Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik dalam Media Industrial

Liberalisasi pers cetak sesudah UU Pers No. 40/1999 membawa implikasi yang luar biasa pada dinamika pers di Indonesia. Serikat jurnalis tumbuh subur; siapapun bisa mendirikan perusahaan pers; jumlah jurnalis juga meningkat pesat. Dari sisi jumlah media, terjadi lonjakan besar. Itu semua terjadi karena UU Pers No. 40/1999 tidak lagi memberlakukan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti era Orde Baru. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah pers cetak. Pada tahun 1994, anggota Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) adalah 318. Sesudah 1999, tidak ada data yang berhasil dikumpulkan sampai tahun 2006 ketika Dewan Pers melakukan registrasi perusahaan pers. Jumlah ini belum tentu mencerminkan jumlah sesungguhnya karena yang ditulis adalah perusahaan yang melakukan registrasi dan sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Estimasi ledakan jumlah pers cetak terjadi pada tahun 2000 dimana diperkirakan ada sekitar 2000 pers cetak. Jumlah itu terus menurun karena banyak pers cetak tidak memenuhi selera pasar dan akhirnya tutup.

Tabel 24

Jumlah Perusahaan Pers Cetak 1994-2011



Sumber: Dewan Pers, SPS

UU Pers No. 40/1999 merupakan kemenangan mutlak masyarakat sipil terhadap otoritarianisme negara. UU Pers berhasil menanggalkan regulasi-regulasi yang mengancam kemerdekaan pers dan memosisikan pers di bawah otoritas politik Orde Baru. Pendeknya, UU Pers telah berhasil membawa pers Indonesia ke arah pers liberal. Tak lama kemudian, *Reporters sans Frontiers* memosisikan Indonesia sebagai negara dengan pers paling bebas se-Asia pada tahun 2001.

Akan tetapi, posisi itu tidak berlangsung lama. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2002 pun, posisi Indonesia di Asia sudah dikalahkan oleh Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Sri Lanka. Pada tahun 2011, posisi Indonesia adalah 146 dari 179 negara. Indonesia juga termasuk salah satu dari lima negara yang berbahaya bagi aktivitas jurnalistik pada tahun 2010. Sejak peristiwa pembunuhan Udin, wartawan Bernas Yogyakarta pada tahun 1996, ada 9 pembunuhan jurnalis lain yang tidak terungkap secara hukum hingga saat ini. Kebanyakan kasus itu

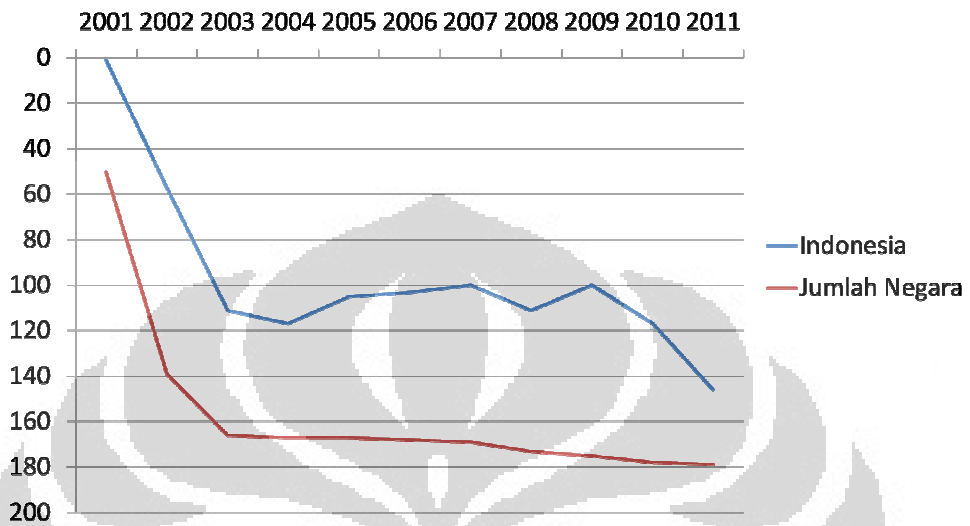
berhubungan dengan pejabat negara. Kekerasan terhadap jurnalis juga cenderung merebak dan meningkat sejak tahun 2009 (Tabel 25). Kekerasan terhadap jurnalis berasal dari aparat negara, pejabat, dan masyarakat.

Kekerasan terhadap jurnalis bisa diinterpretasikan karena beberapa hal. *Pertama*, penerimaan publik dan aparat negara terhadap kemerdekaan pers masih rendah. Aktivitas reportase jurnalistik dianggap sebagai ancaman politik dan ekonomi. Secara legal, hal ini juga berhubungan dengan masih adanya aturan tentang pencemaran nama baik (*defamation*) yang bersumber dari KUHP. Ketika terjadi sengketa pers, aparat hukum masih sering menggunakan KUHP dan bukan UU Pers. *Kedua*, performa profesional dan etik jurnalis masih rendah. Indonesia memiliki Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI, sebelumnya Kode etik Jurnalistik atau KEJ) yang salah satunya mengatur bahwa jurnalis tidak boleh menerima uang dari nara sumber selama melakukan kegiatan jurnalistik. Namun survei AJI tahun 2006 di 17 kota besar di Indonesia membuktikan bahwa 65% jurnalis masih menerima suap. Survei yang sama juga membuktikan bahwa jurnalis yang pernah membaca KEWI jumlahnya kurang dari 10%. Menurut catatan Dewan Pers (2007), hanya 249 (30%) dari 829 media cetak berkualitas standar, dan hanya 10% dari 2.000 radio dan 65 TV berkualitas standar.

Faktor utama penyebab jurnalis menerima suap adalah rendahnya gaji yang diterima. Sampai saat ini masih ada jurnalis yang digaji Rp 200.000 per bulan. Stasiun televisi di Jakarta menggaji jurnalis pemula hanya sedikit di atas UMP. Jadi, profesionalisme jurnalistik tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman jurnalis tentang etika jurnalistik namun juga pemberian gaji yang tidak layak oleh manajemen media. Berkenaan dengan maraknya kekerasan terhadap jurnalis, diketahui juga bahwa perusahaan pers jarang melakukan pelatihan keamanan bagi jurnalis. Pelatihan-pelatihan semacam itu banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar perusahaan pers.

Tabel 24

Indeks Kebebasan Pers Indonesia

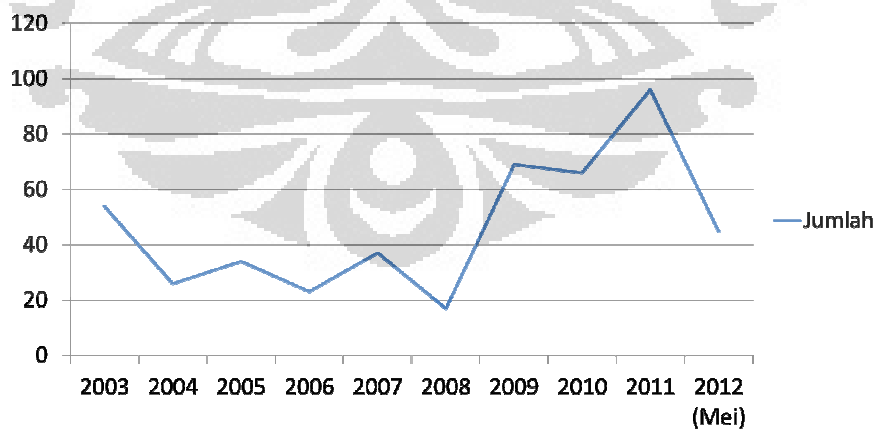


Sumber : Reporters sans Frontieres

Tabel 25

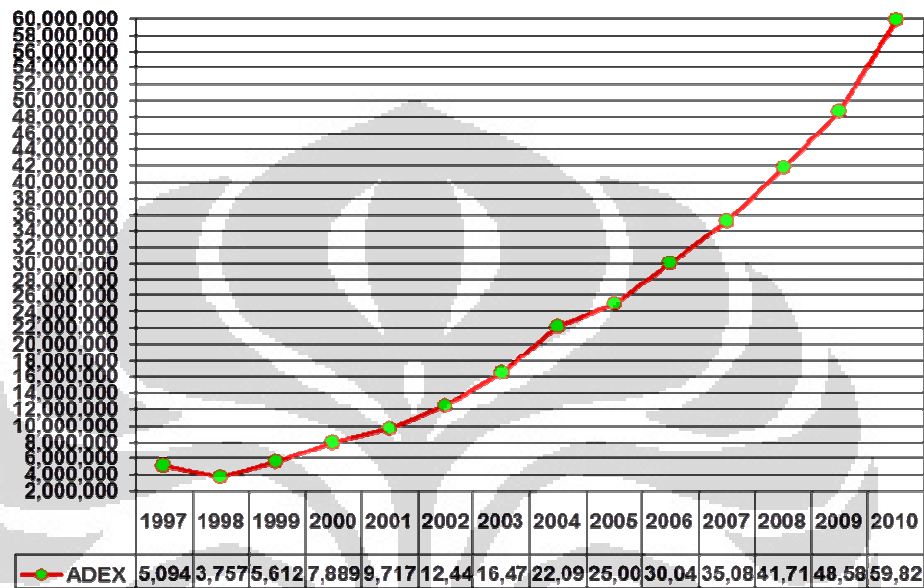
Jumlah Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jumlah



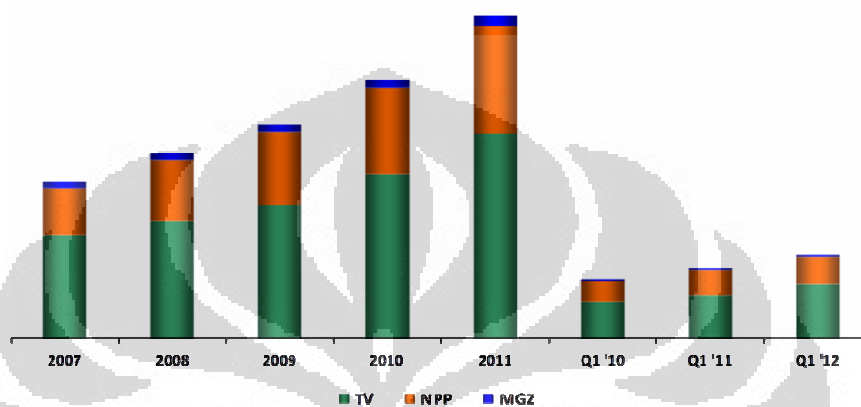
Sumber: LBH Pers

Tabel 26
Belanja Iklan 1997-2010
 (dalam 000,000)



Sumber : Adquest Millenium

Tabel 27
Pertumbuhan Iklan Berdasarkan Jenis Media
(dalam miliar Rupiah)



Sumber: Adquest Millenium

Yang menarik untuk dicatat adalah adanya fakta bahwa walaupun performa kebebasan pers dan profesionalisme jurnalistik cenderung rendah, angka belanja iklan yang menjadi ujung dari liberalisasi media pada dimensi ekonomi justru meningkat sejak 1998. Tabel 16 menunjukkan bahwa belanja iklan hanya sempat menurun pada tahun 1998 karena krisis politik pasca kejatuhan Soeharto. Namun sesudah itu, belanja iklan selalu naik sampai tahun 2010. Pada tahun 2011, pertumbuhan iklan di televisi juga naik sebesar 24%, surat kabar 10% dan majalah 7%. (Tabel 27). Pada 2012, pertumbuhan total seluruh media diharapkan paling tidak sebesar 19%.

Data-data di atas cukup menggelisahkan karena secara makro terlihat bahwa pertumbuhan industri media dengan indikator omset iklan ternyata berbanding terbalik dengan kualitas kemerdekaan pers. Pertumbuhan iklan tetap saja melaju tanpa dipengaruhi oleh kualitas kemerdekaan pers.

Liberalisasi media di Indonesia bisa dilihat dalam dua aspek yaitu aspek institusi media dan aspek ekspresi jurnalistik. Pada aspek institusi media, liberalisasi pers telah mampu membebaskan siapapun untuk melakukan bisnis media, terutama media cetak. Ini bisa dilihat dari *booming* jumlah perusahaan pers pasca 1999 (Tabel 24). Dari sisi insitusi media, ini adalah perkembangan bagus yang tidak hanya menjamin publik untuk mendapatkan informasi, tapi juga menjamin hak untuk berbisnis dalam wilayah media.

Akan tetapi, dari aspek ekspresi jurnalistik, liberalisasi media di Indonesia sampai saat ini belum mampu menciptakan iklim yang melindungi hak-hak jurnalis dan menjamin independensi jurnalistik. Masih ada ancaman kriminalisasi dan kekerasan yang jauh dari prinsip liberal itu sendiri. Padahal dalam sejarahnya, liberalisasi media di Indonesia sangat berdimensi politik lewat perjuangan para jurnalis pada penghujung era Orde Baru. Perusahaan media menjadi pihak yang paling menentukan dalam kasus ini. Perusahaan media yang diuntungkan oleh iklim bisnis yang kondusif lewat UU Pers No. 40/1999 belum mampu memberikan fasilitas yang layak bagi jurnalis untuk beraktivitas secara independen. Kebanyakan perusahaan media tidak menyediakan pelatihan jurnalistikk yang layak dan sering tidak bertanggungjawab ketika terjadi masalah dengan jurnalisnya. Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis lebih banyak ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat seperti AJI dan LBH Pers.³¹

Liberalisasi media yang terjadi di Indonesia sampai saat ini berhasil mengonsolidasikan kekuatan industri namun belum berhasil memperkuat dimensi ekspresi jurnalistik. Dari banyak diskusi dengan jurnalis dan aktivis LSM, penulis menyimpulkan bahwa masalah kebebasan pers di Indonesia sekarang lebih banyak ditentukan oleh perusahaan media itu sendiri ketimbang tekanan eksternal. Persoalan legal dimana ada UU Pers yang bertentangan dengan KUHP pada masalah kriminalisasi sudah bisa diatasi lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 30 Desember 2008 yang intinya menyerukan

³¹ Wawancara dengan Eko Maryadi, 24 Mei 2012. Pada kasus pembunuhan jurnalis di Papua tahun 2011 misalnya, AJI langsung melakukan advokasi lapangan. Demikian juga pada kasus pembunuhan Pandu Wira Bangsa di Bali. AJI melakukan advokasi pada kasus yang menimpa anggotanya maupun jurnalis yang bukan anggota AJI.

kepada para hakim untuk meminta konsultasi Dewan Pers dalam menangani sengketa pers.

Karena secara makro kelihatan bahwa liberalisasi media menguntungkan industri media, maka persoalan menjadi lebih menarik jika dilihat hubungan antara jurnalis dan perusahaan media. Meletakkan masalah pada relasi jurnalis dengan perusahaan pers menghasilkan beberapa temuan penting. Persoalan mendasar bagi jurnalis sekarang adalah rendahnya pendapatan dari perusahaan media serta rendahnya pembekalan teknik jurnalistik dari perusahaan media. Dua persoalan ini menggeser tekanan aktivitas jurnalistik dalam era Orde Baru dimana tekanan politik mendominasi dinamika jurnalistik.

Ada perbedaan mendasar antara dominasi yang berbasis negara (*state-based domination*) dengan dominasi yang berbasis pada pasar (*market-based domination*). Dominasi yang berbasis pada negara memiliki sifat represif yang memuncak pada pembunuhan jurnalis atau pemenjaraan jurnalis karena aktivitas jurnalistiknya, dan berdampak pada eksistensi lembaga media. Kasus pembunuhan Udin di tahun 1996, pemenjaraan jurnalis di pertengahan 1990-an, dan pembredelan Kompas tahun 1978; pembredelan *Tempo*, *Editor*, *Detik* tahun 1994 mewakili karakter ini. Sedangkan dominasi yang berbasis pada pasar bersifat intrusif. Dominasi jenis ini mengontrol dengan cara tanpa kekerasan melalui *news room*, manajemen media termasuk gaji jurnalis, dan hubungan industrial antara manajemen dan jurnalis.

Dalam logika manajemen media industrial, posisi jurnalis tidak lebih sebagai salah satu faktor produksi di antara faktor produksi yang lain. Pada logika seperti ini, aspek-aspek profetik dari jurnalisisme seperti independensi dan *watch dog* bisa menjadi luntur karena pertimbangan pasar. Logika produksi yang mendewakan efisiensi bisa saja mengesampingkan jurnalis dengan memberi gaji tidak memadai yang akan berujung pada kualitas jurnalistik yang rendah. Yang menjadi pertimbangan utama adalah pendapatan finansial perusahaan melalui iklan.

Tabel 28
Gaji Wartawan Berdasarkan Jabatan³²
 (%)

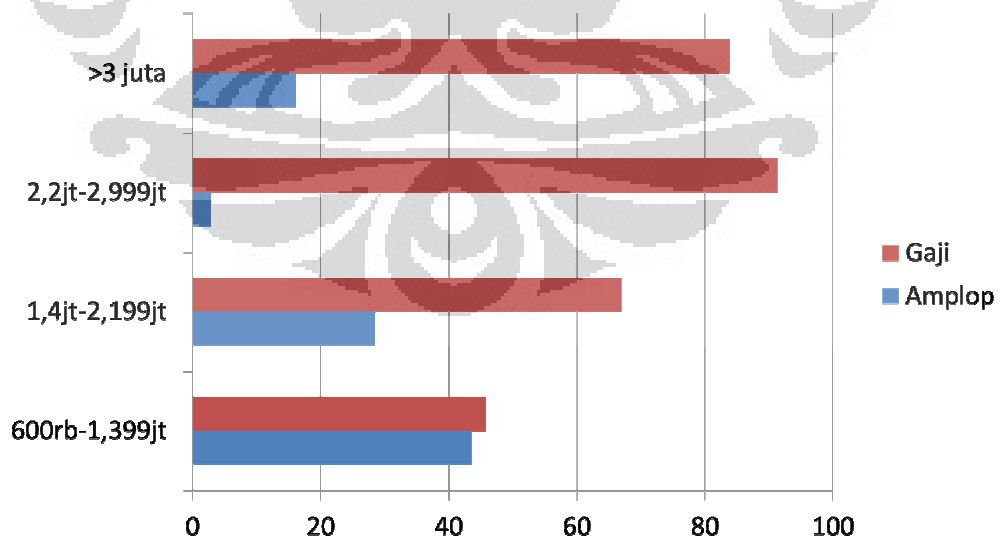
Gaji (000)	Posisi (Jabatan) di Media					
	Reporter	Penanggungjawab Rubrik	Koord. Reportase	Redaktur	Redpel.	Pimred.
<200	1,9			1,2		
200-599	12,6	8,3		1,2	27,3	9,1
600-999	26,8	16,7	12,5	17,3		
1.000- 1.399	27,1	16,7	6,3	25,9	18,2	18,2
1.400- 1.799	13,0	25	37,5	22,2	18,2	18,2
1.800- 2.199	5,2	8,3	18,8	3,7	9,1	9,1
2.200- 2.599	4,8	8,3	12,5	6,2	18,2	
2.600- 2.999	2,6	8,3	6,3	2,5		9,1
3.000- 3.399	1,1			6,2		9,1

³² *Potret Jurnalis Indonesia, Survey AJI tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota, AJI Indonesia, 2005, halaman 16*

3.400- 3.799	1,1			9,1
3.800- 4.199	0,7	6,3	2,5	
4.200- 4.599	0,4		3,7	9,1
4.600- 4.999			2,5	
5.000>		8,3	3,7	9,1
Tidak menjawab	2,6		1,2	9,1

Tabel 29

Sikap terhadap Amplop Menurut Jumlah Penghasilan³³



³³ AJI Indonesia (2005), *op. cit.* halaman 81

Jika dibandingkan antara laju kenaikan belanja iklan dengan indeks kebebasan pers, angka kekerasan terhadap jurnalis, dan tingkat upah pekerja pers, ada dua kesimpulan yang bisa diambil:

- Laju kecepatan pertumbuhan finansial media tidak sebanding dengan laju perlindungan profesi pekerjanya. Ini merupakan kontradiksi karena pekerja sebagai penyumbang utama dalam produksi ternyata justru tidak mendapatkan jaminan keselamatan yang justru menjadi basis dari proses produksi tersebut. Tidak banyak perusahaan media yang memberikan pelatihan keamanan bagi para jurnalisnya.
- Yang terjadi pada industri media merupakan gejala khas dalam industrialisasi pada sektor lain dimana harga barang dan jasa melesat, sementara upah buruh diabaikan. Kritik semacam ini pernah disampaikan oleh Marx (teori nilai lebih) dimana nilai lebih dari produk yang dihasilkan oleh buruh hanya bisa dinikmati oleh perusahaan dan tidak bisa dinikmati oleh buruh. Perolehan laba perusahaan tidak serta-merta membuat kesejahteraan buruh meningkat.
- Telah terjadi disekrepansi pada level struktural dan level *agency*. Pada level struktural, sistem pers telah berhasil diliberalisasikan dalam arti politik dan ekonomi. Struktur-struktur hukum dan ekonomi sudah relatif tertata sesuai dengan prinsip-prinsip liberal. Akan tetapi pada level *agency*, liberalisasi belum mampu membawa perlindungan yang cukup untuk jurnalis dalam arti politik maupun ekonomi. Dalam dimensi politik, kekerasan terhadap jurnalis masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Dalam dimensi ekonomi, pendapatan jurnalis belum sepadan dengan laju pertumbuhan bisnis media.

5.3.3 Serikat Pekerja Pers

Persoalan kualitas jurnalistik dan keamanan terhadap jurnalis berhubungan dengan kualitas pekerja pers. Serikat pekerja pers merupakan jalan keluar struktural organisasional untuk meningkatkan *bargain position* jurnalis terhadap manajemen dan pemilik media. Bentuk inilah yang dikenal dalam hubungan kerja di sistem industry modern.

Persoalan liberalisasi dan industrialisasi media mau tidak mau akan mengubah hubungan kerja antara jurnalis dan pemilik media. Dalam UU Pers No. 40/1999, hubungan itu ditegaskan berada dalam koridor hubungan industrial pemilik media dan pekerja pers, seperti halnya terjadi pada relasi kerja pada industri sektor lain. Dengan demikian hubungan kerja dalam media liberal berbasis kelas yaitu hubungan kerja antara pemilik modal dan buruh.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meletakkan penguatan serikat pekerja pers sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kualitas jurnalis. Asumsi dari strategi ini adalah bahwa AJI mengakui peran jurnalis sebagai buruh dari perusahaan media. Akan tetapi tidak mudah untuk serta-merta mengatakan bahwa jurnalis adalah buruh. Identitas ini memiliki kompleksitas historis yang tinggi. Jurnalis merasa berbeda dengan buruh pada umumnya walaupun jika ditelusur lebih jernih, klaim itu tidak jelas asal-usulnya. Berbeda dengan dokter, jurnalis tidak bisa bekerja sendirian tanpa perusahaan media. Profesi jurnalis tidak bisa berdiri sendirian secara individual namun tetap membutuhkan perusahaan pers sebagai pemilik badan hukum. Daniel Dhakidae (1991) mencatat bahwa kompleksitas identitas ini berakar dari sejarah pers perjuangan yang secara historis menjadi dasar bagi munculnya pers. Pers muncul dalam konteks perjuangan politik Indonesia dalam berbagai konteks ekonomi politik waktu itu. Dalam pers perjuangan, relasi antara pemilik media dan jurnalis tidak bersifat hubungan antar kelas namun sama-sama bekerja untuk mencapai sebuah idealitas perjuangan tertentu.

Sesudah era dimana logika industri muncul dalam kehidupan pers, masalah hubungan industrial ini muncul dalam ranah kepemilikan media. Menurut pers perjuangan, tidak ada perbedaan kelas antara jurnalis dan pemilik media. Akan tetapi logika ini melanggar prinsip hubungan industri. Sebagai jalan tengah, menurut regulasi tahun.....diberlakukan sistem kepemilikan bersama antara pemilik media dan jurnalis (*co-ownership*) dengan memberikan saham sebesar 20% kepada serikat pekerja media. Akan tetapi sistem ini mengandung potensi *blunder* juga. Pada saat media untung, tidak ada masalah. Pembagian deviden akan dilakukan sesuai komposisi kepemilikan saham. Akan tetapi pada saat perusahaan merugi, situasinya menjadi sulit karena tidak mungkin untuk meminta pertanggungjawaban kepada serikat pekerja pers sesuai proporsi sahamnya.

Walaupun hubungan industrial menurut UU No, 40/1999 sudah jelas, kompleksitas dan beban historis itu tetap ada. Kepada jurnalis tetap dibebankan suatu konstruksi idealitas tertentu yang mengakar pada sejarah pers perjuangan. Jurnalis tidak diposisikan melulu sebagai pekerja pers tapi wajib menjalankan misi profetik tertentu. Walaupun mirip seperti mitos, konstruksi pemahaman ini tetap terjadi. Jurnalis mengalami *split identity* antara “peran profetik” dan sebagai buruh pekerja pers. Situasi ini berbeda dengan negara lain yang tidak memiliki sejarah pers perjuangan misalnya Amerika dan Malaysia dimana jelas-jelas jurnalis menyadari identitasnya sebagai pekerja media. Narasumber di Semarang, seorang jurnalis, menegaskan bahwa jurnalis biasanya menyadari identitas sebagai pekerja ketika mengalami masalah sengketa hubungan industrial. Instrumen hukum yang dipakai untuk menangani sengketa industrial adalah UU Tenaga Kerja. Hal-hal yang bersifat profetik ternyata tidak diatur dalam sistem hukum yang ada.

Refleksi teoritik yang bisa diambil dari situasi ini adalah bahwa terjadi ketegangan antara struktur dan *agency* dalam pers pasca liberalisasi. Secara struktural dan kelembagaan, tidak ada masalah dengan liberalisasi media. Organisasi media mampu menyesuaikan diri dan mengambil manfaat dari liberalisasi berupa pertumbuhan bisnis media. Akan tetapi pada tingkat *agency*, jurnalis mengalami *split personality* antara ketidaksiapan mengalami “bunuh diri kelas” dengan menjadi buruh pers dan realitas bahwa secara

struktural, posisi mereka memang pekerja pers yang secara hukum diatur dalam UU Tenaga Kerja.

Dalam faktanya, ketegangan itu diselesaikan secara relatif menurut kebijakan media sendiri. Secara umum, serikat pekerja pers tidak mendapat tempat di perusahaan media, apalagi dengan kepemilikan bersama dengan proporsi 20% untuk serikat pekerja. Banyak perusahaan pers tidak mengizinkan berdirinya serikat pekerja pers. Di kalangan jurnalis sendiri, ide tentang serikat pekerja pers langsung diterima.³⁴

Pada level manajemen dan pemilik media, kompleksitas juga terjadi. Mereka juga terbelah dalam memperlakukan jurnalis antara peran jurnalis sebagai faktor produksi namun tidak menyetujui serikat pekerja pers seperti halnya pada perusahaan lain. Liberalisasi media yang sudah mendorong perusahaan media untuk mendapatkan pendapatan lebih tidak disertai oleh manajemen yang mendorong munculnya serikat pekerja. Perusahaan pers tidak siap dengan penguatan serikat pekerja yang akan menguatkan *bargain position* yang dinilai akan mengganggu manajemen media. Mereka lebih nyaman dengan peran jurnalis sebagai faktor produksi dalam pengertian negatif yang mudah dikelola dan “lunak”. Berdasarkan catatan AJI (2012), penguatan bisnis dan konglomerasi media tidak disertai oleh penguatan serikat pekerja. 12 kelompok usaha media itu memiliki serikat pekerja pers, namun hanya Tempo saja yang memiliki kualitas serikat pekerja bagus melalui mekanisme Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan serikat pekerja. AJI juga mencatat bahwa dari ribuan perusahaan media di Indonesia, hanya ada 31 serikat pekerja pers.³⁵

5.3.4 Depolitisasi dalam Media Liberal

³⁴ Bahkan untuk media sekaliber *Kompas* sekalipun, persoalan serikat pekerja pers menjadi persoalan sensitif. Bambang Wisudo, salah seorang mantan jurnalis *Kompas*, harus rela keluar dari *Kompas* karena menuntut proporsi saham 20% bagi serikat pekerja pers. Ide itu juga tidak secara keseluruhan disetujui oleh sesama jurnalis. Kasus serupa sebelumnya juga terjadi pada Albert Kuhon.

³⁵ <http://www.metrosuryanews.com/2012/03/kebebasan-berserikat-di-industri-media.html> diunduh pada 31 Mei 2012

Apa yang kurang dari pers Indonesia? Bukankah setiap hari televisi, surat kabar, internet, dan radio terus-menerus melakukan fungsi kontrol sosial? Tak henti memberitakan berbagai kasus korupsi dan arogansi aparat negara. Rajin melaporkan penderitaan rakyat dan kealpaan pemerintah dalam membangun daerah-daerah pelosok Tanah Air. Media juga terus-menerus mengingatkan publik pada tujuan awal berdirinya republik. (Yohanes Krisnawan, Kompas, 8 Juni 2012)

Litbang Harian *Kompas* secara rutin melakukan riset tentang konsumsi media. Untuk tahun 2012, mereka melihat pola konsumsi media berdasarkan kelas sosial. Kelompok sosial dibagi ke dalam kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah, kelas bawah, dan kelas sangat bawah. Parameter yang dipakai adalah tingkat pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola keterhubungan antara kelas sosial dengan jenis media yang disukai, dan jenis informasi yang disukai. Kelas atas dan kelas menengah atas cenderung untuk membaca surat kabar (62% dan 35%) dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi ekonomi dan politik serta *agenda setting* media. Sementara kelas bawah lebih menyukai televisi dengan informasi favorit tentang olahraga dan kriminalitas.

Hal menarik lain dari riset itu adalah hubungan informasi yang disukai dengan perilaku politik. Kelas menengah dan kelas atas menyukai informasi politik. Mereka ingin tahu perkembangan kasus korupsi yang diberitakan secara serial oleh media. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka enggan untuk berpartisipasi aktif dalam politik misalnya terjun ke organisasi. Artinya, informasi yang disukai tidak berhubungan dengan tindakan motorik sosial para responden. Partisipasi politik direduksi menjadi kegiatan merespon situasi lewat jejaring sosial, sambil menikmati kopi tau berbelanja di mal.

Yang menarik untuk dicatat adalah fakta bahwa ketertarikan informasi politik tidak serta merta mendorong orang untuk melakukan tindakan dari partisipasi politik. Dalam konteks media, hal ini menjadi penting untuk dibahas karena berhubungan dengan habitat tempat hidup media secara lebih luas. Mengutip Haryatmoko (2007), laporan *Kompas* itu menulis bahwa

Sesungguhnya media dan kelas menengah berada dalam pusaran kapitalisme global, di mana konsumerisme, komersialisasi gaya hidup,

dan individualisasi tidak bisa dikontrol. Meskipun memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena ini, tak ada gerakan perlawanan terorganisasi yang didukung oleh struktur yang kuat dan ideologi yang serius. Dalam media, ruang publik menjadi tempat pertunjukan, dan politik menjadi panggung tontonan.

Tabel 30

Pola Konsumsi Media

Media yg. Digunakan	Kelas Atas	Menengah Atas	Menengah Bawah	Bawah	Sangat Bawah
SURAT KABAR					
Waktu Baca	Setiap hari	1-7 kali seminggu	1 kali seminggu-tiap hari	Beberapa kali seminggu	Mayoritas tidak baca
Cara Akses	Langganan	Langganan-eceran	Eceran, pinjam, langganan	Eceran dan pinjam	Eceran dan pinjam
Topik yg. Dibaca	Ekonomi	Politik	Politik dan olahraga	Olahraga dan kriminalitas	Olahraga, kriminal, harga barang
Lama Baca	1-2 jam	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit
TELEVISI					
Waktu menonton	Beberapa kali seminggu-tiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
Jenis Program	Berita, komedi	Berita, sinetron, film	Berita, sinetron, komedi	Sinetron, komedi, infotainment	Sinetron, komedi, olahraga
Lama menonton	30-45 menit	30-34 menit	Lebih dr. 2 jam	Lebih dr. 2 jam	Lebih dr. 2 jam

INTERNET					
Pengguna	76% setiap hari	58%, mayoritas tiap hari	34% tiap hari dan tidak tentu	15% tidak tentu	6% tidak tentu
Waktu Akses	45 menit- 2 jam sehari	>3jam sehari	1-2 jam sehari	Tidak tentu	Tidak tentu
Alat	Laptop dan ponsel pribadi	Laptop, komputer, ponsel pribadi	Laptop dan ponsel pribadi	Ponsel pribadi dan warnet	Ponsel pribadi dan warnet
Situs yg Diakses	Berita, jejaring sosial, jual beli online	Berita, jejaring sosial, hiburan	Berita, jejaring sosial, hiburan	Berita, jejaring sosial, hiburan	Berita, jejaring sosial, hiburan

Sumber: *Kompas*, 8 Juni 2012

Dalam studi ekonomi politik media di Indonesia, ada simpangan penting dalam sejarah pers yaitu ketika pers yang bercorak politis telah bergeser menjadi pers yang lebih bercorak industrial. Daniel Dhakidae (1991) menjelaskan bahwa titik simpang itu terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru. Konteks makronya adalah kebijakan Trilogi Pembangunan Orde Baru yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan stabilisasi politik. Dari sisi stabilisasi politik, Orde Baru memangkas jumlah partai untuk menghindari dinamika politik yang hiruk-pikuk dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan semakin leluasa terjadi. Orde Baru kemudian menyederhanakan dinamia politik dengan kebijakan fusi menjadi tiga partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dengan latar kebijakan seperti itu, media massa juga mengalami depolitisasi berita secara luar biasa. Preseden penting terjadi pada tahun 1978 ketika Soeharto membredel surat kabar besar. Pesan politik yang disampaikan Soeharto kepada media-media itu jelas: jangan kritis terhadap kekuasaan

politik, atau siaplah untuk dibredel. Ketika itu, terjadi aksi mahasiswa. Surat kabar yang ditutup adalah yang memberitakan aksi tersebut.

Media massa Indonesia pada era Orde Baru kemudian berkembang dengan pola yang secara politik tidak bebas namun media diberi kesempatan untuk berkembang secara ekonomi. Media massa yang taat pada politik Orde Baru dengan tidak memberikan kritik secara frontal diberi keleluasaan untuk memperbesar bisnisnya. Tabel 14 menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an secara umum terjadi konsolidasi ekonomi dalam industri pers kita walaupun jumlah pemainnya menurun. Dengan adanya pertumbuhan iklan dan munculnya kelas menengah, media massa semakin tampak berorientasi pada gaya hidup yang apolitis.

Pada taraf ini, telaah akan mengarah pada cara berpikir neo marxis. Daniel Dhakidae (1991) juga mencatat gejala dinamika jurnalisme menjadi tidak lebih dari sekedar industri populer yang mirip dengan industri musik namun dengan pola yang lebih rumit. Kerumitan itu terletak pada relasi jurnalisme dengan kelembagaan industri pers itu sendiri dan relasinya terhadap struktur kebijakan yang ada. Dhakidae mengambil ungkapan Adorno dan Horkheimer tentang *intellectualization of amusement* dan menambahinya menjadi *standardized intellectualization of amusement and entertainment*. Jurnalisme tidak diatur oleh logika bebas nilai yang menentukan gaya jurnalistiknya, akan tetapi tujuan bisnislah yang menentukan gaya jurnalistik. Karena dalam media juga terhadap sistem hirarki organisasi, maka pola ini relevan dengan apa yang dikatakan Adorno dan Horkheimer sebagai *obedience to social hierarchy*.

Ada sebuah paradoks dalam jurnalisme industrial. Pada level reporter, jurnalis bebas menentukan gaya jurnalistiknya. Akan tetapi dalam kebebasannya itu, dia harus siap untuk diedit tulisannya oleh editor di level yang lebih atas. Demikian hirarki ini bekerja sampai pada taraf organisasi media itu sendiri harus taat pada hirarki di atasnya yaitu kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Wacana yang dibangun dalam jurnalistik harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan makro yang mau tidak mau harus ditaati oleh organisasi pers.

Dallas W. Smythe memberi penjelasan bahwa proses jurnalistik melibatkan kreativitas individual dalam sebuah sistem yang rumit yang terdiri dari *manufacturing* dan distribusi. Jurnalisme adalah *software* yang disuplai untuk mengisi *hardware* sistem surat kabar. Konteks otoritarian Orde Baru sebagai lingkungan makro surat kabar membuat gaya jurnalistik pada era Orde Baru menjadi tidak kritis dan apolitis.³⁶ Terputusnya wacana jurnalistik dari kegiatan dan ideologi politik membuat posisi berita menjadi rentan terhadap proses komodifikasi. Meskipun berita itu adalah berita politik sekalipun, wacana yang dibangun dalam berita tersebut tetap tidak berhubungan dengan tindakan politik pembacanya seperti ditunjukkan oleh riset Litbang *Kompas* di atas.

Akan tetapi, depolitisasi media sejak Orde Baru tidak hanya berhubungan dengan karakter politiknya, namun secara lebih luas juga dipengaruhi oleh ideologi pertumbuhan yang pada dasarnya adalah neoliberal. Integrasi ekonomi Orde Baru ke dalam sistem neoliberal berdampak pada struktur industri media yang apolitis. Ini kembali kepada prinsip dasar neoliberalisme yang memang menghendaki tidak adanya dominasi politik dalam struktur sosial, melainkan dominasi ekonomi. Media mendorong masyarakat untuk tidak bertindak sebagai warga negara melainkan bertindak sebagai konsumen dalam koridor jual beli dan konsumsi.

Dalam iklim yang kapitalistik, depolitisasi terjadi baik pada level media massa maupun masyarakat terutama kelas menengah. Tabel... menunjukkan bahwa kelas menengah dan kelas menengah atas membutuhkan informasi tentang politik namun sebatas pada kebutuhan untuk tahu saja dan tidak berhubungan dengan aktivitas yang politis misalnya lewat berorganisasi. Kebutuhan untuk mengetahui kasus Gayus, Angelinda Sondakh, dan sejenisnya misalnya, tidak secara langsung berhubungan dengan tindakan untuk melawan dalam ranah politik.

Dalam dunia yang komersial, ada dua masalah krusial terkait informasi. *Pertama*, informasi pada akhirnya tidak menjadi kebutuhan manusia dalam konteks di luar tujuan

³⁶ Akan tetapi, pola ini mengalami anomali pada kasus tabloid *Detik* yang dibuat oleh Eros Djarot untuk mendukung PDIP, dimana tabloid ini murni politik tanpa berpretensi untuk mendapatkan iklan komersial.

konsumsi dan gaya hidup. *Kedua*, dengan semakin majunya teknologi dan arus komersial, media dituntut untuk bekerja dalam waktu yang lebih cepat. Padahal pelaku jurnalistik makin menyebar. Jurnalisme juga dituntut untuk lebih frekuentif dalam menyampaikan berita. Haryatmoko (2007) mengistilahkan dengan logika waktu pendek yang salah satunya ditandai oleh simpang siur informasi.

Ketika simpang siur informasi itu semakin tidak terkontrol, kita semua sedang menghadapi persoalan serius: informasi tengah mengalami krisis legitimasi. Jurnalisme juga mengalami titik simpang serius ketika semua orang bisa memerankan fungsi jurnalis. Nilai berita menjadi kabur. Batas antara informasi jurnalistik dan informasi non jurnalistik menjadi kabur. Masyarakat pun bingung mencari informasi yang bisa dipercaya. Realitas menjadi kabur.

Kekaburan (*blur*) menjadi diskusi penting dalam kajian jurnalistik dan informasi sesudah Bill Kovach dan Tom Rosentiel – sebelumnya menulis *The Elements of Journalism* – menulis buku berjudul *Blur, How to Know What's True in the Age of Information Overload* (2010). Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengajukan masalah bagaimana kita harus percaya dan tidak percaya pada informasi. Sumber masalahnya adalah perkembangan teknologi modern. Teknologi pula yang telah membuat dunia modern menjadi berlari kencang.

Dunia yang makin berlari kencang juga terjadi pada wilayah informasi. Perusahaan media *online* beradu cepat menurunkan berita. Para penjaga gawang validitas informasi seperti jurnalis dan editor pun tak jarang kelabakan menghadapi gempuran informasi yang *overloaded*. Tak jarang mereka larut dalam kekalutan informasi seperti yang kita lihat dalam simpang siur berita tragedi Sukhoi. Ketika penambahan kecepatan penyampaian informasi makin dituntut, pertimbangan kelayakan berita dalam logika jurnalisme tradisional pun sering dikesampingkan.

Selain dari kompetisi informasi dari beragam media, kesimpangsiuran juga terjadi karena masyarakat biasa pun bisa memproduksi informasi. *Citizen journalist, blogger*, dan siapapun bisa membuat dan mengirimkan informasi lewat jaringan teknologi sehingga

konstruksi opini publik pun menjadi sangat rapuh. Percepatan perubahan opini publik menjadi tinggi. Batas antara benar dan salah menjadi tipis.

Dunia yang berlari (*runaway world*) adalah konsep yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Giddens melihat bahwa modernitas ciptaan manusia telah mencapai kecepatan dimana manusia sendiri sudah tidak bisa menghentikannya. Teknologi telah mampu memampatkan ruang dan memendekkan waktu. Karena teknologi, manusia telah mampu melintasi ruang dan waktu (*time and space distanciation*). Kecepatan produksi, informasi, konsumsi, inovasi, gaya hidup, mode, telah bergerak cepat sedemikian rupa sehingga perlambatannya sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Ibarat truk raksasa (*juggernaut*), modernitas telah menjadi makhluk liar yang tidak bisa dikendalikan, selain ditambah kecepatannya. Dalam argumentasi postmodernisme, *hyperspeed* telah menjebak manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk informasi.

Untuk kasus Indonesia, perkembangan teknologi komunikasi layak untuk digarisbawahi. Penggunaan *handphone* di Indonesia saat ini adalah 125 juta (Nielsen) dengan tren yang terus meningkat. Indonesia merupakan pengguna *Facebook* terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India dengan jumlah 43,06 juta. (www.socialbakers.com). Indonesia juga merupakan negara terbesar keempat di Asia dalam hal penggunaan internet dengan jumlah 39,6 juta (*World Stats*). Yang perlu dicatat, seluruh perkembangan angka itu berada dalam tren meningkat.

Profil data itu tentu saja berimplikasi pada meningkatnya produksi dan kecepatan informasi. Jumlah konsumsi teknologi komunikasi juga telah menambah pelaku komunikasi dengan berbagai modusnya. Yang menjadi masalah adalah, ada jarak antara konsumsi teknologi komunikasi dengan cara pikir dalam merespon informasi lewat teknologi itu. Teknologinya baru namun cara merespon informasinya masih dalam paradigma lama yaitu bahwa setiap informasi yang muncul sudah valid dengan sendirinya. Diandaikan sudah ada sistem penjaga gawang- seperti dalam penyebaran informasi tradisional - yang menjadi filter dari informasi tersebut sehingga orang

menerimanya atau menyeberakannya mentah-mentah. Padahal peta baru penggunaan teknologi komunikasi justru membuat informasi makin antah-berantah.

Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai penerima informasi sekaligus penyebar informasi? Bil Kovach dan Tom Rosentiel mengajukan pentingnya sebuah *next journalism* dimana penjaga kelayakan informasi tidak lagi dialamatkan kepada jurnalis namun individu masing-masing. Ketika setiap orang adalah produsen dan konsumen berita sekaligus, maka setiap orang pulalah merupakan *gate-keeper* bagi validitas informasi.

5.3.5 *The Logic of Accumulation and Exclusion* dalam Penyiaran Komunitas

Lembaga penyiaran komunitas merupakan contoh ekstrem bagaimana logika akumulasi dan eksklusi (*the logic of accumulation and exclusion*) seperti yang disampaikan Douglas Kellner diterapkan dalam era media penyiaran liberal. Media-media yang dianggap tidak berada dalam orbit logika rejim pasar dianggap tidak penting untuk beroperasi. Lembaga penyiaran komunitas –baik radio maupun televisi- tidak mendapatkan tempat layak dalam skema kebijakan penyiaran. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia dideklarasikan 20 Mei 2008 di Magelang sehingga bahasan mengenai hal ini akan banyak mengambil kasus radio komunitas. Secara kategorial, Indonesia sebenarnya mengakui adanya lembaga penyiaran komunitas selain penyiaran swasta, penyiaran publik, dan penyiaran berlangganan lewat UU Penyiaran No. 32/2002. Akan tetapi pengakuan itu tidak diikuti - dan bahkan dikhianati – oleh peraturan di bawah UU yaitu SK Menhub No.15/2003 dan PP Penyiaran No. 51/2005. Tercatat ada empat belas pembatasan bagi radio komunitas yang membuat penyiaran komunitas tidak leluasa bergerak.

Eksklusi terhadap lembaga penyiaran komunitas sebenarnya sudah menjadi bagian dari strategi politik penguasa di Indonesia sejak jaman Belanda. Dalam era merdeka, kondisi ini agak ironis karena radio komunitas telah lama menjadi bagian penting dalam sejarah penyiaran di Indonesia. Bahkan, semangat radio komunitas menjadi cikal bakal

berdirinya radio pertama di Indonesia lewat pembentukan *Bataviasche Radio Vereniging* (BRV) tahun 1925.

Sesudah BRV mengudara, aktivitas radio muncul di Solo, Bandung, Garut, Cirebon, Yogyakarta, dengan melibatkan kelompok elit pribumi, Belanda, dan Tionghoa. Pemerintah kolonial Belanda segera meresponnya dengan mendirikan *Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM). Dengan munculnya NIROM sebagai lembaga resmi, maka radio di luar NIROM menjadi tidak resmi. Inilah cara Belanda mengeksklusi radio yang sangat bercorak komunitas waktu itu. NIROM juga menjadi cikal bakal dari melekatnya praktik radio pada penguasa (Ashadi Siregar, 2001). Persoalan alokasi frekuensi belum menjadi masalah pada waktu itu.

Pada jaman Jepang, eksklusi dilakukan dengan cara teknis. Jepang menyegel pesawat radio dan membuat supaya radio hanya bisa menerima siaran resmi yaitu Hosokyoku. Tujuan Jepang adalah menyeleksi materi siaran yang berbau Belanda dan mengakomodasi muatan lokal.

Seperti halnya karakter pemerintahan presiden Soekarno yang monolitik, RRI yang lahir pada 11 September 1945 juga hadir sebagai kekuatan monolitik sepanjang Orde Lama. Tidak ada ekspresi penyiaran radio lain selain RRI. Baru pada tahun 1966 kelompok pemuda dan mahasiswa mendirikan radio sebagai reaksi atas isu keterlibatan radio dalam Gestapu.

Pada awal Orde Baru, kebebasan berekspresi sempat hidup lewat radio berbasis hobi sampai diterbitkann PP No. 55/1970 yang mewajibkan seluruh radio di luar radio pemerintah memiliki badan hukum berbentuk PT. Sekali lagi semangat komunitas dipenggal. Pemenggalan semangat komunitas itu bermotif mencegah tumbuhnya kembali organisasi akar rumput yang dikhawatirkan berafiliasi pada komunisme. Lewat bentuk badan hukum PT, praktik radio digiring pada aspek ekonomi. Radio-radio yang tumbuh di kampus-kampus sepanjang Orde Baru dikategorikan sebagai radio gelap. Inilah eksklusi pertama yang bercorak ekonomi yaitu dengan mengarahkan cara kerja radio melulu pada

aspek komersial saja lewat kewajiban badan hukum PT. Dianggap tidak ada bentuk radio lain selain radio swasta.

Pergolakan penting terjadi antara tahun 1997-2002. UU Penyiaran No.24/1997 yang dibuat Orde Baru tidak mengakomodasi bentuk penyiaran komunitas meskipun secara faktual banyak radio komunitas mulai bermunculan terutama di kampus (A. Darmanto, 2008). UU itu hanya mengakui lembaga penyiaran pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran khusus.

Pasca kejatuhan Soeharto merupakan musim tumbuhnya radio komunitas di berbagai daerah. Pertumbuhan itu sangat signifikan dan merata di berbagai daerah. Penggunaan istilah radio komunitas menjadi jamak dan menjadi bagian penting dalam wacana para aktivis pro reformasi. Secara resmi, baru pada tahun 2001 keberadaan lembaga penyiaran komunitas dimuat dalam draft RUU Penyiaran usulan inisiatif DPR. Namun pengaturan lembaga penyiaran komunitas dalam RUU itu ditolak Menhub Agum Gumelar dengan alasan pemborosan spektrum frekuensi. Pada tahun 2002 terbentuk Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) sebagai upaya politik untuk mengegolkan diakuinya lembaga penyiaran komunitas dalam UU Penyiaran.

Upaya politik itu berhasil. UU No. 32/2002 secara resmi mengakui keberadaan lembaga penyiaran komunitas selain penyiaran publik, swasta, dan berlangganan. Meski demikian masalah belum berhenti. Semangat untuk menegaskan keberadaan lembaga penyiaran komunitas tetap muncul dalam berbagai aturan turunan UU. SK Menhub No.15/2003 hanya mengalokasikan tiga kanal (202, 203, 204) pada frekuensi 107,7, 107,8, 107,9 M.Hz untuk radio komunitas. Jika dibandingkan, alokasi itu hanyalah 1,5% dari seluruh spektrum frekuensi. Radio swasta memperoleh 78,5%, sedangkan radio publik memperoleh 20%.

Proporsi alokasi frekuensi jelas mendorong dominasi ruang publik penyiaran pada dimensi ekonomi saja dengan memberikan 78,5% frekuensi kepada penyiaran swasta. Karena tidak berada dalam logika rejim pasar, maka lembaga penyiaran komunitas dieklusi dengan memberikan 1,5% frekuensi saja. Strategi yang diambil pemerintah

adalah membatasi gerak radio komunitas tanpa melanggar UU Penyiaran. Pengakuan radio komunitas dalam UU No. 32/2002 disiasati oleh aturan turunan yang justru menekan radio komunitas. Posisi yang diambil pemerintah jauh dari mendukung keberadaan radio komunitas.

Pembatasan kanal tampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk menekan radio komunitas. Tahun 2005 terbit PP No. 51 yang membatasi jangkauan siaran sejauh 2,5 kilometer dengan kekuatan maksimal 50 watt. Di wilayah luas seperti Kalimantan dan Papua, apa gunanya membangun radio komunitas dengan jangkauan siar 2,5 KM? Aturan lain dalam PP itu juga bersemangat menekan aspek kelembagaan radio komunitas.

Darmanto (2009) mencatat ada 14 ketentuan yang berpotensi menghambat perkembangan radio komunitas yaitu:

- a. Komunitas pendirinya hanya boleh dari suatu wilayah dan tidak boleh komunitas internasional
- b. Daya jangkau siaran maksimal 2,5 KM
- c. Kekuatan daya pancar (*Effective Radiated Power, ERP*) maksimal 50 watt
- d. Tidak boleh komersial atau mencari laba
- e. Tidak boleh menjadi bagian dari perusahaan yang hanya mencari untung
- f. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing
- g. Sumber pembiayaan hanya dari hibah, sponsor, dan sumber lain yang tidak mengikat
- h. Tidak boleh terkait dengan organisasi terlarang
- i. Tidak untuk propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu
- j. Tidak boleh minta bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing

- k. Tidak boleh menyiarkan iklan komersial
- l. Harus membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran
- m. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi
- n. Proses perijinan harus sampai ke menteri³⁷

Pada masa liberal dimana kecurigaan politik seharusnya tidak dominan lagi, pembatasan terhadap radio komunitas dilakukan dalam koridor ekonomi lewat pembatasan iklan. Sifat radio komunitas yang nirlaba diasosiasikan bahwa logika produksi radio komunitas tidak mengarah pada akumulasi modal. Pada kenyataannya, pembatasan iklan itu bahkan tidak bisa membuat radio komunitas beroperasi secara layak.

Potensi kondisi yang memburuk tampaknya akan terjadi pada era digital. RUU Konvergensi Media merupakan preseden penting bagaimana pemerintah menyikapi penyiaran komunitas. RUU itu membagi penyiaran menjadi penyiaran komersial maupun non komersial. Akan tetapi, dalam wilayah non-komersial pun, tidak disebutkan adanya lembaga penyiaran komunitas. Yang termasuk ke dalam penyiaran non-komersial adalah penyiaran layanan universal, pertahanan keamanan, dan pribadi. RUU ini tidak sekedar membatasi peran penyiaran komunitas, namun terang-terangan tidak mengakui eksistensi penyiaran komunitas. Meskipun RUU ini tidak dibahas lebih lanjut, akan tetapi logika berpikarnya merupakan preseden penting tentang bagaimana logika penguasa politik dan ekonomi melihat penyiaran.

³⁷ A. Darmanto dalam Haryanto, Ignatius & Judy Ramdojo, Juventius, *Dinamika Radio Komunitas*, LSPP & Yayasan Tifa, Jakarta, 2009, halaman 29

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tesis ini menjelaskan bahwa dalam proses liberalisasi media di Indonesia, pada akhirnya yang diuntungkan adalah industri media, dibanding liberalisasi politik. Liberalisasi politik dalam konteks media melibatkan persoalan seperti kebebasan jurnalistik, perlindungan terhadap jurnalis, dan kebebasan berserikat bagi para pekerja jurnalis. Walaupun pada awalnya gerakan perubahan media diawali oleh agen-agen non industrial seperti jurnalis dan asosiasi jurnalis dalam konteks politik perlawanan terhadap Soeharto, sesudah rejim Orde Baru tumbang dan sistem hukum baru disahkan, aktor-aktor industri menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan akumulasi modal. Ada beberapa indikator yang akan dieksplorasi untuk menjelaskan itu yaitu konglomerasi media, depolitisasi media dan massa, rendahnya perlindungan terhadap jurnalis, rendahnya pendapatan jurnalis, terpinggirkannya pelaku media non industrial seperti media penyiaran komunitas, dan menurunnya kebebasan pers. Pada sisi yang lain, kenaikan kekuatan industri media tidak pernah terbendung yang ditandai oleh selalu naiknya belanja iklan di media. Bab ini akan mengulas persoalan seperti itu.

Sebelum masuk ke pembahasan itu, akan dibahas dulu dimensi historis (*historical situatedness*) untuk menjelaskan mengapa kecenderungan penguatan industri ini terjadi. Dimensi-dimensi yang akan dibahas adalah, *pertama*, kecenderungan depolitisasi media dan menguatnya industri media yang dimulai sejak hancurnya Orde Lama dan integrasi ekonomi Indonesia ke mashab neo klasik di bawah Orde Baru. Kajian tentang ini dilakukan oleh Daniel Dhakidae (1991) yang melihat bahwa integrasi Orde Baru ke dalam ekonomi liberal juga diikuti oleh karakter media cetak yang industrial pada satu sisi dan pada sisi yang lain mematikan karakter politis media cetak seperti yang terjadi sebelumnya. Penelitian itu membuktikan bahwa sebelum Orde Baru, dinamika politik

berbanding lurus dengan dinamika media massa karena pasar media massa memiliki irisan yang besar dengan pengikut politik.

Kedua, penguatan wacana anti Orde Baru di kalangan masyarakat sipil dan jurnalis. Pada bab ini akan disampaikan bahwa perlawanan masyarakat sipil terhadap otoritarianisme menyumbang kontribusi besar terhadap proses liberalisasi media. Dalam konteks media, pembredelan *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* menjadi cikal bakal dari eskalasi gerakan perlawanan jurnalis terhadap otoritarianisme Orde Baru. Meskipun dimensi gerakan ini bersifat politik, namun secara diskursif wacana perlawanan terhadap Orde Baru menjadi basis penting bagi mulusnya legislasi regulasi yang bercorak liberal, termasuk UU Pers No. 40/1999.

Ketiga, peran donor asing terutama USAID di penghujung Orde Baru yang membiayai banyak aktivitas menuju liberalisasi media dan perubahan kebijakan. Meski perannya samar, donor asing memberikan kontribusi besar terhadap proses liberalisasi di Indonesia. Uraian di bab ini akan melihat bagaimana donasi itu diberikan dengan data-data resmi dari lembaga yang menerima. Peran donor yang notabene berasal dari negara-negara liberal bisa ditafsirkan beragam. Untuk konteks Indonesia, fakta bahwa menurunnya donor di sektor media sesudah tahun 2002 bisa dijadikan gambaran bahwa peran donor terkait erat dengan liberalisasi. Sesudah *structural adjustment* terjadi, donor bisa saja tidak masuk ke suatu negara.

Pembahasan juga akan melihat bagaimana posisi kebijakan media dalam proses tersebut. Regulasi merupakan arena pertempuran penting bagi para pihak untuk mengontestasikan kepentingan-kepentingan mereka. Dalam konteks liberalisasi, *structural adjustment* lewat perubahan regulasi menjadi pintu masuk utama integrasi suatu negara ke sistem kapitalisme global. Dalam perspektif lain, perubahan kebijakan juga menandai proses demokratisasi. Kerumitan-kerumitan seperti inilah yang tampak dalam proses liberalisasi media di Indonesia.

Secara sederhana, penelitian ini ingin membuktikan dimensi-dimensi yang terjadi sesudah liberalisasi media. Tabel di bawah ini merangkum kecenderungan yang terjadi,

dimana telah terjadi penguatan aspek ekonomi media massa yang mendorong akumulasi modal, namun melemahkan dimensi-dimensi demokrasi politik.

Dimensi		Melemah	Menguat
Ekonomi	Politik		
Pertumbuhan Media			X
Belanja Iklan			X
Media Franchise			X
	Kebebasan Pers	X	
	Kekerasan terhadap Jurnalis		X
	Perlindungan terhadap Jurnalis	X	
	Depolitisasi media		X
Konglomerasi Media			X
	Serikat Pekerja Pers	X	
	Media Komunitas	X	

Ruang publik pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga imperatif yaitu imperatif politik, imperatif ekonomi, dan imperatif komunitas/publik. Ketiga imperatif itu saling berkontestasi untuk memperebutkan dominasi dalam pembentukan ruang publik. Ketiga imperatif itu juga bersifat saling memengaruhi dengan modus-modus yang rumit dan kadang susah dicermati. Idealitas mengenai ruang publik adalah ketika masing-masing imperatif tersebut tidak melakukan praktik-praktik ideologis dalam melakukan tindakan komunikasi. Habermas merumuskannya sebagai berikut:

Dengan 'ruang publik', kami maksudkan pertama-tama suatu wilayah kehidupan sosial kita di mana apa yang disebut opini publik terbentuk. Akses kepada ruang publik terbuka bagi semua warga negara. Sebagian

dari ruang publik terbentuk dalam setiap pembicaraan di mana pribadi-pribadi berkumpul untuk membentuk suatu 'publik'. Bila publik menjadi besar, komunikasi ini menuntut suatu sarana untuk diseminasi dan pengaruh; zaman sekarang surat kabar dan majalah, radio dan televisi menjadi media ruang publik.¹

Ketiga imperatif itu pulalah yang menjadi aktor-aktor penting dalam sejarah media di Indonesia. Imperatif politik menjadi dasar penting dalam awal-awal sejarah media Indonesia yang memuncak pada Orde Lama dimana pers cetak selalu mengafiliasikan dirinya dengan ideology politik. Pembelahan konsumen media sama dengan pembelahan massa ideologis dari kekuatan politik. Pola ini dipangkas secara dramatis pada era 1960-an melalui sebuah upaya politik yang sistematis. Kesadaran awam melihatnya sebagai pemberontakan PKI walaupun realitas politiknya jauh lebih rumit dari sekedar pemberontakan. Orde Baru kemudian memperkuat imperatif politik dan imperatif ekonomi sekaligus dimana media massa didorong menjadi apparatus ideologis otoritarianisme Orde Baru sekaligus dikombinasikan dengan imperatif ekonomi dimana media massa diarahkan untuk menjalankan fungsi-fungsi korporatisnya dalam payung otoritarian. Pemaksaan badan hukum PT dalam penyiaran radio dan pendirian televisi swasta tahun 1980-an merupakan contoh dari pola ini.

Periode 1994-2002 merupakan periode menarik dimana isu demokratisasi mulai berkembang dalam diskursus para pelaku advokasi media dan komunikasi saat itu. Otoritarianisme Orde Baru pada media massa memuncak tahun 1994 ketika Menteri Penerangan Harmoko membredel tiga media cetak sekaligus yaitu *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*. Gelombang demokratisasi kemudian mulai bergerak melalui perlawanan-perlawanan baik yang bersifat bawah tanah maupun terbuka. Gerakan bawah tanah muncul lewat penerbitan majalah *Independen* yang berisi berita-berita kritis yang tidak dimuat media *main stream*. Asosiasi jurnalis independen juga lahir yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 1994. Hal-hal itu bersamaan dengan menguatnya

¹ Habermas, Jurgen, *The Public Sphere*, dalam C. Mukerji & M. Schudson (Eds.) *Rethinking Popular Culture: Contemporary Perspectives in Cultural Studies*. Berkeley: University of California Press, 1991, halaman 398 seperti dikutip oleh F. Budi Hardiman, *Ruang Publik*, Kanisius Yogyakarta, 2010 halaman 271

perlawanan terhadap Orde Baru yang muncul di kalangan mahasiswa, LSM, dan tokoh-tokoh intelektual independen saat itu. Kelompok inilah yang menjadi agen-agen penting dalam proses penumbangan Orde Baru tahun 1998. Dalam bahasa lain, merekalah representasi dari imperatif publik yang berhasil mengalahkan Orde Baru sebagai representasi imperatif politik.

Dalam kaitannya dengan ketiga imperatif di atas, yang terjadi pada masa ini adalah upaya untuk memperkuat imperatif publik melawan imperatif politik. Imperatif publik muncul lewat idiom demokratisasi yang terasa makin menguat pada paruh kedua 1990-an. Tidak banyak yang tahu bahwa pada periode penguatan imperatif publik itu, muncul pula aktor-aktor internasional lewat lembaga multilateral semacam UNESCO atau lembaga bilateral yaitu donor-donor dari negara maju seperti USAID dan Uni Eropa. USAID misalnya, memberikan donasi kepada ISAI untuk program kebebasan pers pada tahun 1995, sebelum Soeharto jatuh. Donasi itu dipakai untuk membiayai penerbitan majalah bawah tanah, penguatan asosiasi jurnalis, membiayai kegiatan kritis terhadap Orde Baru termasuk gerakan kiri. Mewakili imperatif manakah kekuatan-kekuatan internasional itu? Pertanyaan ini mencerminkan salah satu kerumitan dalam melihat liberalisasi media di Indonesia.

Tumbangnya Soeharto membuat legitimasi imperatif publik semakin kuat dalam merevisi aturan-aturan yang tidak pro publik atau tidak demokratis. UU Pers No. 40/1999 merupakan regulasi media pertama yang mencerminkan kekuatan imperatif publik dalam ruang publik. Inilah UU media yang mengakui sensor internal, menghapuskan sistem breidel dan SIUPP, dan mengakui sistem pengawasan etika media secara independen. Pendeknya, kekuasaan imperatif politik dipotong dalam regulasi ini. Siapapun boleh mendirikan bisnis media, termasuk aktor asing walau melalui mekanisme waralaba. Skema ini tampaknya direncanakan untuk menyusun UU Penyiaran. Masyarakat sipil dan pebisnis media penyiaran bersama-sama mengajukan konsep regulasi penyiaran sesudah Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Di kemudian hari, koalisi ini terbelah karena representasi industri merasa tidak diakomodasi dalam proses penyusunan UU Penyiaran.

Imperatif publik seharusnya memang diperkuat dalam proses liberalisasi media. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa imperatif ekonomilah yang paling mengalami keuntungan luar biasa. Indikasinya adalah kenaikan belanja iklan yang terus terjadi sejak 1998. Ini mengindikasikan bahwa bisnis media paling diuntungkan dalam proses liberalisasi media. Sementara pada sisi lain, imperatif komunitas justru cenderung terpinggirkan. Indikatornya adalah marjinalisasi media-media yang tidak berada dalam orbit pasar misalnya penyiaran komunitas dan penyiaran publik. Penyiaran komunitas lebih banyak mengalami restriksi daripada fasilitasi. Iklim media yang tampaknya bebas juga sebenarnya tidak benar-benar menguntungkan imperatif publik. Di tengah kenaikan belanja iklan, indeks kebebasan pers Indonesia turun terus sejak tahun 2001. Angka kekerasan terhadap jurnalis juga cenderung meningkat. Konsentrasi kepemilikan media terjadi. Sejak 1996, ada sepuluh kasus pembunuhan jurnalis yang tidak terungkap.²

Dengan latar sejarah kapitalisme semu, dominasi imperatif ekonomi pada ruang publik terjadi karena kekuatan ekonomi tersebut berjejaring dengan birokrasi negara. Ini terutama terjadi pada ranah media penyiaran.

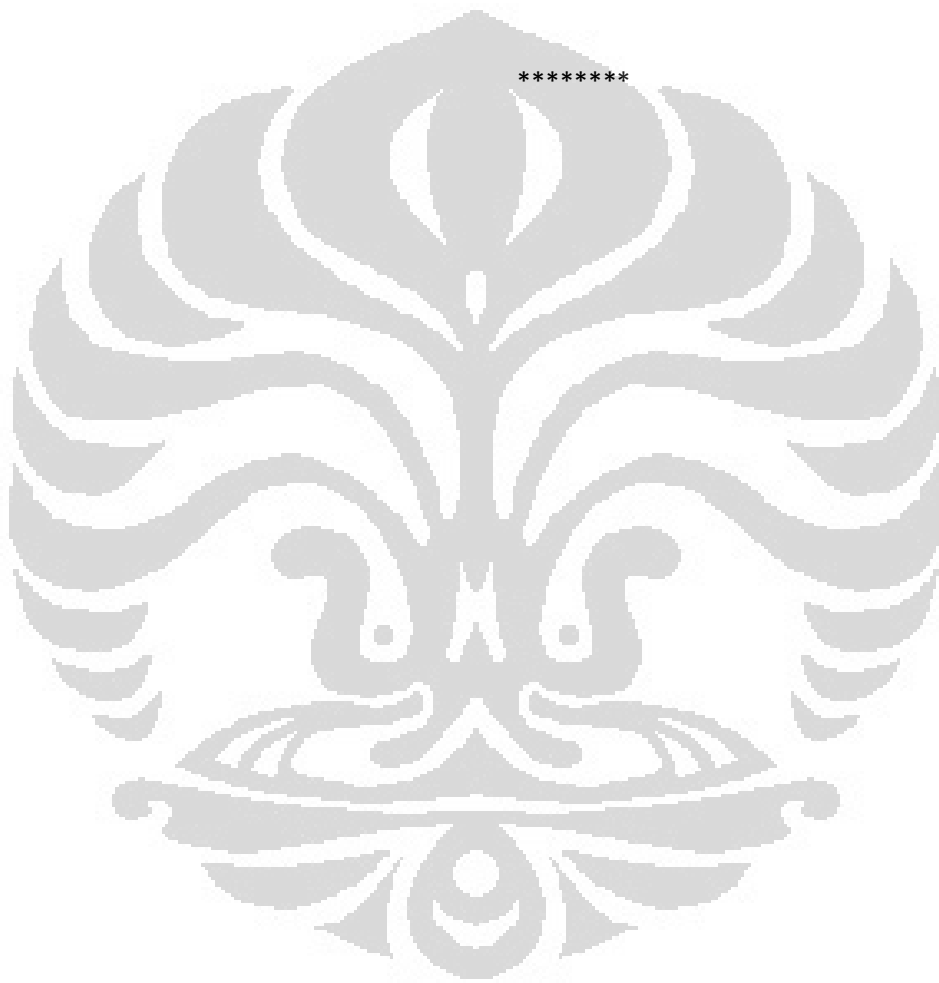
Liberalisasi media yang pada awalnya merupakan agenda demokratisasi pada akhirnya lebih menguntungkan kekuatan ekonomi media saja. Masalahnya adalah, dominasi imperatif ekonomi ini bisa mengancam demokratisasi yang pada awalnya diusung oleh agen-agen demokratisasi seperti kelompok jurnalis independen dan aktivis lainnya. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa justru hak-hak jurnalis dalam media industrial belum terpenuhi sebelumnya. Ancaman terhadap demokrasi juga muncul dari konsentrasi kepemilikan media yang hanya berpusat pada dua belas kelompok usaha media saja untuk populasi dari luas wilayah sebesar Indonesia. Hal ini memunculkan ancaman serius pada aspek heterogenitas informasi yang menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi.

² LBH Pers Jakarta, Laporan Tahunan 2011

Rekomendasi

- Perjuangan masyarakat sipil di Indonesia pada periode 1994-1999 dalam mewujudkan demokrasi media terbukti berhasil lewat pengesahan UU Pers No. 40/1999. Perjuangan ini luar biasa mengingat rejim Orde Baru sangat kuat dalam membangun jarring-jaring kekuasaan selama tiga dekade. Akan tetapi kekuatan ekonomi yang juga hadir dalam proses liberalisasi itu tidak terlalu diperhitungkan oleh gerakan masyarakat sipil. Sejarah kemudian membuktikan bahwa kekuatan ekonomi saat ini mendominasi ruang publik di Indonesia. Masyarakat sipil sebaiknya membangun modus baru dalam advokasi demokratisasi media yang terlanjur didominasi oleh imperatif ekonomi. Modus advokasi ini penting sebagai konsekuensi dari bergesernya pendulum dominasi dari negara ke ekonomi.
- Ketika terbukti bahwa imperatif ekonomi juga berjaring dengan birokrasi, maka upaya demokratisasi media penting untuk dilakukan dalam ranah hukum. Persoalan kepemilikan media misalnya, ternyata terbukti merupakan hasil dari simbiosis antara kekuatan industri media dan birokrasi negara. Advokasi pada ranah hukum membuat kekuatan masyarakat sipil menjadi setara dan relatif lebih menjamin.
- Pada level pekerja pers, penguatan asosiasi pekerja pers harus segera dilakukan untuk memperkuat *bargaining position* pekerja pers di hadapan industri media. Pekerja pers terbukti tidak mendapatkan tempat yang semestinya dan cenderung ditolak oleh manajemen media. Ini ironis karena jurnalistah – dan bukan perusahaan pers – yang secara historis lebih berperan dalam mewujudkan kebebasan pers ketimbang perusahaan pers.
- Bagi penelitian selanjutnya, penting untuk mengupas persoalan media waralaba (*franchise*) dan persoalan masuknya perusahaan iklan asing ke Indonesia. Menurut penulis, kedua aspek ini merupakan saluran dimana kekuatan ekonomi kapital global sangat berkepentingan dalam liberalisasi. Kedua aspek ini tidak sempat untuk dibahas oleh penulis karena keterbatasan data yang tersedia. Media

waralaba memperluas cakupan pasar media global yang tidak bisa dilakukan secara maksimal pada masa rejim otoriter. Liberalisasi membuat siapapun bisa beraktivitas jurnalistik. Pada aspek waralaba, karena kepemilikan langsung media asing di Indonesia dilarang hukum, maka media waralaba merupakan celah yang memungkinkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Ade, *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*, Bentang Yogyakarta, 2011
- Caporaso, James A., dan Levine, David P., *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Chomsky, Noam and Herman, Edward S., *Manufacturing Consent*, Pantheon Books, New York, 2002
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Freedman, Des, *The Politics of Media Policy*, Polity Press, Cambridge, 2008
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, Penguin Books, New York, 1992
- Gazali, Effendi *et. al.* *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*, Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2003
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, 1984
- Hamelink, Cees J., *The Politics of World Communication*, SAGE Publications, London, 1994
- Hardiman, Budi F., *Ruang Publik*, Kanisius Yogyakarta, 2010
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011
- Kellner, Douglas, *Budaya Media*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010
- Kitley, Philip, *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*, ISAI-LSPP, Jakarta, 2000
- Kristiawan, R. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001
- Masduki, *Regulasi Penyiaran, dari Otoriter ke Liberal*, LKis, Yogyakarta, 2007

McChesney, Robert W. and Herman, Edward S., *The Global Media: The New Missionaries of Corporate Capitalism*, Cassell, London, 1997

McChesney, Robert W., *Rich Media, Poor Democracy*, The New Press, New York, 1999

_____, *The Political Economy of Communication*, Monthly Review Press, New York, 2008

_____, *Communication Revolution*, The New Press, New York, 2007

Mises, Ludwig von, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute, Jakarta, 2011

Mosco, Vincent, *The Political Economy of Communication*, SAGE Publication, London, 2009

Panjaitan, Hinc, *Peran Media, Ombudsman Pers & Hak Jawab untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah*, IMLPC-LGSP USAID, Jakarta, 2006

Perkins, John, *Confessions of an Economic Hit Man*, Abdi Tandur, Jakarta, 2005

Peter Golding & Graham Murdock eds., *The Political Economy of the Media*, Edward Edgar Publishing Ltd, 1997

Pers, Dewan, *Data Pers Nasional 2011*, Dewan Pers, Jakarta, 2011

Prasetyantoko, A., *Gerakan Kelas Menengah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Ritzer, George & Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2004

Sen, Krishna & Hill, David T., *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, ISAI, Jakarta 2000

Silverman, David, *Doing Qualitative Research*, SAGE Publication, London, 2000

_____, *Interpreting Qualitative Data*, SAGE Publication, London, 2001

Siregar, Amir Effendi, et al, *Dominasi Televisi Swasta*, PR2Media-Yayasan Tifa, 2011

Strinati, Dominic, *An Introduction to Theories of Popular Culture*, Routledge, London, 1995

Sudibyo, Agus, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, ISAI, Jakarta, 2004

Wahono, Francis & Wibowo, I. (editor), *Neoliberalisme*, Cindelaras, Yogyakarta, 2003

Disertasi dan Tesis

Armando, Ade, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Dhakidae, Daniel, *The State, The Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political*

Economy of Indonesian News Industry, Cornell University, 1991

Ispandriarno, Lukas, *Political Communication in Indonesia, An Analysis of the Freedom of the*

Press in the Transition Process after the Downfall of the Soeharto-Regime (1998-2004),

Ilmenau Technische Universitaet, 2008

Nursatyo, *Tesis*, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI 2012

Penelitian

AJI Indonesia, *Potret Jurnalis Indonesia*, AJI Indonesia, Jakarta, 2005

Nugroho Yanuar et al, *Mapping of Media Policy in Indonesia*, CIPG-HIVOS, Jakarta, 2012

-----, *The Landscape of Media Industry in Contemporary Indonesia*, CIPG-HIVOS, 2012

Lim, Merlyna, *@crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia*,

Arizona State University, 2011